

Pemulihan Ekonomi Indonesia: Dari Pertumbuhan Menuju Peningkatan Taraf Hidup Masyarakat

Oleh

Prof Ir Rudy C Tarumingkeng, PhD

www.rudyc.com/cv.pdf

Institut Bisnis dan Multimedia (IBM ASMI)

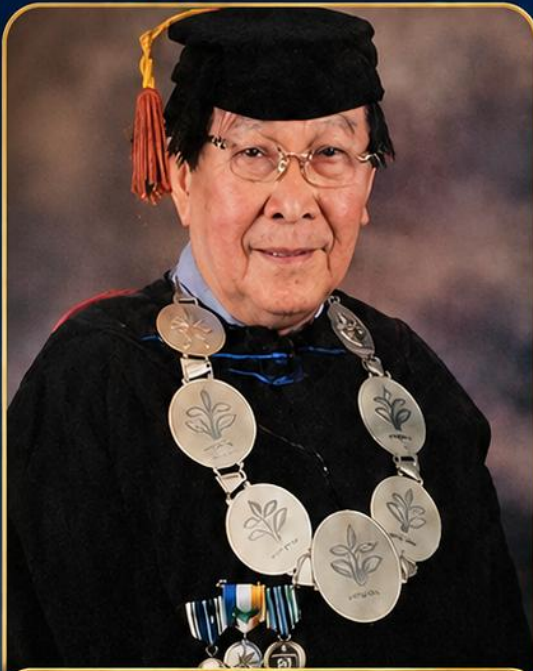
RudyCT Academic Series 2026

PEMULIHAN EKONOMI INDONESIA

DARI PERTUMBUHAN MENUJU
PENINGKATAN TARAF HIDUP MASYARAKAT



“Pertumbuhan yang inklusif harus diterjemahkan menjadi kesejahteraan yang nyata bagi masyarakat.”



Oleh:

Prof Ir Rudy C Tarumingkeng, PhD



www.rudycct.com/cv.pdf



IBM-ASMI (Institut Bisnis dan Multimedia)

1



Pertumbuhan Inklusif

memperluas manfaat pertumbuhan ke seluruh lapisan masyarakat.

2



Lapangan Kerja Berkualitas

pekerjaan produktif, aman, dan bermartabat.

3



Daya Beli & Kesejahteraan

peningkatan pendapatan riil dan perlindungan sosial.

4



UMKM & Kewirausahaan

penguatan ekonomi rakyat dan inovasi lokal.

5



Pendidikan & Kesehatan

fondasi kualitas hidup dan mobilitas sosial.

6



Pemerataan Wilayah

pembangunan yang lebih adil antar daerah.



**MENUJU INDONESIA YANG LEBIH
SEJAHTERA, TANGGUH, DAN BERKEADILAN.**



Abstrak

Pemulihan ekonomi tidak selesai ketika produk domestik bruto kembali tumbuh. Ukuran yang lebih substantif adalah apakah pertumbuhan tersebut meningkatkan kemampuan rumah tangga untuk hidup lebih aman, sehat, produktif, dan bermartabat. Artikel ini menganalisis hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan peningkatan taraf hidup masyarakat Indonesia dengan menempatkan kualitas pekerjaan, produktivitas, upah riil, konsumsi rumah tangga, kemiskinan, ketimpangan, akses layanan dasar, modal manusia, perlindungan sosial, serta kualitas lingkungan sebagai mata rantai transmisi utama. Dalam konteks 2026, ekonomi Indonesia menunjukkan ketahanan yang kuat, tetapi tantangan pembangunan tetap terletak pada bagaimana mengubah momentum pertumbuhan menjadi pekerjaan yang lebih baik, kenaikan pendapatan riil, mobilitas sosial, dan pemerataan antarwilayah. Artikel ini mengembangkan kerangka 'growth-to-living-standards transmission' yang menghubungkan sumber pertumbuhan dengan distribusi kesempatan dan hasil kesejahteraan. Pembahasan mencakup transformasi struktural, industrialisasi dan hilirisasi, UMKM, pembangunan desa, ekonomi digital dan kecerdasan buatan, reskilling-upskilling, kesehatan, pendidikan, perumahan, transportasi, ketahanan pangan, gender, pemuda, ekonomi hijau, kebijakan fiskal, serta tata kelola. Kesimpulannya, strategi pemulihan yang inklusif harus menggeser orientasi kebijakan dari sekadar memperbesar output menuju peningkatan kapabilitas manusia, kualitas kerja, daya beli, dan ketahanan rumah tangga secara berkelanjutan.

Kata Kunci: pemulihan ekonomi; pertumbuhan inklusif; taraf hidup; produktivitas; upah riil; pekerjaan berkualitas; kemiskinan; ketimpangan; modal manusia; perlindungan sosial; transformasi struktural; Indonesia.

Catatan Konteks Data

Data konjungtur terbaru yang digunakan dalam naskah ini merujuk terutama pada rilis resmi BPS dan World Bank yang tersedia hingga Agustus 2026. Angka-angka digunakan sebagai konteks analitis, bukan sebagai satu-satunya ukuran keberhasilan pembangunan. Perbedaan periode survei, definisi, dan metode pengukuran harus diperhatikan ketika membandingkan indikator.

Ringkasan Eksekutif

Pada triwulan I-2026 ekonomi Indonesia tumbuh 5,61 persen secara tahunan. Pada 2025, PDB per kapita mencapai sekitar Rp83,7 juta atau US\$5.083,4. Di pasar kerja, Februari 2026 mencatat 147,67 juta penduduk bekerja, TPT 4,68 persen, dan rata-rata upah buruh Rp3,29 juta. Data ini menunjukkan kapasitas ekonomi yang bertahan dan menyerap tambahan tenaga kerja, tetapi tidak otomatis menjawab apakah kenaikan output sudah meningkatkan kualitas hidup secara merata.

Pertumbuhan memengaruhi taraf hidup melalui beberapa kanal: penciptaan kerja, peningkatan produktivitas, kenaikan upah dan laba usaha, stabilitas harga, penerimaan fiskal, pembiayaan layanan publik, serta akumulasi aset manusia dan fisik. Setiap kanal dapat mengalami kebocoran.

Pertumbuhan yang terkonsentrasi pada sektor padat modal, wilayah tertentu, atau kelompok

berkeahlian tinggi dapat meningkatkan output tanpa memberi dampak proporsional pada pendapatan mayoritas rumah tangga.

Karena itu, agenda pemulihan perlu memadukan kebijakan makro yang menjaga stabilitas dengan kebijakan struktural yang memperbesar produktivitas dan mobilitas sosial. Prioritasnya adalah pekerjaan berkualitas; transformasi UMKM; modernisasi pertanian; reindustrialisasi dan hilirisasi yang menciptakan nilai tambah domestik; pendidikan dan kesehatan bermutu; reskilling-upskilling; konektivitas fisik-digital; perumahan dan transportasi terjangkau; perlindungan sosial adaptif; serta tata kelola yang mampu memastikan manfaat pembangunan menjangkau wilayah dan kelompok yang tertinggal.

Ukuran keberhasilan harus diperluas dari PDB menuju dashboard kesejahteraan: pendapatan riil median, produktivitas pekerja, upah riil, tingkat kemiskinan dan kerentanan, rasio pekerjaan formal, biaya perumahan dan transportasi, kualitas belajar, cakupan jaminan sosial, kesehatan, akses digital, kualitas lingkungan, dan mobilitas antargenerasi. Dengan cara ini, pertumbuhan ditempatkan sebagai sarana, sedangkan peningkatan kapabilitas dan taraf hidup masyarakat menjadi tujuan pembangunan.

Snapshot Ekonomi Indonesia dan Pertanyaan Kesejahteraan

Indikator	Konteks terbaru	Pertanyaan kebijakan
Pertumbuhan PDB	5,61% y-on-y, triwulan I-2026	Apakah pertumbuhan meningkatkan pendapatan riil mayoritas rumah tangga?
PDB per kapita	Rp83,7 juta pada 2025	Bagaimana distribusi pendapatan dan akses layanan di balik angka rata-rata?
Penduduk bekerja	147,67 juta, Februari 2026	Berapa banyak yang berada dalam pekerjaan produktif, aman, dan terlindungi?
TPT	4,68%, Februari 2026	Apakah masalah utama beralih dari kekurangan pekerjaan ke kualitas pekerjaan?
Rata-rata upah buruh	Rp3,29 juta, Februari 2026	Apakah kenaikan nominal melampaui biaya hidup dan mendukung tabungan serta mobilitas?
Struktur wilayah	Jawa 57,24% PDB triwulan I-2026	Bagaimana pusat pertumbuhan baru diciptakan di luar aglomerasi utama?

1. Dari Pemulihan ke Transformasi Kesejahteraan

Pergeseran orientasi dari memulihkan output menuju memperbaiki kualitas hidup merupakan inti persoalan yang dibahas pada bagian ini. Dalam kerangka pemulihan ekonomi Indonesia, pertanyaan penting bukan hanya seberapa cepat kegiatan ekonomi kembali berkembang, melainkan siapa yang memperoleh manfaat, melalui mekanisme apa, dan seberapa tahan manfaat tersebut terhadap guncangan berikutnya. Pertumbuhan agregat memang diperlukan karena tanpa perluasan basis produksi, ruang bagi penciptaan pendapatan dan penerimaan publik menjadi terbatas. Namun, kenaikan output baru menjadi pembangunan apabila menghasilkan kemampuan nyata bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan, meningkatkan keterampilan, menjaga kesehatan, membangun aset, dan merencanakan masa depan. Perspektif ini menempatkan taraf hidup sebagai hasil dari interaksi antara pasar kerja, struktur produksi, harga, layanan publik, aset rumah tangga, serta institusi.

Secara ekonomi, mekanismenya bekerja melalui beberapa jalur. Pertama, produksi yang meningkat menciptakan permintaan terhadap tenaga kerja, pemasok, jasa dan infrastruktur. Kedua, produktivitas yang lebih tinggi memperbesar ruang bagi kenaikan upah dan laba usaha. Ketiga, basis ekonomi yang melebar meningkatkan penerimaan fiskal yang dapat membiayai pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial dan infrastruktur. Keempat, proses tersebut membentuk ekspektasi dan investasi rumah tangga: ketika pendapatan lebih stabil, keluarga lebih berani menyekolahkan anak lebih lama, memperbaiki tempat tinggal, membeli alat produktif, atau memulai usaha. Akan tetapi, setiap jalur dapat terputus oleh konsentrasi pasar, mismatch keterampilan, inflasi, informalitas, lemahnya layanan publik, atau ketimpangan akses terhadap modal dan teknologi.

Dalam konteks Indonesia, pemulihan pascapandemi dan ketidakpastian global memperlihatkan bahwa ketahanan rumah tangga sama pentingnya dengan ketahanan makro. Contoh ini penting karena menunjukkan bahwa kebijakan yang tampak berhasil pada tingkat makro dapat memiliki hasil berbeda pada tingkat rumah tangga. Satu wilayah dapat mencatat investasi tinggi tetapi kesempatan kerja lokal terbatas; daerah lain dapat menyerap banyak tenaga kerja tetapi berada pada pekerjaan berproduktivitas rendah. Dengan demikian, analisis perlu bergerak dari pertanyaan 'berapa besar pertumbuhan?' menuju 'bagaimana struktur pertumbuhan itu?', 'siapa yang berpartisipasi?', dan 'apakah pendapatan serta layanan yang diterima masyarakat meningkat secara riil?'. Pendekatan seperti ini juga menghindari jebakan melihat rata-rata nasional sebagai gambaran semua kelompok.

Arah kebijakan yang relevan adalah menempatkan pendapatan riil median dan kapabilitas manusia sebagai sasaran bersama PDB. Kebijakan tersebut sebaiknya tidak diperlakukan sebagai proyek tunggal, melainkan sebagai paket yang menghubungkan sisi permintaan dan sisi penawaran. Insentif investasi, misalnya, perlu disertai pengembangan pemasok, pelatihan pekerja, infrastruktur, pembiayaan dan standar kerja. Program pendidikan perlu tersambung dengan kebutuhan industri dan perubahan teknologi. Bantuan sosial perlu terhubung dengan layanan kesehatan, pendidikan, penempatan kerja atau dukungan usaha ketika kondisi penerima memungkinkan. Integrasi semacam ini meningkatkan peluang bahwa setiap rupiah belanja publik atau investasi swasta menghasilkan multiplier ekonomi dan sosial yang lebih besar.

Dimensi distribusi juga menentukan keberhasilan. Kebijakan yang menaikkan efisiensi rata-rata dapat menghasilkan pemenang dan pihak yang tertinggal. Oleh karena itu, prinsip inklusi tidak berarti

menahan perubahan, tetapi memperluas kemampuan masyarakat untuk ikut memperoleh manfaat dari perubahan. Reskilling bagi pekerja terdampak, pembiayaan transisi bagi UMKM, perlindungan pendapatan sementara, serta layanan dasar yang berkualitas merupakan contoh instrumen yang membuat transformasi lebih adil. Dalam jangka panjang, pemerataan kesempatan yang baik justru memperbesar basis talenta, kewirausahaan dan permintaan domestik yang menopang pertumbuhan.

Untuk memastikan akuntabilitas, keberhasilan bagian ini sebaiknya dipantau melalui indikator seperti PDB, pendapatan riil median, konsumsi per kapita, indeks pembangunan manusia. Indikator output—misalnya jumlah program, pelatihan, proyek, atau penerima—tetap dibutuhkan untuk pengelolaan operasional, tetapi tidak boleh menggantikan outcome. Pertanyaan akhirnya adalah apakah masyarakat memiliki pendapatan riil lebih tinggi, pekerjaan lebih produktif, risiko ekonomi lebih rendah, akses layanan lebih baik, dan kesempatan mobilitas yang lebih besar. Ketika ukuran tersebut bergerak searah dengan pertumbuhan PDB, dapat dikatakan bahwa proses pemulihan mulai bertransformasi menjadi peningkatan taraf hidup yang substantif dan inklusif.

2. Mengapa Pertumbuhan Ekonomi Belum Identik dengan Taraf Hidup

Kesenjangan antara indikator agregat dan pengalaman ekonomi sehari-hari merupakan inti persoalan yang dibahas pada bagian ini. Dalam kerangka pemulihan ekonomi Indonesia, pertanyaan penting bukan hanya seberapa cepat kegiatan ekonomi kembali berkembang, melainkan siapa yang memperoleh manfaat, melalui mekanisme apa, dan seberapa tahan manfaat tersebut terhadap guncangan berikutnya. Pertumbuhan agregat memang diperlukan karena tanpa perluasan basis produksi, ruang bagi penciptaan pendapatan dan penerimaan publik menjadi terbatas. Namun, kenaikan output baru menjadi pembangunan apabila menghasilkan kemampuan nyata bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan, meningkatkan keterampilan, menjaga kesehatan, membangun aset, dan merencanakan masa depan. Perspektif ini menempatkan taraf hidup sebagai hasil dari interaksi antara pasar kerja, struktur produksi, harga, layanan publik, aset rumah tangga, serta institusi.

Secara ekonomi, mekanismenya bekerja melalui beberapa jalur. Pertama, produksi yang meningkat menciptakan permintaan terhadap tenaga kerja, pemasok, jasa dan infrastruktur. Kedua, produktivitas yang lebih tinggi memperbesar ruang bagi kenaikan upah dan laba usaha. Ketiga, basis ekonomi yang melebar meningkatkan penerimaan fiskal yang dapat membiayai pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial dan infrastruktur. Keempat, proses tersebut membentuk ekspektasi dan investasi rumah tangga: ketika pendapatan lebih stabil, keluarga lebih berani menyekolahkan anak lebih lama, memperbaiki tempat tinggal, membeli alat produktif, atau memulai usaha. Akan tetapi, setiap jalur dapat terputus oleh konsentrasi pasar, mismatch keterampilan, inflasi, informalitas, lemahnya layanan publik, atau ketimpangan akses terhadap modal dan teknologi.

Dalam konteks Indonesia, sektor padat modal dapat tumbuh cepat dengan penyerapan kerja terbatas, sementara biaya hidup dapat menggerus pendapatan nominal. Contoh ini penting karena menunjukkan bahwa kebijakan yang tampak berhasil pada tingkat makro dapat memiliki hasil berbeda pada tingkat rumah tangga. Satu wilayah dapat mencatat investasi tinggi tetapi kesempatan kerja lokal terbatas; daerah lain dapat menyerap banyak tenaga kerja tetapi berada pada pekerjaan berproduktivitas

rendah. Dengan demikian, analisis perlu bergerak dari pertanyaan 'berapa besar pertumbuhan?' menuju 'bagaimana struktur pertumbuhan itu?', 'siapa yang berpartisipasi?', dan 'apakah pendapatan serta layanan yang diterima masyarakat meningkat secara riil?'. Pendekatan seperti ini juga menghindari jebakan melihat rata-rata nasional sebagai gambaran semua kelompok.

Arah kebijakan yang relevan adalah membangun mekanisme transmisi pertumbuhan agar kenaikan output berubah menjadi upah, layanan, dan aset rumah tangga. Kebijakan tersebut sebaiknya tidak diperlakukan sebagai proyek tunggal, melainkan sebagai paket yang menghubungkan sisi permintaan dan sisi penawaran. Insentif investasi, misalnya, perlu disertai pengembangan pemasok, pelatihan pekerja, infrastruktur, pembiayaan dan standar kerja. Program pendidikan perlu tersambung dengan kebutuhan industri dan perubahan teknologi. Bantuan sosial perlu terhubung dengan layanan kesehatan, pendidikan, penempatan kerja atau dukungan usaha ketika kondisi penerima memungkinkan. Integrasi semacam ini meningkatkan peluang bahwa setiap rupiah belanja publik atau investasi swasta menghasilkan multiplier ekonomi dan sosial yang lebih besar.

Dimensi distribusi juga menentukan keberhasilan. Kebijakan yang menaikkan efisiensi rata-rata dapat menghasilkan pemenang dan pihak yang tertinggal. Oleh karena itu, prinsip inklusi tidak berarti menahan perubahan, tetapi memperluas kemampuan masyarakat untuk ikut memperoleh manfaat dari perubahan. Reskilling bagi pekerja terdampak, pembiayaan transisi bagi UMKM, perlindungan pendapatan sementara, serta layanan dasar yang berkualitas merupakan contoh instrumen yang membuat transformasi lebih adil. Dalam jangka panjang, pemerataan kesempatan yang baik justru memperbesar basis talenta, kewirausahaan dan permintaan domestik yang menopang pertumbuhan.

Untuk memastikan akuntabilitas, keberhasilan bagian ini sebaiknya dipantau melalui indikator seperti upah riil, biaya hidup, pangsa tenaga kerja, distribusi pendapatan. Indikator output—misalnya jumlah program, pelatihan, proyek, atau penerima—tetap dibutuhkan untuk pengelolaan operasional, tetapi tidak boleh menggantikan outcome. Pertanyaan akhirnya adalah apakah masyarakat memiliki pendapatan riil lebih tinggi, pekerjaan lebih produktif, risiko ekonomi lebih rendah, akses layanan lebih baik, dan kesempatan mobilitas yang lebih besar. Ketika ukuran tersebut bergerak searah dengan pertumbuhan PDB, dapat dikatakan bahwa proses pemulihan mulai bertransformasi menjadi peningkatan taraf hidup yang substantif dan inklusif.

3. Kerangka Growth-to-Living-Standards Transmission

Rantai transmisi dari investasi, produksi, produktivitas dan pajak menuju pendapatan, layanan publik, serta kesejahteraan merupakan inti persoalan yang dibahas pada bagian ini. Dalam kerangka pemulihan ekonomi Indonesia, pertanyaan penting bukan hanya seberapa cepat kegiatan ekonomi kembali berkembang, melainkan siapa yang memperoleh manfaat, melalui mekanisme apa, dan seberapa tahan manfaat tersebut terhadap guncangan berikutnya. Pertumbuhan agregat memang diperlukan karena tanpa perluasan basis produksi, ruang bagi penciptaan pendapatan dan penerimaan publik menjadi terbatas. Namun, kenaikan output baru menjadi pembangunan apabila menghasilkan kemampuan nyata bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan, meningkatkan keterampilan, menjaga kesehatan, membangun aset, dan merencanakan masa depan. Perspektif ini menempatkan taraf hidup

sebagai hasil dari interaksi antara pasar kerja, struktur produksi, harga, layanan publik, aset rumah tangga, serta institusi.

Secara ekonomi, mekanismenya bekerja melalui beberapa jalur. Pertama, produksi yang meningkat menciptakan permintaan terhadap tenaga kerja, pemasok, jasa dan infrastruktur. Kedua, produktivitas yang lebih tinggi memperbesar ruang bagi kenaikan upah dan laba usaha. Ketiga, basis ekonomi yang melebar meningkatkan penerimaan fiskal yang dapat membiayai pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial dan infrastruktur. Keempat, proses tersebut membentuk ekspektasi dan investasi rumah tangga: ketika pendapatan lebih stabil, keluarga lebih berani menyekolahkan anak lebih lama, memperbaiki tempat tinggal, membeli alat produktif, atau memulai usaha. Akan tetapi, setiap jalur dapat terputus oleh konsentrasi pasar, mismatch keterampilan, inflasi, informalitas, lemahnya layanan publik, atau ketimpangan akses terhadap modal dan teknologi.

Dalam konteks Indonesia, investasi baru baru meningkatkan kesejahteraan secara luas bila tersambung dengan pemasok lokal, pekerja lokal, pajak, dan layanan publik. Contoh ini penting karena menunjukkan bahwa kebijakan yang tampak berhasil pada tingkat makro dapat memiliki hasil berbeda pada tingkat rumah tangga. Satu wilayah dapat mencatat investasi tinggi tetapi kesempatan kerja lokal terbatas; daerah lain dapat menyerap banyak tenaga kerja tetapi berada pada pekerjaan berproduktivitas rendah. Dengan demikian, analisis perlu bergerak dari pertanyaan 'berapa besar pertumbuhan?' menuju 'bagaimana struktur pertumbuhan itu?', 'siapa yang berpartisipasi?', dan 'apakah pendapatan serta layanan yang diterima masyarakat meningkat secara riil?'. Pendekatan seperti ini juga menghindari jebakan melihat rata-rata nasional sebagai gambaran semua kelompok.

Arah kebijakan yang relevan adalah mengintegrasikan kebijakan makro, industri, tenaga kerja dan sosial dalam satu kerangka hasil. Kebijakan tersebut sebaiknya tidak diperlakukan sebagai proyek tunggal, melainkan sebagai paket yang menghubungkan sisi permintaan dan sisi penawaran. Insentif investasi, misalnya, perlu disertai pengembangan pemasok, pelatihan pekerja, infrastruktur, pembiayaan dan standar kerja. Program pendidikan perlu tersambung dengan kebutuhan industri dan perubahan teknologi. Bantuan sosial perlu terhubung dengan layanan kesehatan, pendidikan, penempatan kerja atau dukungan usaha ketika kondisi penerima memungkinkan. Integrasi semacam ini meningkatkan peluang bahwa setiap rupiah belanja publik atau investasi swasta menghasilkan multiplier ekonomi dan sosial yang lebih besar.

Dimensi distribusi juga menentukan keberhasilan. Kebijakan yang menaikkan efisiensi rata-rata dapat menghasilkan pemenang dan pihak yang tertinggal. Oleh karena itu, prinsip inklusi tidak berarti menahan perubahan, tetapi memperluas kemampuan masyarakat untuk ikut memperoleh manfaat dari perubahan. Reskilling bagi pekerja terdampak, pembiayaan transisi bagi UMKM, perlindungan pendapatan sementara, serta layanan dasar yang berkualitas merupakan contoh instrumen yang membuat transformasi lebih adil. Dalam jangka panjang, pemerataan kesempatan yang baik justru memperbesar basis talenta, kewirausahaan dan permintaan domestik yang menopang pertumbuhan.

Untuk memastikan akuntabilitas, keberhasilan bagian ini sebaiknya dipantau melalui indikator seperti produktivitas, employment multiplier, local content, penerimaan pajak, akses layanan. Indikator output—misalnya jumlah program, pelatihan, proyek, atau penerima—tetap dibutuhkan untuk pengelolaan operasional, tetapi tidak boleh menggantikan outcome. Pertanyaan akhirnya adalah apakah masyarakat memiliki pendapatan riil lebih tinggi, pekerjaan lebih produktif, risiko ekonomi lebih

rendah, akses layanan lebih baik, dan kesempatan mobilitas yang lebih besar. Ketika ukuran tersebut bergerak searah dengan pertumbuhan PDB, dapat dikatakan bahwa proses pemulihan mulai bertransformasi menjadi peningkatan taraf hidup yang substantif dan inklusif.

4. Konsumsi Rumah Tangga sebagai Penopang dan Cermin Kesejahteraan

Peran konsumsi domestik sebagai sumber permintaan sekaligus indikator kemampuan ekonomi rumah tangga merupakan inti persoalan yang dibahas pada bagian ini. Dalam kerangka pemulihan ekonomi Indonesia, pertanyaan penting bukan hanya seberapa cepat kegiatan ekonomi kembali berkembang, melainkan siapa yang memperoleh manfaat, melalui mekanisme apa, dan seberapa tahan manfaat tersebut terhadap guncangan berikutnya. Pertumbuhan agregat memang diperlukan karena tanpa perluasan basis produksi, ruang bagi penciptaan pendapatan dan penerimaan publik menjadi terbatas. Namun, kenaikan output baru menjadi pembangunan apabila menghasilkan kemampuan nyata bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan, meningkatkan keterampilan, menjaga kesehatan, membangun aset, dan merencanakan masa depan. Perspektif ini menempatkan taraf hidup sebagai hasil dari interaksi antara pasar kerja, struktur produksi, harga, layanan publik, aset rumah tangga, serta institusi.

Secara ekonomi, mekanismenya bekerja melalui beberapa jalur. Pertama, produksi yang meningkat menciptakan permintaan terhadap tenaga kerja, pemasok, jasa dan infrastruktur. Kedua, produktivitas yang lebih tinggi memperbesar ruang bagi kenaikan upah dan laba usaha. Ketiga, basis ekonomi yang melebar meningkatkan penerimaan fiskal yang dapat membiayai pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial dan infrastruktur. Keempat, proses tersebut membentuk ekspektasi dan investasi rumah tangga: ketika pendapatan lebih stabil, keluarga lebih berani menyekolahkan anak lebih lama, memperbaiki tempat tinggal, membeli alat produktif, atau memulai usaha. Akan tetapi, setiap jalur dapat terputus oleh konsentrasi pasar, mismatch keterampilan, inflasi, informalitas, lemahnya layanan publik, atau ketimpangan akses terhadap modal dan teknologi.

Dalam konteks Indonesia, konsumsi rumah tangga menjadi sumber pertumbuhan penting pada triwulan I-2026, menunjukkan pentingnya ekonomi domestik. Contoh ini penting karena menunjukkan bahwa kebijakan yang tampak berhasil pada tingkat makro dapat memiliki hasil berbeda pada tingkat rumah tangga. Satu wilayah dapat mencatat investasi tinggi tetapi kesempatan kerja lokal terbatas; daerah lain dapat menyerap banyak tenaga kerja tetapi berada pada pekerjaan berproduktivitas rendah. Dengan demikian, analisis perlu bergerak dari pertanyaan 'berapa besar pertumbuhan?' menuju 'bagaimana struktur pertumbuhan itu?', 'siapa yang berpartisipasi?', dan 'apakah pendapatan serta layanan yang diterima masyarakat meningkat secara riil?'. Pendekatan seperti ini juga menghindari jebakan melihat rata-rata nasional sebagai gambaran semua kelompok.

Arah kebijakan yang relevan adalah menjaga daya beli melalui pendapatan kerja, stabilitas harga dan biaya layanan dasar yang terjangkau. Kebijakan tersebut sebaiknya tidak diperlakukan sebagai proyek tunggal, melainkan sebagai paket yang menghubungkan sisi permintaan dan sisi penawaran. Insentif investasi, misalnya, perlu disertai pengembangan pemasok, pelatihan pekerja, infrastruktur, pembiayaan dan standar kerja. Program pendidikan perlu tersambung dengan kebutuhan industri dan perubahan teknologi. Bantuan sosial perlu terhubung dengan layanan kesehatan, pendidikan,

penempatan kerja atau dukungan usaha ketika kondisi penerima memungkinkan. Integrasi semacam ini meningkatkan peluang bahwa setiap rupiah belanja publik atau investasi swasta menghasilkan multiplier ekonomi dan sosial yang lebih besar.

Dimensi distribusi juga menentukan keberhasilan. Kebijakan yang menaikkan efisiensi rata-rata dapat menghasilkan pemenang dan pihak yang tertinggal. Oleh karena itu, prinsip inklusi tidak berarti menahan perubahan, tetapi memperluas kemampuan masyarakat untuk ikut memperoleh manfaat dari perubahan. Reskilling bagi pekerja terdampak, pembiayaan transisi bagi UMKM, perlindungan pendapatan sementara, serta layanan dasar yang berkualitas merupakan contoh instrumen yang membuat transformasi lebih adil. Dalam jangka panjang, pemerataan kesempatan yang baik justru memperbesar basis talenta, kewirausahaan dan permintaan domestik yang menopang pertumbuhan.

Untuk memastikan akuntabilitas, keberhasilan bagian ini sebaiknya dipantau melalui indikator seperti konsumsi riil, inflasi kelompok miskin, indeks keyakinan konsumen, tabungan rumah tangga. Indikator output—misalnya jumlah program, pelatihan, proyek, atau penerima—tetap dibutuhkan untuk pengelolaan operasional, tetapi tidak boleh menggantikan outcome. Pertanyaan akhirnya adalah apakah masyarakat memiliki pendapatan riil lebih tinggi, pekerjaan lebih produktif, risiko ekonomi lebih rendah, akses layanan lebih baik, dan kesempatan mobilitas yang lebih besar. Ketika ukuran tersebut bergerak searah dengan pertumbuhan PDB, dapat dikatakan bahwa proses pemulihan mulai bertransformasi menjadi peningkatan taraf hidup yang substantif dan inklusif.

5. Produktivitas sebagai Jembatan Pertumbuhan dan Pendapatan

Kenaikan nilai tambah per pekerja sebagai basis berkelanjutan bagi upah dan keuntungan usaha merupakan inti persoalan yang dibahas pada bagian ini. Dalam kerangka pemulihan ekonomi Indonesia, pertanyaan penting bukan hanya seberapa cepat kegiatan ekonomi kembali berkembang, melainkan siapa yang memperoleh manfaat, melalui mekanisme apa, dan seberapa tahan manfaat tersebut terhadap guncangan berikutnya. Pertumbuhan agregat memang diperlukan karena tanpa perluasan basis produksi, ruang bagi penciptaan pendapatan dan penerimaan publik menjadi terbatas. Namun, kenaikan output baru menjadi pembangunan apabila menghasilkan kemampuan nyata bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan, meningkatkan keterampilan, menjaga kesehatan, membangun aset, dan merencanakan masa depan. Perspektif ini menempatkan taraf hidup sebagai hasil dari interaksi antara pasar kerja, struktur produksi, harga, layanan publik, aset rumah tangga, serta institusi.

Secara ekonomi, mekanismenya bekerja melalui beberapa jalur. Pertama, produksi yang meningkat menciptakan permintaan terhadap tenaga kerja, pemasok, jasa dan infrastruktur. Kedua, produktivitas yang lebih tinggi memperbesar ruang bagi kenaikan upah dan laba usaha. Ketiga, basis ekonomi yang melebar meningkatkan penerimaan fiskal yang dapat membiayai pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial dan infrastruktur. Keempat, proses tersebut membentuk ekspektasi dan investasi rumah tangga: ketika pendapatan lebih stabil, keluarga lebih berani menyekolahkan anak lebih lama, memperbaiki tempat tinggal, membeli alat produktif, atau memulai usaha. Akan tetapi, setiap jalur dapat terputus oleh konsentrasi pasar, mismatch keterampilan, inflasi, informalitas, lemahnya layanan publik, atau ketimpangan akses terhadap modal dan teknologi.

Dalam konteks Indonesia, perusahaan yang naik kelas melalui digitalisasi dan standardisasi dapat membayar lebih baik bila pasar dan institusi tenaga kerja mendukung. Contoh ini penting karena menunjukkan bahwa kebijakan yang tampak berhasil pada tingkat makro dapat memiliki hasil berbeda pada tingkat rumah tangga. Satu wilayah dapat mencatat investasi tinggi tetapi kesempatan kerja lokal terbatas; daerah lain dapat menyerap banyak tenaga kerja tetapi berada pada pekerjaan berproduktivitas rendah. Dengan demikian, analisis perlu bergerak dari pertanyaan 'berapa besar pertumbuhan?' menuju 'bagaimana struktur pertumbuhan itu?', 'siapa yang berpartisipasi?', dan 'apakah pendapatan serta layanan yang diterima masyarakat meningkat secara riil?'. Pendekatan seperti ini juga menghindari jebakan melihat rata-rata nasional sebagai gambaran semua kelompok.

Arah kebijakan yang relevan adalah mendorong adopsi teknologi, manajemen, logistik dan keterampilan yang menaikkan output tanpa menekan kualitas kerja. Kebijakan tersebut sebaiknya tidak diperlakukan sebagai proyek tunggal, melainkan sebagai paket yang menghubungkan sisi permintaan dan sisi penawaran. Insentif investasi, misalnya, perlu disertai pengembangan pemasok, pelatihan pekerja, infrastruktur, pembiayaan dan standar kerja. Program pendidikan perlu tersambung dengan kebutuhan industri dan perubahan teknologi. Bantuan sosial perlu terhubung dengan layanan kesehatan, pendidikan, penempatan kerja atau dukungan usaha ketika kondisi penerima memungkinkan. Integrasi semacam ini meningkatkan peluang bahwa setiap rupiah belanja publik atau investasi swasta menghasilkan multiplier ekonomi dan sosial yang lebih besar.

Dimensi distribusi juga menentukan keberhasilan. Kebijakan yang menaikkan efisiensi rata-rata dapat menghasilkan pemenang dan pihak yang tertinggal. Oleh karena itu, prinsip inklusi tidak berarti menahan perubahan, tetapi memperluas kemampuan masyarakat untuk ikut memperoleh manfaat dari perubahan. Reskilling bagi pekerja terdampak, pembiayaan transisi bagi UMKM, perlindungan pendapatan sementara, serta layanan dasar yang berkualitas merupakan contoh instrumen yang membuat transformasi lebih adil. Dalam jangka panjang, pemerataan kesempatan yang baik justru memperbesar basis talenta, kewirausahaan dan permintaan domestik yang menopang pertumbuhan.

Untuk memastikan akuntabilitas, keberhasilan bagian ini sebaiknya dipantau melalui indikator seperti produktivitas tenaga kerja, TFP, upah riil, value added per worker. Indikator output—misalnya jumlah program, pelatihan, proyek, atau penerima—tetap dibutuhkan untuk pengelolaan operasional, tetapi tidak boleh menggantikan outcome. Pertanyaan akhirnya adalah apakah masyarakat memiliki pendapatan riil lebih tinggi, pekerjaan lebih produktif, risiko ekonomi lebih rendah, akses layanan lebih baik, dan kesempatan mobilitas yang lebih besar. Ketika ukuran tersebut bergerak searah dengan pertumbuhan PDB, dapat dikatakan bahwa proses pemulihan mulai bertransformasi menjadi peningkatan taraf hidup yang substantif dan inklusif.

6. Pekerjaan Berkualitas sebagai Instrumen Distribusi Utama

Kualitas kerja menentukan apakah pertumbuhan sampai ke rumah tangga secara berkelanjutan merupakan inti persoalan yang dibahas pada bagian ini. Dalam kerangka pemulihan ekonomi Indonesia, pertanyaan penting bukan hanya seberapa cepat kegiatan ekonomi kembali berkembang, melainkan siapa yang memperoleh manfaat, melalui mekanisme apa, dan seberapa tahan manfaat tersebut terhadap guncangan berikutnya. Pertumbuhan agregat memang diperlukan karena tanpa

perluasan basis produksi, ruang bagi penciptaan pendapatan dan penerimaan publik menjadi terbatas. Namun, kenaikan output baru menjadi pembangunan apabila menghasilkan kemampuan nyata bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan, meningkatkan keterampilan, menjaga kesehatan, membangun aset, dan merencanakan masa depan. Perspektif ini menempatkan taraf hidup sebagai hasil dari interaksi antara pasar kerja, struktur produksi, harga, layanan publik, aset rumah tangga, serta institusi.

Secara ekonomi, mekanismenya bekerja melalui beberapa jalur. Pertama, produksi yang meningkat menciptakan permintaan terhadap tenaga kerja, pemasok, jasa dan infrastruktur. Kedua, produktivitas yang lebih tinggi memperbesar ruang bagi kenaikan upah dan laba usaha. Ketiga, basis ekonomi yang melebar meningkatkan penerimaan fiskal yang dapat membiayai pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial dan infrastruktur. Keempat, proses tersebut membentuk ekspektasi dan investasi rumah tangga: ketika pendapatan lebih stabil, keluarga lebih berani menyekolahkan anak lebih lama, memperbaiki tempat tinggal, membeli alat produktif, atau memulai usaha. Akan tetapi, setiap jalur dapat terputus oleh konsentrasi pasar, mismatch keterampilan, inflasi, informalitas, lemahnya layanan publik, atau ketimpangan akses terhadap modal dan teknologi.

Dalam konteks Indonesia, penurunan TPT perlu dibaca bersama informality, jam kerja, pendapatan, keamanan kerja, dan jaminan sosial. Contoh ini penting karena menunjukkan bahwa kebijakan yang tampak berhasil pada tingkat makro dapat memiliki hasil berbeda pada tingkat rumah tangga. Satu wilayah dapat mencatat investasi tinggi tetapi kesempatan kerja lokal terbatas; daerah lain dapat menyerap banyak tenaga kerja tetapi berada pada pekerjaan berproduktivitas rendah. Dengan demikian, analisis perlu bergerak dari pertanyaan 'berapa besar pertumbuhan?' menuju 'bagaimana struktur pertumbuhan itu?', 'siapa yang berpartisipasi?', dan 'apakah pendapatan serta layanan yang diterima masyarakat meningkat secara riil?'. Pendekatan seperti ini juga menghindari jebakan melihat rata-rata nasional sebagai gambaran semua kelompok.

Arah kebijakan yang relevan adalah mengutamakan pekerjaan produktif, aman, formal atau terlindungi, dengan jalur peningkatan keterampilan. Kebijakan tersebut sebaiknya tidak diperlakukan sebagai proyek tunggal, melainkan sebagai paket yang menghubungkan sisi permintaan dan sisi penawaran. Insentif investasi, misalnya, perlu disertai pengembangan pemasok, pelatihan pekerja, infrastruktur, pembiayaan dan standar kerja. Program pendidikan perlu tersambung dengan kebutuhan industri dan perubahan teknologi. Bantuan sosial perlu terhubung dengan layanan kesehatan, pendidikan, penempatan kerja atau dukungan usaha ketika kondisi penerima memungkinkan. Integrasi semacam ini meningkatkan peluang bahwa setiap rupiah belanja publik atau investasi swasta menghasilkan multiplier ekonomi dan sosial yang lebih besar.

Dimensi distribusi juga menentukan keberhasilan. Kebijakan yang menaikkan efisiensi rata-rata dapat menghasilkan pemenang dan pihak yang tertinggal. Oleh karena itu, prinsip inklusi tidak berarti menahan perubahan, tetapi memperluas kemampuan masyarakat untuk ikut memperoleh manfaat dari perubahan. Reskilling bagi pekerja terdampak, pembiayaan transisi bagi UMKM, perlindungan pendapatan sementara, serta layanan dasar yang berkualitas merupakan contoh instrumen yang membuat transformasi lebih adil. Dalam jangka panjang, pemerataan kesempatan yang baik justru memperbesar basis talenta, kewirausahaan dan permintaan domestik yang menopang pertumbuhan.

Untuk memastikan akuntabilitas, keberhasilan bagian ini sebaiknya dipantau melalui indikator seperti TPT, setengah pengangguran, formalitas, upah median, cakupan jaminan sosial. Indikator output—misalnya jumlah program, pelatihan, proyek, atau penerima—tetap dibutuhkan untuk pengelolaan operasional, tetapi tidak boleh menggantikan outcome. Pertanyaan akhirnya adalah apakah masyarakat memiliki pendapatan riil lebih tinggi, pekerjaan lebih produktif, risiko ekonomi lebih rendah, akses layanan lebih baik, dan kesempatan mobilitas yang lebih besar. Ketika ukuran tersebut bergerak searah dengan pertumbuhan PDB, dapat dikatakan bahwa proses pemulihan mulai bertransformasi menjadi peningkatan taraf hidup yang substantif dan inklusif.

7. Upah Riil, Daya Beli dan Martabat Kerja

Hubungan antara pendapatan kerja dengan kebutuhan dasar, tabungan, pendidikan anak, dan mobilitas sosial merupakan inti persoalan yang dibahas pada bagian ini. Dalam kerangka pemulihan ekonomi Indonesia, pertanyaan penting bukan hanya seberapa cepat kegiatan ekonomi kembali berkembang, melainkan siapa yang memperoleh manfaat, melalui mekanisme apa, dan seberapa tahan manfaat tersebut terhadap guncangan berikutnya. Pertumbuhan agregat memang diperlukan karena tanpa perluasan basis produksi, ruang bagi penciptaan pendapatan dan penerimaan publik menjadi terbatas. Namun, kenaikan output baru menjadi pembangunan apabila menghasilkan kemampuan nyata bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan, meningkatkan keterampilan, menjaga kesehatan, membangun aset, dan merencanakan masa depan. Perspektif ini menempatkan taraf hidup sebagai hasil dari interaksi antara pasar kerja, struktur produksi, harga, layanan publik, aset rumah tangga, serta institusi.

Secara ekonomi, mekanismenya bekerja melalui beberapa jalur. Pertama, produksi yang meningkat menciptakan permintaan terhadap tenaga kerja, pemasok, jasa dan infrastruktur. Kedua, produktivitas yang lebih tinggi memperbesar ruang bagi kenaikan upah dan laba usaha. Ketiga, basis ekonomi yang melebar meningkatkan penerimaan fiskal yang dapat membiayai pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial dan infrastruktur. Keempat, proses tersebut membentuk ekspektasi dan investasi rumah tangga: ketika pendapatan lebih stabil, keluarga lebih berani menyekolahkan anak lebih lama, memperbaiki tempat tinggal, membeli alat produktif, atau memulai usaha. Akan tetapi, setiap jalur dapat terputus oleh konsentrasi pasar, mismatch keterampilan, inflasi, informalitas, lemahnya layanan publik, atau ketimpangan akses terhadap modal dan teknologi.

Dalam konteks Indonesia, kenaikan upah nominal tidak memperbaiki taraf hidup bila perumahan, transportasi, pangan dan pendidikan naik lebih cepat. Contoh ini penting karena menunjukkan bahwa kebijakan yang tampak berhasil pada tingkat makro dapat memiliki hasil berbeda pada tingkat rumah tangga. Satu wilayah dapat mencatat investasi tinggi tetapi kesempatan kerja lokal terbatas; daerah lain dapat menyerap banyak tenaga kerja tetapi berada pada pekerjaan berproduktivitas rendah. Dengan demikian, analisis perlu bergerak dari pertanyaan 'berapa besar pertumbuhan?' menuju 'bagaimana struktur pertumbuhan itu?', 'siapa yang berpartisipasi?', dan 'apakah pendapatan serta layanan yang diterima masyarakat meningkat secara riil?'. Pendekatan seperti ini juga menghindari jebakan melihat rata-rata nasional sebagai gambaran semua kelompok.

Arah kebijakan yang relevan adalah mendorong produktivitas, negosiasi upah yang sehat, kepatuhan ketenagakerjaan dan pengendalian biaya hidup. Kebijakan tersebut sebaiknya tidak diperlakukan sebagai proyek tunggal, melainkan sebagai paket yang menghubungkan sisi permintaan dan sisi penawaran. Insentif investasi, misalnya, perlu disertai pengembangan pemasok, pelatihan pekerja, infrastruktur, pembiayaan dan standar kerja. Program pendidikan perlu tersambung dengan kebutuhan industri dan perubahan teknologi. Bantuan sosial perlu terhubung dengan layanan kesehatan, pendidikan, penempatan kerja atau dukungan usaha ketika kondisi penerima memungkinkan. Integrasi semacam ini meningkatkan peluang bahwa setiap rupiah belanja publik atau investasi swasta menghasilkan multiplier ekonomi dan sosial yang lebih besar.

Dimensi distribusi juga menentukan keberhasilan. Kebijakan yang menaikkan efisiensi rata-rata dapat menghasilkan pemenang dan pihak yang tertinggal. Oleh karena itu, prinsip inklusi tidak berarti menahan perubahan, tetapi memperluas kemampuan masyarakat untuk ikut memperoleh manfaat dari perubahan. Reskilling bagi pekerja terdampak, pembiayaan transisi bagi UMKM, perlindungan pendapatan sementara, serta layanan dasar yang berkualitas merupakan contoh instrumen yang membuat transformasi lebih adil. Dalam jangka panjang, pemerataan kesempatan yang baik justru memperbesar basis talenta, kewirausahaan dan permintaan domestik yang menopang pertumbuhan.

Untuk memastikan akuntabilitas, keberhasilan bagian ini sebaiknya dipantau melalui indikator seperti upah riil, rasio upah-biaya hidup, saving rate, housing cost burden. Indikator output—misalnya jumlah program, pelatihan, proyek, atau penerima—tetap dibutuhkan untuk pengelolaan operasional, tetapi tidak boleh menggantikan outcome. Pertanyaan akhirnya adalah apakah masyarakat memiliki pendapatan riil lebih tinggi, pekerjaan lebih produktif, risiko ekonomi lebih rendah, akses layanan lebih baik, dan kesempatan mobilitas yang lebih besar. Ketika ukuran tersebut bergerak searah dengan pertumbuhan PDB, dapat dikatakan bahwa proses pemulihan mulai bertransformasi menjadi peningkatan taraf hidup yang substantif dan inklusif.

8. Transformasi Struktural dan Mobilitas Tenaga Kerja

Perpindahan tenaga kerja menuju kegiatan bernilai tambah lebih tinggi tanpa menimbulkan eksklusi merupakan inti persoalan yang dibahas pada bagian ini. Dalam kerangka pemulihan ekonomi Indonesia, pertanyaan penting bukan hanya seberapa cepat kegiatan ekonomi kembali berkembang, melainkan siapa yang memperoleh manfaat, melalui mekanisme apa, dan seberapa tahan manfaat tersebut terhadap guncangan berikutnya. Pertumbuhan agregat memang diperlukan karena tanpa perluasan basis produksi, ruang bagi penciptaan pendapatan dan penerimaan publik menjadi terbatas. Namun, kenaikan output baru menjadi pembangunan apabila menghasilkan kemampuan nyata bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan, meningkatkan keterampilan, menjaga kesehatan, membangun aset, dan merencanakan masa depan. Perspektif ini menempatkan taraf hidup sebagai hasil dari interaksi antara pasar kerja, struktur produksi, harga, layanan publik, aset rumah tangga, serta institusi.

Secara ekonomi, mekanismenya bekerja melalui beberapa jalur. Pertama, produksi yang meningkat menciptakan permintaan terhadap tenaga kerja, pemasok, jasa dan infrastruktur. Kedua, produktivitas yang lebih tinggi memperbesar ruang bagi kenaikan upah dan laba usaha. Ketiga, basis ekonomi yang

melebar meningkatkan penerimaan fiskal yang dapat membiayai pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial dan infrastruktur. Keempat, proses tersebut membentuk ekspektasi dan investasi rumah tangga: ketika pendapatan lebih stabil, keluarga lebih berani menyekolahkan anak lebih lama, memperbaiki tempat tinggal, membeli alat produktif, atau memulai usaha. Akan tetapi, setiap jalur dapat terputus oleh konsentrasi pasar, mismatch keterampilan, inflasi, informalitas, lemahnya layanan publik, atau ketimpangan akses terhadap modal dan teknologi.

Dalam konteks Indonesia, pertanian masih menyerap 28,78% pekerja pada Februari 2026 sehingga transformasi harus meningkatkan produktivitas desa, bukan hanya memindahkan tenaga kerja. Contoh ini penting karena menunjukkan bahwa kebijakan yang tampak berhasil pada tingkat makro dapat memiliki hasil berbeda pada tingkat rumah tangga. Satu wilayah dapat mencatat investasi tinggi tetapi kesempatan kerja lokal terbatas; daerah lain dapat menyerap banyak tenaga kerja tetapi berada pada pekerjaan berproduktivitas rendah. Dengan demikian, analisis perlu bergerak dari pertanyaan 'berapa besar pertumbuhan?' menuju 'bagaimana struktur pertumbuhan itu?', 'siapa yang berpartisipasi?', dan 'apakah pendapatan serta layanan yang diterima masyarakat meningkat secara riil?'. Pendekatan seperti ini juga menghindari jebakan melihat rata-rata nasional sebagai gambaran semua kelompok.

Arah kebijakan yang relevan adalah mempercepat sektor manufaktur modern, jasa produktif, agroindustri dan ekonomi digital sambil menaikkan produktivitas pertanian. Kebijakan tersebut sebaiknya tidak diperlakukan sebagai proyek tunggal, melainkan sebagai paket yang menghubungkan sisi permintaan dan sisi penawaran. Insentif investasi, misalnya, perlu disertai pengembangan pemasok, pelatihan pekerja, infrastruktur, pembiayaan dan standar kerja. Program pendidikan perlu tersambung dengan kebutuhan industri dan perubahan teknologi. Bantuan sosial perlu terhubung dengan layanan kesehatan, pendidikan, penempatan kerja atau dukungan usaha ketika kondisi penerima memungkinkan. Integrasi semacam ini meningkatkan peluang bahwa setiap rupiah belanja publik atau investasi swasta menghasilkan multiplier ekonomi dan sosial yang lebih besar.

Dimensi distribusi juga menentukan keberhasilan. Kebijakan yang menaikkan efisiensi rata-rata dapat menghasilkan pemenang dan pihak yang tertinggal. Oleh karena itu, prinsip inklusi tidak berarti menahan perubahan, tetapi memperluas kemampuan masyarakat untuk ikut memperoleh manfaat dari perubahan. Reskilling bagi pekerja terdampak, pembiayaan transisi bagi UMKM, perlindungan pendapatan sementara, serta layanan dasar yang berkualitas merupakan contoh instrumen yang membuat transformasi lebih adil. Dalam jangka panjang, pemerataan kesempatan yang baik justru memperbesar basis talenta, kewirausahaan dan permintaan domestik yang menopang pertumbuhan.

Untuk memastikan akuntabilitas, keberhasilan bagian ini sebaiknya dipantau melalui indikator seperti pangsa pekerjaan sektoral, produktivitas sektoral, wage premium, migrasi. Indikator output—misalnya jumlah program, pelatihan, proyek, atau penerima—tetap dibutuhkan untuk pengelolaan operasional, tetapi tidak boleh menggantikan outcome. Pertanyaan akhirnya adalah apakah masyarakat memiliki pendapatan riil lebih tinggi, pekerjaan lebih produktif, risiko ekonomi lebih rendah, akses layanan lebih baik, dan kesempatan mobilitas yang lebih besar. Ketika ukuran tersebut bergerak searah dengan pertumbuhan PDB, dapat dikatakan bahwa proses pemulihan mulai bertransformasi menjadi peningkatan taraf hidup yang substantif dan inklusif.

9. Reindustrialisasi dan Hilirisasi yang Berorientasi Kesejahteraan

Nilai tambah domestik dari pengolahan sumber daya dan manufaktur sebagai sumber pekerjaan serta teknologi merupakan inti persoalan yang dibahas pada bagian ini. Dalam kerangka pemulihan ekonomi Indonesia, pertanyaan penting bukan hanya seberapa cepat kegiatan ekonomi kembali berkembang, melainkan siapa yang memperoleh manfaat, melalui mekanisme apa, dan seberapa tahan manfaat tersebut terhadap guncangan berikutnya. Pertumbuhan agregat memang diperlukan karena tanpa perluasan basis produksi, ruang bagi penciptaan pendapatan dan penerimaan publik menjadi terbatas. Namun, kenaikan output baru menjadi pembangunan apabila menghasilkan kemampuan nyata bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan, meningkatkan keterampilan, menjaga kesehatan, membangun aset, dan merencanakan masa depan. Perspektif ini menempatkan taraf hidup sebagai hasil dari interaksi antara pasar kerja, struktur produksi, harga, layanan publik, aset rumah tangga, serta institusi.

Secara ekonomi, mekanismenya bekerja melalui beberapa jalur. Pertama, produksi yang meningkat menciptakan permintaan terhadap tenaga kerja, pemasok, jasa dan infrastruktur. Kedua, produktivitas yang lebih tinggi memperbesar ruang bagi kenaikan upah dan laba usaha. Ketiga, basis ekonomi yang melebar meningkatkan penerimaan fiskal yang dapat membiayai pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial dan infrastruktur. Keempat, proses tersebut membentuk ekspektasi dan investasi rumah tangga: ketika pendapatan lebih stabil, keluarga lebih berani menyekolahkan anak lebih lama, memperbaiki tempat tinggal, membeli alat produktif, atau memulai usaha. Akan tetapi, setiap jalur dapat terputus oleh konsentrasi pasar, mismatch keterampilan, inflasi, informalitas, lemahnya layanan publik, atau ketimpangan akses terhadap modal dan teknologi.

Dalam konteks Indonesia, hilirisasi mineral atau agrokomoditas memberi dampak lebih besar bila terhubung dengan industri turunan dan SDM lokal. Contoh ini penting karena menunjukkan bahwa kebijakan yang tampak berhasil pada tingkat makro dapat memiliki hasil berbeda pada tingkat rumah tangga. Satu wilayah dapat mencatat investasi tinggi tetapi kesempatan kerja lokal terbatas; daerah lain dapat menyerap banyak tenaga kerja tetapi berada pada pekerjaan berproduktivitas rendah. Dengan demikian, analisis perlu bergerak dari pertanyaan 'berapa besar pertumbuhan?' menuju 'bagaimana struktur pertumbuhan itu?', 'siapa yang berpartisipasi?', dan 'apakah pendapatan serta layanan yang diterima masyarakat meningkat secara riil?'. Pendekatan seperti ini juga menghindari jebakan melihat rata-rata nasional sebagai gambaran semua kelompok.

Arah kebijakan yang relevan adalah mengaitkan insentif investasi dengan pekerjaan lokal, pemasok domestik, transfer teknologi dan pengembangan wilayah. Kebijakan tersebut sebaiknya tidak diperlakukan sebagai proyek tunggal, melainkan sebagai paket yang menghubungkan sisi permintaan dan sisi penawaran. Insentif investasi, misalnya, perlu disertai pengembangan pemasok, pelatihan pekerja, infrastruktur, pembiayaan dan standar kerja. Program pendidikan perlu tersambung dengan kebutuhan industri dan perubahan teknologi. Bantuan sosial perlu terhubung dengan layanan kesehatan, pendidikan, penempatan kerja atau dukungan usaha ketika kondisi penerima memungkinkan. Integrasi semacam ini meningkatkan peluang bahwa setiap rupiah belanja publik atau investasi swasta menghasilkan multiplier ekonomi dan sosial yang lebih besar.

Dimensi distribusi juga menentukan keberhasilan. Kebijakan yang menaikkan efisiensi rata-rata dapat menghasilkan pemenang dan pihak yang tertinggal. Oleh karena itu, prinsip inklusi tidak berarti

menahan perubahan, tetapi memperluas kemampuan masyarakat untuk ikut memperoleh manfaat dari perubahan. Reskilling bagi pekerja terdampak, pembiayaan transisi bagi UMKM, perlindungan pendapatan sementara, serta layanan dasar yang berkualitas merupakan contoh instrumen yang membuat transformasi lebih adil. Dalam jangka panjang, pemerataan kesempatan yang baik justru memperbesar basis talenta, kewirausahaan dan permintaan domestik yang menopang pertumbuhan.

Untuk memastikan akuntabilitas, keberhasilan bagian ini sebaiknya dipantau melalui indikator seperti domestic value added, local supplier share, jobs per investment, export sophistication. Indikator output—misalnya jumlah program, pelatihan, proyek, atau penerima—tetap dibutuhkan untuk pengelolaan operasional, tetapi tidak boleh menggantikan outcome. Pertanyaan akhirnya adalah apakah masyarakat memiliki pendapatan riil lebih tinggi, pekerjaan lebih produktif, risiko ekonomi lebih rendah, akses layanan lebih baik, dan kesempatan mobilitas yang lebih besar. Ketika ukuran tersebut bergerak searah dengan pertumbuhan PDB, dapat dikatakan bahwa proses pemulihan mulai bertransformasi menjadi peningkatan taraf hidup yang substantif dan inklusif.

10. UMKM dan Ekonomi Rakyat sebagai Mesin Distribusi

Peran usaha mikro, kecil dan menengah dalam pendapatan keluarga, kesempatan kerja dan ekonomi lokal merupakan inti persoalan yang dibahas pada bagian ini. Dalam kerangka pemulihan ekonomi Indonesia, pertanyaan penting bukan hanya seberapa cepat kegiatan ekonomi kembali berkembang, melainkan siapa yang memperoleh manfaat, melalui mekanisme apa, dan seberapa tahan manfaat tersebut terhadap guncangan berikutnya. Pertumbuhan agregat memang diperlukan karena tanpa perluasan basis produksi, ruang bagi penciptaan pendapatan dan penerimaan publik menjadi terbatas. Namun, kenaikan output baru menjadi pembangunan apabila menghasilkan kemampuan nyata bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan, meningkatkan keterampilan, menjaga kesehatan, membangun aset, dan merencanakan masa depan. Perspektif ini menempatkan taraf hidup sebagai hasil dari interaksi antara pasar kerja, struktur produksi, harga, layanan publik, aset rumah tangga, serta institusi.

Secara ekonomi, mekanismenya bekerja melalui beberapa jalur. Pertama, produksi yang meningkat menciptakan permintaan terhadap tenaga kerja, pemasok, jasa dan infrastruktur. Kedua, produktivitas yang lebih tinggi memperbesar ruang bagi kenaikan upah dan laba usaha. Ketiga, basis ekonomi yang melebar meningkatkan penerimaan fiskal yang dapat membiayai pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial dan infrastruktur. Keempat, proses tersebut membentuk ekspektasi dan investasi rumah tangga: ketika pendapatan lebih stabil, keluarga lebih berani menyekolahkan anak lebih lama, memperbaiki tempat tinggal, membeli alat produktif, atau memulai usaha. Akan tetapi, setiap jalur dapat terputus oleh konsentrasi pasar, mismatch keterampilan, inflasi, informalitas, lemahnya layanan publik, atau ketimpangan akses terhadap modal dan teknologi.

Dalam konteks Indonesia, digitalisasi pembayaran tanpa perbaikan proses, kualitas produk dan pasar tidak cukup untuk menaikkan margin usaha. Contoh ini penting karena menunjukkan bahwa kebijakan yang tampak berhasil pada tingkat makro dapat memiliki hasil berbeda pada tingkat rumah tangga. Satu wilayah dapat mencatat investasi tinggi tetapi kesempatan kerja lokal terbatas; daerah lain dapat menyerap banyak tenaga kerja tetapi berada pada pekerjaan berproduktivitas rendah. Dengan

demikian, analisis perlu bergerak dari pertanyaan 'berapa besar pertumbuhan?' menuju 'bagaimana struktur pertumbuhan itu?', 'siapa yang berpartisipasi?', dan 'apakah pendapatan serta layanan yang diterima masyarakat meningkat secara riil?'. Pendekatan seperti ini juga menghindari jebakan melihat rata-rata nasional sebagai gambaran semua kelompok.

Arah kebijakan yang relevan adalah mendorong produktivitas UMKM melalui pembiayaan, teknologi, standardisasi, agregasi, akses pasar dan mentoring. Kebijakan tersebut sebaiknya tidak diperlakukan sebagai proyek tunggal, melainkan sebagai paket yang menghubungkan sisi permintaan dan sisi penawaran. Insentif investasi, misalnya, perlu disertai pengembangan pemasok, pelatihan pekerja, infrastruktur, pembiayaan dan standar kerja. Program pendidikan perlu tersambung dengan kebutuhan industri dan perubahan teknologi. Bantuan sosial perlu terhubung dengan layanan kesehatan, pendidikan, penempatan kerja atau dukungan usaha ketika kondisi penerima memungkinkan. Integrasi semacam ini meningkatkan peluang bahwa setiap rupiah belanja publik atau investasi swasta menghasilkan multiplier ekonomi dan sosial yang lebih besar.

Dimensi distribusi juga menentukan keberhasilan. Kebijakan yang menaikkan efisiensi rata-rata dapat menghasilkan pemenang dan pihak yang tertinggal. Oleh karena itu, prinsip inklusi tidak berarti menahan perubahan, tetapi memperluas kemampuan masyarakat untuk ikut memperoleh manfaat dari perubahan. Reskilling bagi pekerja terdampak, pembiayaan transisi bagi UMKM, perlindungan pendapatan sementara, serta layanan dasar yang berkualitas merupakan contoh instrumen yang membuat transformasi lebih adil. Dalam jangka panjang, pemerataan kesempatan yang baik justru memperbesar basis talenta, kewirausahaan dan permintaan domestik yang menopang pertumbuhan.

Untuk memastikan akuntabilitas, keberhasilan bagian ini sebaiknya dipantau melalui indikator seperti produktivitas UMKM, survival rate, omzet riil, formalization rate, akses kredit. Indikator output—misalnya jumlah program, pelatihan, proyek, atau penerima—tetap dibutuhkan untuk pengelolaan operasional, tetapi tidak boleh menggantikan outcome. Pertanyaan akhirnya adalah apakah masyarakat memiliki pendapatan riil lebih tinggi, pekerjaan lebih produktif, risiko ekonomi lebih rendah, akses layanan lebih baik, dan kesempatan mobilitas yang lebih besar. Ketika ukuran tersebut bergerak searah dengan pertumbuhan PDB, dapat dikatakan bahwa proses pemulihan mulai bertransformasi menjadi peningkatan taraf hidup yang substantif dan inklusif.

11. Desa, Pertanian dan Pusat Pertumbuhan Baru

Meningkatkan nilai tambah di perdesaan agar pemulihan tidak terkonsentrasi di kota besar merupakan inti persoalan yang dibahas pada bagian ini. Dalam kerangka pemulihan ekonomi Indonesia, pertanyaan penting bukan hanya seberapa cepat kegiatan ekonomi kembali berkembang, melainkan siapa yang memperoleh manfaat, melalui mekanisme apa, dan seberapa tahan manfaat tersebut terhadap guncangan berikutnya. Pertumbuhan agregat memang diperlukan karena tanpa perluasan basis produksi, ruang bagi penciptaan pendapatan dan penerimaan publik menjadi terbatas. Namun, kenaikan output baru menjadi pembangunan apabila menghasilkan kemampuan nyata bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan, meningkatkan keterampilan, menjaga kesehatan, membangun aset, dan merencanakan masa depan. Perspektif ini menempatkan taraf hidup sebagai

hasil dari interaksi antara pasar kerja, struktur produksi, harga, layanan publik, aset rumah tangga, serta institusi.

Secara ekonomi, mekanismenya bekerja melalui beberapa jalur. Pertama, produksi yang meningkat menciptakan permintaan terhadap tenaga kerja, pemasok, jasa dan infrastruktur. Kedua, produktivitas yang lebih tinggi memperbesar ruang bagi kenaikan upah dan laba usaha. Ketiga, basis ekonomi yang melebar meningkatkan penerimaan fiskal yang dapat membiayai pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial dan infrastruktur. Keempat, proses tersebut membentuk ekspektasi dan investasi rumah tangga: ketika pendapatan lebih stabil, keluarga lebih berani menyekolahkan anak lebih lama, memperbaiki tempat tinggal, membeli alat produktif, atau memulai usaha. Akan tetapi, setiap jalur dapat terputus oleh konsentrasi pasar, mismatch keterampilan, inflasi, informalitas, lemahnya layanan publik, atau ketimpangan akses terhadap modal dan teknologi.

Dalam konteks Indonesia, desa dapat menjadi simpul produksi dan layanan bila infrastruktur, SDM, kelembagaan dan pasar dihubungkan secara simultan. Contoh ini penting karena menunjukkan bahwa kebijakan yang tampak berhasil pada tingkat makro dapat memiliki hasil berbeda pada tingkat rumah tangga. Satu wilayah dapat mencatat investasi tinggi tetapi kesempatan kerja lokal terbatas; daerah lain dapat menyerap banyak tenaga kerja tetapi berada pada pekerjaan berproduktivitas rendah. Dengan demikian, analisis perlu bergerak dari pertanyaan 'berapa besar pertumbuhan?' menuju 'bagaimana struktur pertumbuhan itu?', 'siapa yang berpartisipasi?', dan 'apakah pendapatan serta layanan yang diterima masyarakat meningkat secara riil?'. Pendekatan seperti ini juga menghindari jebakan melihat rata-rata nasional sebagai gambaran semua kelompok.

Arah kebijakan yang relevan adalah mengembangkan agroindustri, BUM Desa, koperasi, logistik dingin, konektivitas digital dan ekonomi wisata berbasis komunitas. Kebijakan tersebut sebaiknya tidak diperlakukan sebagai proyek tunggal, melainkan sebagai paket yang menghubungkan sisi permintaan dan sisi penawaran. Insentif investasi, misalnya, perlu disertai pengembangan pemasok, pelatihan pekerja, infrastruktur, pembiayaan dan standar kerja. Program pendidikan perlu tersambung dengan kebutuhan industri dan perubahan teknologi. Bantuan sosial perlu terhubung dengan layanan kesehatan, pendidikan, penempatan kerja atau dukungan usaha ketika kondisi penerima memungkinkan. Integrasi semacam ini meningkatkan peluang bahwa setiap rupiah belanja publik atau investasi swasta menghasilkan multiplier ekonomi dan sosial yang lebih besar.

Dimensi distribusi juga menentukan keberhasilan. Kebijakan yang menaikkan efisiensi rata-rata dapat menghasilkan pemenang dan pihak yang tertinggal. Oleh karena itu, prinsip inklusi tidak berarti menahan perubahan, tetapi memperluas kemampuan masyarakat untuk ikut memperoleh manfaat dari perubahan. Reskilling bagi pekerja terdampak, pembiayaan transisi bagi UMKM, perlindungan pendapatan sementara, serta layanan dasar yang berkualitas merupakan contoh instrumen yang membuat transformasi lebih adil. Dalam jangka panjang, pemerataan kesempatan yang baik justru memperbesar basis talenta, kewirausahaan dan permintaan domestik yang menopang pertumbuhan.

Untuk memastikan akuntabilitas, keberhasilan bagian ini sebaiknya dipantau melalui indikator seperti pendapatan perdesaan, produktivitas pertanian, non-farm jobs, akses pasar. Indikator output—misalnya jumlah program, pelatihan, proyek, atau penerima—tetap dibutuhkan untuk pengelolaan operasional, tetapi tidak boleh menggantikan outcome. Pertanyaan akhirnya adalah apakah masyarakat memiliki pendapatan riil lebih tinggi, pekerjaan lebih produktif, risiko ekonomi lebih rendah,

akses layanan lebih baik, dan kesempatan mobilitas yang lebih besar. Ketika ukuran tersebut bergerak searah dengan pertumbuhan PDB, dapat dikatakan bahwa proses pemulihan mulai bertransformasi menjadi peningkatan taraf hidup yang substantif dan inklusif.

12. Kota Kecil dan Aglomerasi Menengah

Fungsi kota kecil sebagai penghubung desa, pasar, layanan, pendidikan dan manufaktur ringan merupakan inti persoalan yang dibahas pada bagian ini. Dalam kerangka pemulihan ekonomi Indonesia, pertanyaan penting bukan hanya seberapa cepat kegiatan ekonomi kembali berkembang, melainkan siapa yang memperoleh manfaat, melalui mekanisme apa, dan seberapa tahan manfaat tersebut terhadap guncangan berikutnya. Pertumbuhan agregat memang diperlukan karena tanpa perluasan basis produksi, ruang bagi penciptaan pendapatan dan penerimaan publik menjadi terbatas. Namun, kenaikan output baru menjadi pembangunan apabila menghasilkan kemampuan nyata bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan, meningkatkan keterampilan, menjaga kesehatan, membangun aset, dan merencanakan masa depan. Perspektif ini menempatkan taraf hidup sebagai hasil dari interaksi antara pasar kerja, struktur produksi, harga, layanan publik, aset rumah tangga, serta institusi.

Secara ekonomi, mekanismenya bekerja melalui beberapa jalur. Pertama, produksi yang meningkat menciptakan permintaan terhadap tenaga kerja, pemasok, jasa dan infrastruktur. Kedua, produktivitas yang lebih tinggi memperbesar ruang bagi kenaikan upah dan laba usaha. Ketiga, basis ekonomi yang melebar meningkatkan penerimaan fiskal yang dapat membiayai pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial dan infrastruktur. Keempat, proses tersebut membentuk ekspektasi dan investasi rumah tangga: ketika pendapatan lebih stabil, keluarga lebih berani menyekolahkan anak lebih lama, memperbaiki tempat tinggal, membeli alat produktif, atau memulai usaha. Akan tetapi, setiap jalur dapat terputus oleh konsentrasi pasar, mismatch keterampilan, inflasi, informalitas, lemahnya layanan publik, atau ketimpangan akses terhadap modal dan teknologi.

Dalam konteks Indonesia, kota kabupaten yang terhubung baik dapat menjadi lokasi pengolahan, logistik, pendidikan vokasi, dan layanan kesehatan regional. Contoh ini penting karena menunjukkan bahwa kebijakan yang tampak berhasil pada tingkat makro dapat memiliki hasil berbeda pada tingkat rumah tangga. Satu wilayah dapat mencatat investasi tinggi tetapi kesempatan kerja lokal terbatas; daerah lain dapat menyerap banyak tenaga kerja tetapi berada pada pekerjaan berproduktivitas rendah. Dengan demikian, analisis perlu bergerak dari pertanyaan 'berapa besar pertumbuhan?' menuju 'bagaimana struktur pertumbuhan itu?', 'siapa yang berpartisipasi?', dan 'apakah pendapatan serta layanan yang diterima masyarakat meningkat secara riil?'. Pendekatan seperti ini juga menghindari jebakan melihat rata-rata nasional sebagai gambaran semua kelompok.

Arah kebijakan yang relevan adalah membangun jaringan pusat pertumbuhan sekunder untuk mengurangi tekanan megapolitan dan ketimpangan spasial. Kebijakan tersebut sebaiknya tidak diperlakukan sebagai proyek tunggal, melainkan sebagai paket yang menghubungkan sisi permintaan dan sisi penawaran. Insentif investasi, misalnya, perlu disertai pengembangan pemasok, pelatihan pekerja, infrastruktur, pembiayaan dan standar kerja. Program pendidikan perlu tersambung dengan kebutuhan industri dan perubahan teknologi. Bantuan sosial perlu terhubung dengan layanan

kesehatan, pendidikan, penempatan kerja atau dukungan usaha ketika kondisi penerima memungkinkan. Integrasi semacam ini meningkatkan peluang bahwa setiap rupiah belanja publik atau investasi swasta menghasilkan multiplier ekonomi dan sosial yang lebih besar.

Dimensi distribusi juga menentukan keberhasilan. Kebijakan yang menaikkan efisiensi rata-rata dapat menghasilkan pemenang dan pihak yang tertinggal. Oleh karena itu, prinsip inklusi tidak berarti menahan perubahan, tetapi memperluas kemampuan masyarakat untuk ikut memperoleh manfaat dari perubahan. Reskilling bagi pekerja terdampak, pembiayaan transisi bagi UMKM, perlindungan pendapatan sementara, serta layanan dasar yang berkualitas merupakan contoh instrumen yang membuat transformasi lebih adil. Dalam jangka panjang, pemerataan kesempatan yang baik justru memperbesar basis talenta, kewirausahaan dan permintaan domestik yang menopang pertumbuhan.

Untuk memastikan akuntabilitas, keberhasilan bagian ini sebaiknya dipantau melalui indikator seperti regional GVA, commuting time, firm density, service accessibility. Indikator output—misalnya jumlah program, pelatihan, proyek, atau penerima—tetap dibutuhkan untuk pengelolaan operasional, tetapi tidak boleh menggantikan outcome. Pertanyaan akhirnya adalah apakah masyarakat memiliki pendapatan riil lebih tinggi, pekerjaan lebih produktif, risiko ekonomi lebih rendah, akses layanan lebih baik, dan kesempatan mobilitas yang lebih besar. Ketika ukuran tersebut bergerak searah dengan pertumbuhan PDB, dapat dikatakan bahwa proses pemulihan mulai bertransformasi menjadi peningkatan taraf hidup yang substantif dan inklusif.

13. Pendidikan sebagai Investasi Taraf Hidup Jangka Panjang

Kualitas pembelajaran menentukan produktivitas, pendapatan dan kemampuan beradaptasi terhadap teknologi merupakan inti persoalan yang dibahas pada bagian ini. Dalam kerangka pemulihan ekonomi Indonesia, pertanyaan penting bukan hanya seberapa cepat kegiatan ekonomi kembali berkembang, melainkan siapa yang memperoleh manfaat, melalui mekanisme apa, dan seberapa tahan manfaat tersebut terhadap guncangan berikutnya. Pertumbuhan agregat memang diperlukan karena tanpa perluasan basis produksi, ruang bagi penciptaan pendapatan dan penerimaan publik menjadi terbatas. Namun, kenaikan output baru menjadi pembangunan apabila menghasilkan kemampuan nyata bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan, meningkatkan keterampilan, menjaga kesehatan, membangun aset, dan merencanakan masa depan. Perspektif ini menempatkan taraf hidup sebagai hasil dari interaksi antara pasar kerja, struktur produksi, harga, layanan publik, aset rumah tangga, serta institusi.

Secara ekonomi, mekanismenya bekerja melalui beberapa jalur. Pertama, produksi yang meningkat menciptakan permintaan terhadap tenaga kerja, pemasok, jasa dan infrastruktur. Kedua, produktivitas yang lebih tinggi memperbesar ruang bagi kenaikan upah dan laba usaha. Ketiga, basis ekonomi yang melebar meningkatkan penerimaan fiskal yang dapat membiayai pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial dan infrastruktur. Keempat, proses tersebut membentuk ekspektasi dan investasi rumah tangga: ketika pendapatan lebih stabil, keluarga lebih berani menyekolahkan anak lebih lama, memperbaiki tempat tinggal, membeli alat produktif, atau memulai usaha. Akan tetapi, setiap jalur dapat terputus oleh konsentrasi pasar, mismatch keterampilan, inflasi, informalitas, lemahnya layanan publik, atau ketimpangan akses terhadap modal dan teknologi.

Dalam konteks Indonesia, lama sekolah tanpa kualitas belajar yang memadai dapat menghasilkan credential inflation dan mismatch. Contoh ini penting karena menunjukkan bahwa kebijakan yang tampak berhasil pada tingkat makro dapat memiliki hasil berbeda pada tingkat rumah tangga. Satu wilayah dapat mencatat investasi tinggi tetapi kesempatan kerja lokal terbatas; daerah lain dapat menyerap banyak tenaga kerja tetapi berada pada pekerjaan berproduktivitas rendah. Dengan demikian, analisis perlu bergerak dari pertanyaan 'berapa besar pertumbuhan?' menuju 'bagaimana struktur pertumbuhan itu?', 'siapa yang berpartisipasi?', dan 'apakah pendapatan serta layanan yang diterima masyarakat meningkat secara riil?'. Pendekatan seperti ini juga menghindari jebakan melihat rata-rata nasional sebagai gambaran semua kelompok.

Arah kebijakan yang relevan adalah mengutamakan foundational skills, STEM, literasi digital, karakter, bahasa dan keterampilan sosial. Kebijakan tersebut sebaiknya tidak diperlakukan sebagai proyek tunggal, melainkan sebagai paket yang menghubungkan sisi permintaan dan sisi penawaran. Insentif investasi, misalnya, perlu disertai pengembangan pemasok, pelatihan pekerja, infrastruktur, pembiayaan dan standar kerja. Program pendidikan perlu tersambung dengan kebutuhan industri dan perubahan teknologi. Bantuan sosial perlu terhubung dengan layanan kesehatan, pendidikan, penempatan kerja atau dukungan usaha ketika kondisi penerima memungkinkan. Integrasi semacam ini meningkatkan peluang bahwa setiap rupiah belanja publik atau investasi swasta menghasilkan multiplier ekonomi dan sosial yang lebih besar.

Dimensi distribusi juga menentukan keberhasilan. Kebijakan yang menaikkan efisiensi rata-rata dapat menghasilkan pemenang dan pihak yang tertinggal. Oleh karena itu, prinsip inklusi tidak berarti menahan perubahan, tetapi memperluas kemampuan masyarakat untuk ikut memperoleh manfaat dari perubahan. Reskilling bagi pekerja terdampak, pembiayaan transisi bagi UMKM, perlindungan pendapatan sementara, serta layanan dasar yang berkualitas merupakan contoh instrumen yang membuat transformasi lebih adil. Dalam jangka panjang, pemerataan kesempatan yang baik justru memperbesar basis talenta, kewirausahaan dan permintaan domestik yang menopang pertumbuhan.

Untuk memastikan akuntabilitas, keberhasilan bagian ini sebaiknya dipantau melalui indikator seperti learning outcomes, school-to-work transition, returns to education, dropout rate. Indikator output—misalnya jumlah program, pelatihan, proyek, atau penerima—tetap dibutuhkan untuk pengelolaan operasional, tetapi tidak boleh menggantikan outcome. Pertanyaan akhirnya adalah apakah masyarakat memiliki pendapatan riil lebih tinggi, pekerjaan lebih produktif, risiko ekonomi lebih rendah, akses layanan lebih baik, dan kesempatan mobilitas yang lebih besar. Ketika ukuran tersebut bergerak searah dengan pertumbuhan PDB, dapat dikatakan bahwa proses pemulihan mulai bertransformasi menjadi peningkatan taraf hidup yang substantif dan inklusif.

14. Kesehatan, Gizi dan Produktivitas

Kesehatan sebagai komponen kesejahteraan sekaligus input ekonomi merupakan inti persoalan yang dibahas pada bagian ini. Dalam kerangka pemulihan ekonomi Indonesia, pertanyaan penting bukan hanya seberapa cepat kegiatan ekonomi kembali berkembang, melainkan siapa yang memperoleh manfaat, melalui mekanisme apa, dan seberapa tahan manfaat tersebut terhadap guncangan berikutnya. Pertumbuhan agregat memang diperlukan karena tanpa perluasan basis produksi, ruang

bagi penciptaan pendapatan dan penerimaan publik menjadi terbatas. Namun, kenaikan output baru menjadi pembangunan apabila menghasilkan kemampuan nyata bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan, meningkatkan keterampilan, menjaga kesehatan, membangun aset, dan merencanakan masa depan. Perspektif ini menempatkan taraf hidup sebagai hasil dari interaksi antara pasar kerja, struktur produksi, harga, layanan publik, aset rumah tangga, serta institusi.

Secara ekonomi, mekanismenya bekerja melalui beberapa jalur. Pertama, produksi yang meningkat menciptakan permintaan terhadap tenaga kerja, pemasok, jasa dan infrastruktur. Kedua, produktivitas yang lebih tinggi memperbesar ruang bagi kenaikan upah dan laba usaha. Ketiga, basis ekonomi yang melebar meningkatkan penerimaan fiskal yang dapat membiayai pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial dan infrastruktur. Keempat, proses tersebut membentuk ekspektasi dan investasi rumah tangga: ketika pendapatan lebih stabil, keluarga lebih berani menyekolahkan anak lebih lama, memperbaiki tempat tinggal, membeli alat produktif, atau memulai usaha. Akan tetapi, setiap jalur dapat terputus oleh konsentrasi pasar, mismatch keterampilan, inflasi, informalitas, lemahnya layanan publik, atau ketimpangan akses terhadap modal dan teknologi.

Dalam konteks Indonesia, penyakit kronis dan pengeluaran kesehatan katastrofik dapat menghapus manfaat kenaikan pendapatan. Contoh ini penting karena menunjukkan bahwa kebijakan yang tampak berhasil pada tingkat makro dapat memiliki hasil berbeda pada tingkat rumah tangga. Satu wilayah dapat mencatat investasi tinggi tetapi kesempatan kerja lokal terbatas; daerah lain dapat menyerap banyak tenaga kerja tetapi berada pada pekerjaan berproduktivitas rendah. Dengan demikian, analisis perlu bergerak dari pertanyaan 'berapa besar pertumbuhan?' menuju 'bagaimana struktur pertumbuhan itu?', 'siapa yang berpartisipasi?', dan 'apakah pendapatan serta layanan yang diterima masyarakat meningkat secara riil?'. Pendekatan seperti ini juga menghindari jebakan melihat rata-rata nasional sebagai gambaran semua kelompok.

Arah kebijakan yang relevan adalah mengintegrasikan promotif-preventif, layanan primer, gizi, kesehatan ibu-anak dan pembiayaan yang melindungi rumah tangga. Kebijakan tersebut sebaiknya tidak diperlakukan sebagai proyek tunggal, melainkan sebagai paket yang menghubungkan sisi permintaan dan sisi penawaran. Insentif investasi, misalnya, perlu disertai pengembangan pemasok, pelatihan pekerja, infrastruktur, pembiayaan dan standar kerja. Program pendidikan perlu tersambung dengan kebutuhan industri dan perubahan teknologi. Bantuan sosial perlu terhubung dengan layanan kesehatan, pendidikan, penempatan kerja atau dukungan usaha ketika kondisi penerima memungkinkan. Integrasi semacam ini meningkatkan peluang bahwa setiap rupiah belanja publik atau investasi swasta menghasilkan multiplier ekonomi dan sosial yang lebih besar.

Dimensi distribusi juga menentukan keberhasilan. Kebijakan yang menaikkan efisiensi rata-rata dapat menghasilkan pemenang dan pihak yang tertinggal. Oleh karena itu, prinsip inklusi tidak berarti menahan perubahan, tetapi memperluas kemampuan masyarakat untuk ikut memperoleh manfaat dari perubahan. Reskilling bagi pekerja terdampak, pembiayaan transisi bagi UMKM, perlindungan pendapatan sementara, serta layanan dasar yang berkualitas merupakan contoh instrumen yang membuat transformasi lebih adil. Dalam jangka panjang, pemerataan kesempatan yang baik justru memperbesar basis talenta, kewirausahaan dan permintaan domestik yang menopang pertumbuhan.

Untuk memastikan akuntabilitas, keberhasilan bagian ini sebaiknya dipantau melalui indikator seperti healthy life expectancy, catastrophic spending, stunting, absenteeism. Indikator output—misalnya

jumlah program, pelatihan, proyek, atau penerima—tetap dibutuhkan untuk pengelolaan operasional, tetapi tidak boleh menggantikan outcome. Pertanyaan akhirnya adalah apakah masyarakat memiliki pendapatan riil lebih tinggi, pekerjaan lebih produktif, risiko ekonomi lebih rendah, akses layanan lebih baik, dan kesempatan mobilitas yang lebih besar. Ketika ukuran tersebut bergerak searah dengan pertumbuhan PDB, dapat dikatakan bahwa proses pemulihan mulai bertransformasi menjadi peningkatan taraf hidup yang substantif dan inklusif.

15. Reskilling dan Upskilling dalam Era AI

Perubahan tugas kerja akibat otomatisasi, AI generatif dan digitalisasi memerlukan pembelajaran sepanjang hayat merupakan inti persoalan yang dibahas pada bagian ini. Dalam kerangka pemulihan ekonomi Indonesia, pertanyaan penting bukan hanya seberapa cepat kegiatan ekonomi kembali berkembang, melainkan siapa yang memperoleh manfaat, melalui mekanisme apa, dan seberapa tahan manfaat tersebut terhadap guncangan berikutnya. Pertumbuhan agregat memang diperlukan karena tanpa perluasan basis produksi, ruang bagi penciptaan pendapatan dan penerimaan publik menjadi terbatas. Namun, kenaikan output baru menjadi pembangunan apabila menghasilkan kemampuan nyata bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan, meningkatkan keterampilan, menjaga kesehatan, membangun aset, dan merencanakan masa depan. Perspektif ini menempatkan taraf hidup sebagai hasil dari interaksi antara pasar kerja, struktur produksi, harga, layanan publik, aset rumah tangga, serta institusi.

Secara ekonomi, mekanismenya bekerja melalui beberapa jalur. Pertama, produksi yang meningkat menciptakan permintaan terhadap tenaga kerja, pemasok, jasa dan infrastruktur. Kedua, produktivitas yang lebih tinggi memperbesar ruang bagi kenaikan upah dan laba usaha. Ketiga, basis ekonomi yang melebar meningkatkan penerimaan fiskal yang dapat membiayai pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial dan infrastruktur. Keempat, proses tersebut membentuk ekspektasi dan investasi rumah tangga: ketika pendapatan lebih stabil, keluarga lebih berani menyekolahkan anak lebih lama, memperbaiki tempat tinggal, membeli alat produktif, atau memulai usaha. Akan tetapi, setiap jalur dapat terputus oleh konsentrasi pasar, mismatch keterampilan, inflasi, informalitas, lemahnya layanan publik, atau ketimpangan akses terhadap modal dan teknologi.

Dalam konteks Indonesia, AI dapat meningkatkan produktivitas pekerja berpendidikan tetapi juga memperlebar kesenjangan bila akses keterampilan tidak merata. Contoh ini penting karena menunjukkan bahwa kebijakan yang tampak berhasil pada tingkat makro dapat memiliki hasil berbeda pada tingkat rumah tangga. Satu wilayah dapat mencatat investasi tinggi tetapi kesempatan kerja lokal terbatas; daerah lain dapat menyerap banyak tenaga kerja tetapi berada pada pekerjaan berproduktivitas rendah. Dengan demikian, analisis perlu bergerak dari pertanyaan 'berapa besar pertumbuhan?' menuju 'bagaimana struktur pertumbuhan itu?', 'siapa yang berpartisipasi?', dan 'apakah pendapatan serta layanan yang diterima masyarakat meningkat secara riil?'. Pendekatan seperti ini juga menghindari jebakan melihat rata-rata nasional sebagai gambaran semua kelompok.

Arah kebijakan yang relevan adalah membangun ekosistem microcredential, RPL, pelatihan industri dan skills intelligence. Kebijakan tersebut sebaiknya tidak diperlakukan sebagai proyek tunggal, melainkan sebagai paket yang menghubungkan sisi permintaan dan sisi penawaran. Insentif investasi,

misalnya, perlu disertai pengembangan pemasok, pelatihan pekerja, infrastruktur, pembiayaan dan standar kerja. Program pendidikan perlu tersambung dengan kebutuhan industri dan perubahan teknologi. Bantuan sosial perlu terhubung dengan layanan kesehatan, pendidikan, penempatan kerja atau dukungan usaha ketika kondisi penerima memungkinkan. Integrasi semacam ini meningkatkan peluang bahwa setiap rupiah belanja publik atau investasi swasta menghasilkan multiplier ekonomi dan sosial yang lebih besar.

Dimensi distribusi juga menentukan keberhasilan. Kebijakan yang menaikkan efisiensi rata-rata dapat menghasilkan pemenang dan pihak yang tertinggal. Oleh karena itu, prinsip inklusi tidak berarti menahan perubahan, tetapi memperluas kemampuan masyarakat untuk ikut memperoleh manfaat dari perubahan. Reskilling bagi pekerja terdampak, pembiayaan transisi bagi UMKM, perlindungan pendapatan sementara, serta layanan dasar yang berkualitas merupakan contoh instrumen yang membuat transformasi lebih adil. Dalam jangka panjang, pemerataan kesempatan yang baik justru memperbesar basis talenta, kewirausahaan dan permintaan domestik yang menopang pertumbuhan.

Untuk memastikan akuntabilitas, keberhasilan bagian ini sebaiknya dipantau melalui indikator seperti training participation, skill match, digital skills, wage mobility. Indikator output—misalnya jumlah program, pelatihan, proyek, atau penerima—tetap dibutuhkan untuk pengelolaan operasional, tetapi tidak boleh menggantikan outcome. Pertanyaan akhirnya adalah apakah masyarakat memiliki pendapatan riil lebih tinggi, pekerjaan lebih produktif, risiko ekonomi lebih rendah, akses layanan lebih baik, dan kesempatan mobilitas yang lebih besar. Ketika ukuran tersebut bergerak searah dengan pertumbuhan PDB, dapat dikatakan bahwa proses pemulihan mulai bertransformasi menjadi peningkatan taraf hidup yang substantif dan inklusif.

16. Ekonomi Digital dan Inklusi Produktif

Teknologi digital dapat menurunkan biaya transaksi, memperluas pasar dan meningkatkan akses keuangan merupakan inti persoalan yang dibahas pada bagian ini. Dalam kerangka pemulihan ekonomi Indonesia, pertanyaan penting bukan hanya seberapa cepat kegiatan ekonomi kembali berkembang, melainkan siapa yang memperoleh manfaat, melalui mekanisme apa, dan seberapa tahan manfaat tersebut terhadap guncangan berikutnya. Pertumbuhan agregat memang diperlukan karena tanpa perluasan basis produksi, ruang bagi penciptaan pendapatan dan penerimaan publik menjadi terbatas. Namun, kenaikan output baru menjadi pembangunan apabila menghasilkan kemampuan nyata bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan, meningkatkan keterampilan, menjaga kesehatan, membangun aset, dan merencanakan masa depan. Perspektif ini menempatkan taraf hidup sebagai hasil dari interaksi antara pasar kerja, struktur produksi, harga, layanan publik, aset rumah tangga, serta institusi.

Secara ekonomi, mekanismenya bekerja melalui beberapa jalur. Pertama, produksi yang meningkat menciptakan permintaan terhadap tenaga kerja, pemasok, jasa dan infrastruktur. Kedua, produktivitas yang lebih tinggi memperbesar ruang bagi kenaikan upah dan laba usaha. Ketiga, basis ekonomi yang melebar meningkatkan penerimaan fiskal yang dapat membiayai pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial dan infrastruktur. Keempat, proses tersebut membentuk ekspektasi dan investasi rumah tangga: ketika pendapatan lebih stabil, keluarga lebih berani menyekolahkan anak lebih lama, memperbaiki

tempat tinggal, membeli alat produktif, atau memulai usaha. Akan tetapi, setiap jalur dapat terputus oleh konsentrasi pasar, mismatch keterampilan, inflasi, informalitas, lemahnya layanan publik, atau ketimpangan akses terhadap modal dan teknologi.

Dalam konteks Indonesia, akses internet saja tidak cukup; manfaat ekonomi bergantung pada kemampuan usaha dan pekerja menggunakan teknologi secara produktif. Contoh ini penting karena menunjukkan bahwa kebijakan yang tampak berhasil pada tingkat makro dapat memiliki hasil berbeda pada tingkat rumah tangga. Satu wilayah dapat mencatat investasi tinggi tetapi kesempatan kerja lokal terbatas; daerah lain dapat menyerap banyak tenaga kerja tetapi berada pada pekerjaan berproduktivitas rendah. Dengan demikian, analisis perlu bergerak dari pertanyaan 'berapa besar pertumbuhan?' menuju 'bagaimana struktur pertumbuhan itu?', 'siapa yang berpartisipasi?', dan 'apakah pendapatan serta layanan yang diterima masyarakat meningkat secara riil?'. Pendekatan seperti ini juga menghindari jebakan melihat rata-rata nasional sebagai gambaran semua kelompok.

Arah kebijakan yang relevan adalah memperluas konektivitas berkualitas, interoperabilitas, keamanan siber, literasi digital dan platform yang adil. Kebijakan tersebut sebaiknya tidak diperlakukan sebagai proyek tunggal, melainkan sebagai paket yang menghubungkan sisi permintaan dan sisi penawaran. Insentif investasi, misalnya, perlu disertai pengembangan pemasok, pelatihan pekerja, infrastruktur, pembiayaan dan standar kerja. Program pendidikan perlu tersambung dengan kebutuhan industri dan perubahan teknologi. Bantuan sosial perlu terhubung dengan layanan kesehatan, pendidikan, penempatan kerja atau dukungan usaha ketika kondisi penerima memungkinkan. Integrasi semacam ini meningkatkan peluang bahwa setiap rupiah belanja publik atau investasi swasta menghasilkan multiplier ekonomi dan sosial yang lebih besar.

Dimensi distribusi juga menentukan keberhasilan. Kebijakan yang menaikkan efisiensi rata-rata dapat menghasilkan pemenang dan pihak yang tertinggal. Oleh karena itu, prinsip inklusi tidak berarti menahan perubahan, tetapi memperluas kemampuan masyarakat untuk ikut memperoleh manfaat dari perubahan. Reskilling bagi pekerja terdampak, pembiayaan transisi bagi UMKM, perlindungan pendapatan sementara, serta layanan dasar yang berkualitas merupakan contoh instrumen yang membuat transformasi lebih adil. Dalam jangka panjang, pemerataan kesempatan yang baik justru memperbesar basis talenta, kewirausahaan dan permintaan domestik yang menopang pertumbuhan.

Untuk memastikan akuntabilitas, keberhasilan bagian ini sebaiknya dipantau melalui indikator seperti broadband quality, digital adoption, e-commerce sales, fintech access. Indikator output—misalnya jumlah program, pelatihan, proyek, atau penerima—tetap dibutuhkan untuk pengelolaan operasional, tetapi tidak boleh menggantikan outcome. Pertanyaan akhirnya adalah apakah masyarakat memiliki pendapatan riil lebih tinggi, pekerjaan lebih produktif, risiko ekonomi lebih rendah, akses layanan lebih baik, dan kesempatan mobilitas yang lebih besar. Ketika ukuran tersebut bergerak searah dengan pertumbuhan PDB, dapat dikatakan bahwa proses pemulihan mulai bertransformasi menjadi peningkatan taraf hidup yang substantif dan inklusif.

17. Artificial Intelligence sebagai Pengungkit, Bukan Pengganti Tujuan Pembangunan

Ai harus dinilai dari kontribusinya terhadap produktivitas manusia, layanan publik dan kesempatan yang lebih luas merupakan inti persoalan yang dibahas pada bagian ini. Dalam kerangka pemulihan ekonomi Indonesia, pertanyaan penting bukan hanya seberapa cepat kegiatan ekonomi kembali berkembang, melainkan siapa yang memperoleh manfaat, melalui mekanisme apa, dan seberapa tahan manfaat tersebut terhadap guncangan berikutnya. Pertumbuhan agregat memang diperlukan karena tanpa perluasan basis produksi, ruang bagi penciptaan pendapatan dan penerimaan publik menjadi terbatas. Namun, kenaikan output baru menjadi pembangunan apabila menghasilkan kemampuan nyata bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan, meningkatkan keterampilan, menjaga kesehatan, membangun aset, dan merencanakan masa depan. Perspektif ini menempatkan taraf hidup sebagai hasil dari interaksi antara pasar kerja, struktur produksi, harga, layanan publik, aset rumah tangga, serta institusi.

Secara ekonomi, mekanismenya bekerja melalui beberapa jalur. Pertama, produksi yang meningkat menciptakan permintaan terhadap tenaga kerja, pemasok, jasa dan infrastruktur. Kedua, produktivitas yang lebih tinggi memperbesar ruang bagi kenaikan upah dan laba usaha. Ketiga, basis ekonomi yang melebar meningkatkan penerimaan fiskal yang dapat membiayai pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial dan infrastruktur. Keempat, proses tersebut membentuk ekspektasi dan investasi rumah tangga: ketika pendapatan lebih stabil, keluarga lebih berani menyekolahkan anak lebih lama, memperbaiki tempat tinggal, membeli alat produktif, atau memulai usaha. Akan tetapi, setiap jalur dapat terputus oleh konsentrasi pasar, mismatch keterampilan, inflasi, informalitas, lemahnya layanan publik, atau ketimpangan akses terhadap modal dan teknologi.

Dalam konteks Indonesia, otomasi administratif dapat membebaskan waktu untuk pelayanan bernilai tinggi bila organisasi mendesain ulang pekerjaan secara inklusif. Contoh ini penting karena menunjukkan bahwa kebijakan yang tampak berhasil pada tingkat makro dapat memiliki hasil berbeda pada tingkat rumah tangga. Satu wilayah dapat mencatat investasi tinggi tetapi kesempatan kerja lokal terbatas; daerah lain dapat menyerap banyak tenaga kerja tetapi berada pada pekerjaan berproduktivitas rendah. Dengan demikian, analisis perlu bergerak dari pertanyaan 'berapa besar pertumbuhan?' menuju 'bagaimana struktur pertumbuhan itu?', 'siapa yang berpartisipasi?', dan 'apakah pendapatan serta layanan yang diterima masyarakat meningkat secara riil?'. Pendekatan seperti ini juga menghindari jebakan melihat rata-rata nasional sebagai gambaran semua kelompok.

Arah kebijakan yang relevan adalah mendorong human-in-the-loop, tata kelola data, audit algoritma dan redistribusi manfaat produktivitas. Kebijakan tersebut sebaiknya tidak diperlakukan sebagai proyek tunggal, melainkan sebagai paket yang menghubungkan sisi permintaan dan sisi penawaran. Insentif investasi, misalnya, perlu disertai pengembangan pemasok, pelatihan pekerja, infrastruktur, pembiayaan dan standar kerja. Program pendidikan perlu tersambung dengan kebutuhan industri dan perubahan teknologi. Bantuan sosial perlu terhubung dengan layanan kesehatan, pendidikan, penempatan kerja atau dukungan usaha ketika kondisi penerima memungkinkan. Integrasi semacam ini meningkatkan peluang bahwa setiap rupiah belanja publik atau investasi swasta menghasilkan multiplier ekonomi dan sosial yang lebih besar.

Dimensi distribusi juga menentukan keberhasilan. Kebijakan yang menaikkan efisiensi rata-rata dapat menghasilkan pemenang dan pihak yang tertinggal. Oleh karena itu, prinsip inklusi tidak berarti menahan perubahan, tetapi memperluas kemampuan masyarakat untuk ikut memperoleh manfaat dari perubahan. Reskilling bagi pekerja terdampak, pembiayaan transisi bagi UMKM, perlindungan pendapatan sementara, serta layanan dasar yang berkualitas merupakan contoh instrumen yang membuat transformasi lebih adil. Dalam jangka panjang, pemerataan kesempatan yang baik justru memperbesar basis talenta, kewirausahaan dan permintaan domestik yang menopang pertumbuhan.

Untuk memastikan akuntabilitas, keberhasilan bagian ini sebaiknya dipantau melalui indikator seperti AI adoption, task augmentation, productivity gain, displacement-reskilling ratio. Indikator output—misalnya jumlah program, pelatihan, proyek, atau penerima—tetap dibutuhkan untuk pengelolaan operasional, tetapi tidak boleh menggantikan outcome. Pertanyaan akhirnya adalah apakah masyarakat memiliki pendapatan riil lebih tinggi, pekerjaan lebih produktif, risiko ekonomi lebih rendah, akses layanan lebih baik, dan kesempatan mobilitas yang lebih besar. Ketika ukuran tersebut bergerak searah dengan pertumbuhan PDB, dapat dikatakan bahwa proses pemulihan mulai bertransformasi menjadi peningkatan taraf hidup yang substantif dan inklusif.

18. Perlindungan Sosial sebagai Infrastruktur Ekonomi

Jaminan sosial mengurangi risiko jatuh miskin dan memungkinkan rumah tangga berinvestasi pada pendidikan, kesehatan dan mobilitas merupakan inti persoalan yang dibahas pada bagian ini. Dalam kerangka pemulihan ekonomi Indonesia, pertanyaan penting bukan hanya seberapa cepat kegiatan ekonomi kembali berkembang, melainkan siapa yang memperoleh manfaat, melalui mekanisme apa, dan seberapa tahan manfaat tersebut terhadap guncangan berikutnya. Pertumbuhan agregat memang diperlukan karena tanpa perluasan basis produksi, ruang bagi penciptaan pendapatan dan penerimaan publik menjadi terbatas. Namun, kenaikan output baru menjadi pembangunan apabila menghasilkan kemampuan nyata bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan, meningkatkan keterampilan, menjaga kesehatan, membangun aset, dan merencanakan masa depan. Perspektif ini menempatkan taraf hidup sebagai hasil dari interaksi antara pasar kerja, struktur produksi, harga, layanan publik, aset rumah tangga, serta institusi.

Secara ekonomi, mekanismenya bekerja melalui beberapa jalur. Pertama, produksi yang meningkat menciptakan permintaan terhadap tenaga kerja, pemasok, jasa dan infrastruktur. Kedua, produktivitas yang lebih tinggi memperbesar ruang bagi kenaikan upah dan laba usaha. Ketiga, basis ekonomi yang melebar meningkatkan penerimaan fiskal yang dapat membiayai pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial dan infrastruktur. Keempat, proses tersebut membentuk ekspektasi dan investasi rumah tangga: ketika pendapatan lebih stabil, keluarga lebih berani menyekolahkan anak lebih lama, memperbaiki tempat tinggal, membeli alat produktif, atau memulai usaha. Akan tetapi, setiap jalur dapat terputus oleh konsentrasi pasar, mismatch keterampilan, inflasi, informalitas, lemahnya layanan publik, atau ketimpangan akses terhadap modal dan teknologi.

Dalam konteks Indonesia, pekerja informal dan gig membutuhkan desain kontribusi fleksibel agar perlindungan tidak hanya mengikuti hubungan kerja tradisional. Contoh ini penting karena menunjukkan bahwa kebijakan yang tampak berhasil pada tingkat makro dapat memiliki hasil berbeda

pada tingkat rumah tangga. Satu wilayah dapat mencatat investasi tinggi tetapi kesempatan kerja lokal terbatas; daerah lain dapat menyerap banyak tenaga kerja tetapi berada pada pekerjaan berproduktivitas rendah. Dengan demikian, analisis perlu bergerak dari pertanyaan 'berapa besar pertumbuhan?' menuju 'bagaimana struktur pertumbuhan itu?', 'siapa yang berpartisipasi?', dan 'apakah pendapatan serta layanan yang diterima masyarakat meningkat secara riil?'. Pendekatan seperti ini juga menghindari jebakan melihat rata-rata nasional sebagai gambaran semua kelompok.

Arah kebijakan yang relevan adalah membangun perlindungan sosial adaptif, portabel dan terintegrasi dengan data serta layanan ketenagakerjaan. Kebijakan tersebut sebaiknya tidak diperlakukan sebagai proyek tunggal, melainkan sebagai paket yang menghubungkan sisi permintaan dan sisi penawaran. Insentif investasi, misalnya, perlu disertai pengembangan pemasok, pelatihan pekerja, infrastruktur, pembiayaan dan standar kerja. Program pendidikan perlu tersambung dengan kebutuhan industri dan perubahan teknologi. Bantuan sosial perlu terhubung dengan layanan kesehatan, pendidikan, penempatan kerja atau dukungan usaha ketika kondisi penerima memungkinkan. Integrasi semacam ini meningkatkan peluang bahwa setiap rupiah belanja publik atau investasi swasta menghasilkan multiplier ekonomi dan sosial yang lebih besar.

Dimensi distribusi juga menentukan keberhasilan. Kebijakan yang menaikkan efisiensi rata-rata dapat menghasilkan pemenang dan pihak yang tertinggal. Oleh karena itu, prinsip inklusi tidak berarti menahan perubahan, tetapi memperluas kemampuan masyarakat untuk ikut memperoleh manfaat dari perubahan. Reskilling bagi pekerja terdampak, pembiayaan transisi bagi UMKM, perlindungan pendapatan sementara, serta layanan dasar yang berkualitas merupakan contoh instrumen yang membuat transformasi lebih adil. Dalam jangka panjang, pemerataan kesempatan yang baik justru memperbesar basis talenta, kewirausahaan dan permintaan domestik yang menopang pertumbuhan.

Untuk memastikan akuntabilitas, keberhasilan bagian ini sebaiknya dipantau melalui indikator seperti coverage, adequacy, targeting error, portability, shock response time. Indikator output—misalnya jumlah program, pelatihan, proyek, atau penerima—tetap dibutuhkan untuk pengelolaan operasional, tetapi tidak boleh menggantikan outcome. Pertanyaan akhirnya adalah apakah masyarakat memiliki pendapatan riil lebih tinggi, pekerjaan lebih produktif, risiko ekonomi lebih rendah, akses layanan lebih baik, dan kesempatan mobilitas yang lebih besar. Ketika ukuran tersebut bergerak searah dengan pertumbuhan PDB, dapat dikatakan bahwa proses pemulihan mulai bertransformasi menjadi peningkatan taraf hidup yang substantif dan inklusif.

19. Kemiskinan, Kerentanan dan Risiko Jatuh Kembali

Keluar dari kemiskinan tidak selalu berarti aman dari guncangan pendapatan, kesehatan atau harga merupakan inti persoalan yang dibahas pada bagian ini. Dalam kerangka pemulihan ekonomi Indonesia, pertanyaan penting bukan hanya seberapa cepat kegiatan ekonomi kembali berkembang, melainkan siapa yang memperoleh manfaat, melalui mekanisme apa, dan seberapa tahan manfaat tersebut terhadap guncangan berikutnya. Pertumbuhan agregat memang diperlukan karena tanpa perluasan basis produksi, ruang bagi penciptaan pendapatan dan penerimaan publik menjadi terbatas. Namun, kenaikan output baru menjadi pembangunan apabila menghasilkan kemampuan nyata bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan, meningkatkan keterampilan, menjaga kesehatan,

membangun aset, dan merencanakan masa depan. Perspektif ini menempatkan taraf hidup sebagai hasil dari interaksi antara pasar kerja, struktur produksi, harga, layanan publik, aset rumah tangga, serta institusi.

Secara ekonomi, mekanismenya bekerja melalui beberapa jalur. Pertama, produksi yang meningkat menciptakan permintaan terhadap tenaga kerja, pemasok, jasa dan infrastruktur. Kedua, produktivitas yang lebih tinggi memperbesar ruang bagi kenaikan upah dan laba usaha. Ketiga, basis ekonomi yang melebar meningkatkan penerimaan fiskal yang dapat membiayai pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial dan infrastruktur. Keempat, proses tersebut membentuk ekspektasi dan investasi rumah tangga: ketika pendapatan lebih stabil, keluarga lebih berani menyekolahkan anak lebih lama, memperbaiki tempat tinggal, membeli alat produktif, atau memulai usaha. Akan tetapi, setiap jalur dapat terputus oleh konsentrasi pasar, mismatch keterampilan, inflasi, informalitas, lemahnya layanan publik, atau ketimpangan akses terhadap modal dan teknologi.

Dalam konteks Indonesia, rumah tangga sedikit di atas garis kemiskinan dapat kembali miskin ketika terkena PHK, sakit, bencana atau inflasi pangan. Contoh ini penting karena menunjukkan bahwa kebijakan yang tampak berhasil pada tingkat makro dapat memiliki hasil berbeda pada tingkat rumah tangga. Satu wilayah dapat mencatat investasi tinggi tetapi kesempatan kerja lokal terbatas; daerah lain dapat menyerap banyak tenaga kerja tetapi berada pada pekerjaan berproduktivitas rendah. Dengan demikian, analisis perlu bergerak dari pertanyaan 'berapa besar pertumbuhan?' menuju 'bagaimana struktur pertumbuhan itu?', 'siapa yang berpartisipasi?', dan 'apakah pendapatan serta layanan yang diterima masyarakat meningkat secara riil?'. Pendekatan seperti ini juga menghindari jebakan melihat rata-rata nasional sebagai gambaran semua kelompok.

Arah kebijakan yang relevan adalah memadukan bantuan sosial dengan pekerjaan, keterampilan, aset produktif dan layanan dasar. Kebijakan tersebut sebaiknya tidak diperlakukan sebagai proyek tunggal, melainkan sebagai paket yang menghubungkan sisi permintaan dan sisi penawaran. Insentif investasi, misalnya, perlu disertai pengembangan pemasok, pelatihan pekerja, infrastruktur, pembiayaan dan standar kerja. Program pendidikan perlu tersambung dengan kebutuhan industri dan perubahan teknologi. Bantuan sosial perlu terhubung dengan layanan kesehatan, pendidikan, penempatan kerja atau dukungan usaha ketika kondisi penerima memungkinkan. Integrasi semacam ini meningkatkan peluang bahwa setiap rupiah belanja publik atau investasi swasta menghasilkan multiplier ekonomi dan sosial yang lebih besar.

Dimensi distribusi juga menentukan keberhasilan. Kebijakan yang menaikkan efisiensi rata-rata dapat menghasilkan pemenang dan pihak yang tertinggal. Oleh karena itu, prinsip inklusi tidak berarti menahan perubahan, tetapi memperluas kemampuan masyarakat untuk ikut memperoleh manfaat dari perubahan. Reskilling bagi pekerja terdampak, pembiayaan transisi bagi UMKM, perlindungan pendapatan sementara, serta layanan dasar yang berkualitas merupakan contoh instrumen yang membuat transformasi lebih adil. Dalam jangka panjang, pemerataan kesempatan yang baik justru memperbesar basis talenta, kewirausahaan dan permintaan domestik yang menopang pertumbuhan.

Untuk memastikan akuntabilitas, keberhasilan bagian ini sebaiknya dipantau melalui indikator seperti poverty rate, vulnerability rate, consumption volatility, asset ownership. Indikator output—misalnya jumlah program, pelatihan, proyek, atau penerima—tetap dibutuhkan untuk pengelolaan operasional, tetapi tidak boleh menggantikan outcome. Pertanyaan akhirnya adalah apakah masyarakat memiliki

pendapatan riil lebih tinggi, pekerjaan lebih produktif, risiko ekonomi lebih rendah, akses layanan lebih baik, dan kesempatan mobilitas yang lebih besar. Ketika ukuran tersebut bergerak searah dengan pertumbuhan PDB, dapat dikatakan bahwa proses pemulihan mulai bertransformasi menjadi peningkatan taraf hidup yang substantif dan inklusif.

20. Ketimpangan dan Pertumbuhan yang Inklusif

Kesenjangan pendapatan, aset, pendidikan dan wilayah memengaruhi kemampuan masyarakat menangkap peluang pertumbuhan merupakan inti persoalan yang dibahas pada bagian ini. Dalam kerangka pemulihan ekonomi Indonesia, pertanyaan penting bukan hanya seberapa cepat kegiatan ekonomi kembali berkembang, melainkan siapa yang memperoleh manfaat, melalui mekanisme apa, dan seberapa tahan manfaat tersebut terhadap guncangan berikutnya. Pertumbuhan agregat memang diperlukan karena tanpa perluasan basis produksi, ruang bagi penciptaan pendapatan dan penerimaan publik menjadi terbatas. Namun, kenaikan output baru menjadi pembangunan apabila menghasilkan kemampuan nyata bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan, meningkatkan keterampilan, menjaga kesehatan, membangun aset, dan merencanakan masa depan. Perspektif ini menempatkan taraf hidup sebagai hasil dari interaksi antara pasar kerja, struktur produksi, harga, layanan publik, aset rumah tangga, serta institusi.

Secara ekonomi, mekanismenya bekerja melalui beberapa jalur. Pertama, produksi yang meningkat menciptakan permintaan terhadap tenaga kerja, pemasok, jasa dan infrastruktur. Kedua, produktivitas yang lebih tinggi memperbesar ruang bagi kenaikan upah dan laba usaha. Ketiga, basis ekonomi yang melebar meningkatkan penerimaan fiskal yang dapat membiayai pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial dan infrastruktur. Keempat, proses tersebut membentuk ekspektasi dan investasi rumah tangga: ketika pendapatan lebih stabil, keluarga lebih berani menyekolahkan anak lebih lama, memperbaiki tempat tinggal, membeli alat produktif, atau memulai usaha. Akan tetapi, setiap jalur dapat terputus oleh konsentrasi pasar, mismatch keterampilan, inflasi, informalitas, lemahnya layanan publik, atau ketimpangan akses terhadap modal dan teknologi.

Dalam konteks Indonesia, ketimpangan tinggi dapat melemahkan mobilitas dan legitimasi pertumbuhan bahkan ketika rata-rata pendapatan naik. Contoh ini penting karena menunjukkan bahwa kebijakan yang tampak berhasil pada tingkat makro dapat memiliki hasil berbeda pada tingkat rumah tangga. Satu wilayah dapat mencatat investasi tinggi tetapi kesempatan kerja lokal terbatas; daerah lain dapat menyerap banyak tenaga kerja tetapi berada pada pekerjaan berproduktivitas rendah. Dengan demikian, analisis perlu bergerak dari pertanyaan 'berapa besar pertumbuhan?' menuju 'bagaimana struktur pertumbuhan itu?', 'siapa yang berpartisipasi?', dan 'apakah pendapatan serta layanan yang diterima masyarakat meningkat secara riil?'. Pendekatan seperti ini juga menghindari jebakan melihat rata-rata nasional sebagai gambaran semua kelompok.

Arah kebijakan yang relevan adalah mendorong pemerataan kesempatan melalui layanan dasar, akses modal, pasar kerja terbuka dan perpajakan yang efektif. Kebijakan tersebut sebaiknya tidak diperlakukan sebagai proyek tunggal, melainkan sebagai paket yang menghubungkan sisi permintaan dan sisi penawaran. Insentif investasi, misalnya, perlu disertai pengembangan pemasok, pelatihan pekerja, infrastruktur, pembiayaan dan standar kerja. Program pendidikan perlu tersambung dengan

kebutuhan industri dan perubahan teknologi. Bantuan sosial perlu terhubung dengan layanan kesehatan, pendidikan, penempatan kerja atau dukungan usaha ketika kondisi penerima memungkinkan. Integrasi semacam ini meningkatkan peluang bahwa setiap rupiah belanja publik atau investasi swasta menghasilkan multiplier ekonomi dan sosial yang lebih besar.

Dimensi distribusi juga menentukan keberhasilan. Kebijakan yang menaikkan efisiensi rata-rata dapat menghasilkan pemenang dan pihak yang tertinggal. Oleh karena itu, prinsip inklusi tidak berarti menahan perubahan, tetapi memperluas kemampuan masyarakat untuk ikut memperoleh manfaat dari perubahan. Reskilling bagi pekerja terdampak, pembiayaan transisi bagi UMKM, perlindungan pendapatan sementara, serta layanan dasar yang berkualitas merupakan contoh instrumen yang membuat transformasi lebih adil. Dalam jangka panjang, pemerataan kesempatan yang baik justru memperbesar basis talenta, kewirausahaan dan permintaan domestik yang menopang pertumbuhan.

Untuk memastikan akuntabilitas, keberhasilan bagian ini sebaiknya dipantau melalui indikator seperti Gini, Palma ratio, wealth distribution, mobility indicators. Indikator output—misalnya jumlah program, pelatihan, proyek, atau penerima—tetap dibutuhkan untuk pengelolaan operasional, tetapi tidak boleh menggantikan outcome. Pertanyaan akhirnya adalah apakah masyarakat memiliki pendapatan riil lebih tinggi, pekerjaan lebih produktif, risiko ekonomi lebih rendah, akses layanan lebih baik, dan kesempatan mobilitas yang lebih besar. Ketika ukuran tersebut bergerak searah dengan pertumbuhan PDB, dapat dikatakan bahwa proses pemulihan mulai bertransformasi menjadi peningkatan taraf hidup yang substantif dan inklusif.

21. Kelas Menengah dan Keamanan Ekonomi Rumah Tangga

Kelas menengah yang kuat menopang konsumsi, pajak, inovasi dan stabilitas sosial merupakan inti persoalan yang dibahas pada bagian ini. Dalam kerangka pemulihan ekonomi Indonesia, pertanyaan penting bukan hanya seberapa cepat kegiatan ekonomi kembali berkembang, melainkan siapa yang memperoleh manfaat, melalui mekanisme apa, dan seberapa tahan manfaat tersebut terhadap guncangan berikutnya. Pertumbuhan agregat memang diperlukan karena tanpa perluasan basis produksi, ruang bagi penciptaan pendapatan dan penerimaan publik menjadi terbatas. Namun, kenaikan output baru menjadi pembangunan apabila menghasilkan kemampuan nyata bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan, meningkatkan keterampilan, menjaga kesehatan, membangun aset, dan merencanakan masa depan. Perspektif ini menempatkan taraf hidup sebagai hasil dari interaksi antara pasar kerja, struktur produksi, harga, layanan publik, aset rumah tangga, serta institusi.

Secara ekonomi, mekanismenya bekerja melalui beberapa jalur. Pertama, produksi yang meningkat menciptakan permintaan terhadap tenaga kerja, pemasok, jasa dan infrastruktur. Kedua, produktivitas yang lebih tinggi memperbesar ruang bagi kenaikan upah dan laba usaha. Ketiga, basis ekonomi yang melebar meningkatkan penerimaan fiskal yang dapat membiayai pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial dan infrastruktur. Keempat, proses tersebut membentuk ekspektasi dan investasi rumah tangga: ketika pendapatan lebih stabil, keluarga lebih berani menyekolahkan anak lebih lama, memperbaiki tempat tinggal, membeli alat produktif, atau memulai usaha. Akan tetapi, setiap jalur dapat terputus

oleh konsentrasi pasar, mismatch keterampilan, inflasi, informalitas, lemahnya layanan publik, atau ketimpangan akses terhadap modal dan teknologi.

Dalam konteks Indonesia, middle-income squeeze terjadi ketika pendapatan tumbuh lebih lambat daripada biaya kebutuhan aspiratif. Contoh ini penting karena menunjukkan bahwa kebijakan yang tampak berhasil pada tingkat makro dapat memiliki hasil berbeda pada tingkat rumah tangga. Satu wilayah dapat mencatat investasi tinggi tetapi kesempatan kerja lokal terbatas; daerah lain dapat menyerap banyak tenaga kerja tetapi berada pada pekerjaan berproduktivitas rendah. Dengan demikian, analisis perlu bergerak dari pertanyaan 'berapa besar pertumbuhan?' menuju 'bagaimana struktur pertumbuhan itu?', 'siapa yang berpartisipasi?', dan 'apakah pendapatan serta layanan yang diterima masyarakat meningkat secara riil?'. Pendekatan seperti ini juga menghindari jebakan melihat rata-rata nasional sebagai gambaran semua kelompok.

Arah kebijakan yang relevan adalah menurunkan biaya perumahan, kesehatan, pendidikan dan transportasi sambil meningkatkan pekerjaan formal berupah baik. Kebijakan tersebut sebaiknya tidak diperlakukan sebagai proyek tunggal, melainkan sebagai paket yang menghubungkan sisi permintaan dan sisi penawaran. Insentif investasi, misalnya, perlu disertai pengembangan pemasok, pelatihan pekerja, infrastruktur, pembiayaan dan standar kerja. Program pendidikan perlu tersambung dengan kebutuhan industri dan perubahan teknologi. Bantuan sosial perlu terhubung dengan layanan kesehatan, pendidikan, penempatan kerja atau dukungan usaha ketika kondisi penerima memungkinkan. Integrasi semacam ini meningkatkan peluang bahwa setiap rupiah belanja publik atau investasi swasta menghasilkan multiplier ekonomi dan sosial yang lebih besar.

Dimensi distribusi juga menentukan keberhasilan. Kebijakan yang menaikkan efisiensi rata-rata dapat menghasilkan pemenang dan pihak yang tertinggal. Oleh karena itu, prinsip inklusi tidak berarti menahan perubahan, tetapi memperluas kemampuan masyarakat untuk ikut memperoleh manfaat dari perubahan. Reskilling bagi pekerja terdampak, pembiayaan transisi bagi UMKM, perlindungan pendapatan sementara, serta layanan dasar yang berkualitas merupakan contoh instrumen yang membuat transformasi lebih adil. Dalam jangka panjang, pemerataan kesempatan yang baik justru memperbesar basis talenta, kewirausahaan dan permintaan domestik yang menopang pertumbuhan.

Untuk memastikan akuntabilitas, keberhasilan bagian ini sebaiknya dipantau melalui indikator seperti middle-class share, discretionary income, debt service, housing affordability. Indikator output—misalnya jumlah program, pelatihan, proyek, atau penerima—tetap dibutuhkan untuk pengelolaan operasional, tetapi tidak boleh menggantikan outcome. Pertanyaan akhirnya adalah apakah masyarakat memiliki pendapatan riil lebih tinggi, pekerjaan lebih produktif, risiko ekonomi lebih rendah, akses layanan lebih baik, dan kesempatan mobilitas yang lebih besar. Ketika ukuran tersebut bergerak searah dengan pertumbuhan PDB, dapat dikatakan bahwa proses pemulihan mulai bertransformasi menjadi peningkatan taraf hidup yang substantif dan inklusif.

22. Pemuda, School-to-Work Transition dan Mobilitas

Generasi muda membutuhkan jalur cepat dari pendidikan ke pekerjaan produktif merupakan inti persoalan yang dibahas pada bagian ini. Dalam kerangka pemulihan ekonomi Indonesia, pertanyaan penting bukan hanya seberapa cepat kegiatan ekonomi kembali berkembang, melainkan siapa yang

memperoleh manfaat, melalui mekanisme apa, dan seberapa tahan manfaat tersebut terhadap guncangan berikutnya. Pertumbuhan agregat memang diperlukan karena tanpa perluasan basis produksi, ruang bagi penciptaan pendapatan dan penerimaan publik menjadi terbatas. Namun, kenaikan output baru menjadi pembangunan apabila menghasilkan kemampuan nyata bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan, meningkatkan keterampilan, menjaga kesehatan, membangun aset, dan merencanakan masa depan. Perspektif ini menempatkan taraf hidup sebagai hasil dari interaksi antara pasar kerja, struktur produksi, harga, layanan publik, aset rumah tangga, serta institusi.

Secara ekonomi, mekanismenya bekerja melalui beberapa jalur. Pertama, produksi yang meningkat menciptakan permintaan terhadap tenaga kerja, pemasok, jasa dan infrastruktur. Kedua, produktivitas yang lebih tinggi memperbesar ruang bagi kenaikan upah dan laba usaha. Ketiga, basis ekonomi yang melebar meningkatkan penerimaan fiskal yang dapat membiayai pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial dan infrastruktur. Keempat, proses tersebut membentuk ekspektasi dan investasi rumah tangga: ketika pendapatan lebih stabil, keluarga lebih berani menyekolahkan anak lebih lama, memperbaiki tempat tinggal, membeli alat produktif, atau memulai usaha. Akan tetapi, setiap jalur dapat terputus oleh konsentrasi pasar, mismatch keterampilan, inflasi, informalitas, lemahnya layanan publik, atau ketimpangan akses terhadap modal dan teknologi.

Dalam konteks Indonesia, pengangguran usia muda dapat terjadi bersamaan dengan lowongan sulit terisi karena mismatch keterampilan dan lokasi. Contoh ini penting karena menunjukkan bahwa kebijakan yang tampak berhasil pada tingkat makro dapat memiliki hasil berbeda pada tingkat rumah tangga. Satu wilayah dapat mencatat investasi tinggi tetapi kesempatan kerja lokal terbatas; daerah lain dapat menyerap banyak tenaga kerja tetapi berada pada pekerjaan berproduktivitas rendah. Dengan demikian, analisis perlu bergerak dari pertanyaan 'berapa besar pertumbuhan?' menuju 'bagaimana struktur pertumbuhan itu?', 'siapa yang berpartisipasi?', dan 'apakah pendapatan serta layanan yang diterima masyarakat meningkat secara riil?'. Pendekatan seperti ini juga menghindari jebakan melihat rata-rata nasional sebagai gambaran semua kelompok.

Arah kebijakan yang relevan adalah memperkuat magang bermutu, career services, informasi pasar kerja, kewirausahaan dan kredensial yang diakui industri. Kebijakan tersebut sebaiknya tidak diperlakukan sebagai proyek tunggal, melainkan sebagai paket yang menghubungkan sisi permintaan dan sisi penawaran. Insentif investasi, misalnya, perlu disertai pengembangan pemasok, pelatihan pekerja, infrastruktur, pembiayaan dan standar kerja. Program pendidikan perlu tersambung dengan kebutuhan industri dan perubahan teknologi. Bantuan sosial perlu terhubung dengan layanan kesehatan, pendidikan, penempatan kerja atau dukungan usaha ketika kondisi penerima memungkinkan. Integrasi semacam ini meningkatkan peluang bahwa setiap rupiah belanja publik atau investasi swasta menghasilkan multiplier ekonomi dan sosial yang lebih besar.

Dimensi distribusi juga menentukan keberhasilan. Kebijakan yang menaikkan efisiensi rata-rata dapat menghasilkan pemenang dan pihak yang tertinggal. Oleh karena itu, prinsip inklusi tidak berarti menahan perubahan, tetapi memperluas kemampuan masyarakat untuk ikut memperoleh manfaat dari perubahan. Reskilling bagi pekerja terdampak, pembiayaan transisi bagi UMKM, perlindungan pendapatan sementara, serta layanan dasar yang berkualitas merupakan contoh instrumen yang

membuat transformasi lebih adil. Dalam jangka panjang, pemerataan kesempatan yang baik justru memperbesar basis talenta, kewirausahaan dan permintaan domestik yang menopang pertumbuhan.

Untuk memastikan akuntabilitas, keberhasilan bagian ini sebaiknya dipantau melalui indikator seperti youth unemployment, NEET, time-to-first-job, graduate wage. Indikator output—misalnya jumlah program, pelatihan, proyek, atau penerima—tetap dibutuhkan untuk pengelolaan operasional, tetapi tidak boleh menggantikan outcome. Pertanyaan akhirnya adalah apakah masyarakat memiliki pendapatan riil lebih tinggi, pekerjaan lebih produktif, risiko ekonomi lebih rendah, akses layanan lebih baik, dan kesempatan mobilitas yang lebih besar. Ketika ukuran tersebut bergerak searah dengan pertumbuhan PDB, dapat dikatakan bahwa proses pemulihan mulai bertransformasi menjadi peningkatan taraf hidup yang substantif dan inklusif.

23. Perempuan dan Ekonomi Perawatan

Partisipasi perempuan dibentuk oleh kesempatan kerja, norma sosial dan beban perawatan tidak berbayar merupakan inti persoalan yang dibahas pada bagian ini. Dalam kerangka pemulihan ekonomi Indonesia, pertanyaan penting bukan hanya seberapa cepat kegiatan ekonomi kembali berkembang, melainkan siapa yang memperoleh manfaat, melalui mekanisme apa, dan seberapa tahan manfaat tersebut terhadap guncangan berikutnya. Pertumbuhan agregat memang diperlukan karena tanpa perluasan basis produksi, ruang bagi penciptaan pendapatan dan penerimaan publik menjadi terbatas. Namun, kenaikan output baru menjadi pembangunan apabila menghasilkan kemampuan nyata bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan, meningkatkan keterampilan, menjaga kesehatan, membangun aset, dan merencanakan masa depan. Perspektif ini menempatkan taraf hidup sebagai hasil dari interaksi antara pasar kerja, struktur produksi, harga, layanan publik, aset rumah tangga, serta institusi.

Secara ekonomi, mekanismenya bekerja melalui beberapa jalur. Pertama, produksi yang meningkat menciptakan permintaan terhadap tenaga kerja, pemasok, jasa dan infrastruktur. Kedua, produktivitas yang lebih tinggi memperbesar ruang bagi kenaikan upah dan laba usaha. Ketiga, basis ekonomi yang melebar meningkatkan penerimaan fiskal yang dapat membiayai pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial dan infrastruktur. Keempat, proses tersebut membentuk ekspektasi dan investasi rumah tangga: ketika pendapatan lebih stabil, keluarga lebih berani menyekolahkan anak lebih lama, memperbaiki tempat tinggal, membeli alat produktif, atau memulai usaha. Akan tetapi, setiap jalur dapat terputus oleh konsentrasi pasar, mismatch keterampilan, inflasi, informalitas, lemahnya layanan publik, atau ketimpangan akses terhadap modal dan teknologi.

Dalam konteks Indonesia, investasi care economy menciptakan pekerjaan sekaligus membebaskan waktu perempuan untuk berpartisipasi di pasar kerja. Contoh ini penting karena menunjukkan bahwa kebijakan yang tampak berhasil pada tingkat makro dapat memiliki hasil berbeda pada tingkat rumah tangga. Satu wilayah dapat mencatat investasi tinggi tetapi kesempatan kerja lokal terbatas; daerah lain dapat menyerap banyak tenaga kerja tetapi berada pada pekerjaan berproduktivitas rendah. Dengan demikian, analisis perlu bergerak dari pertanyaan 'berapa besar pertumbuhan?' menuju 'bagaimana struktur pertumbuhan itu?', 'siapa yang berpartisipasi?', dan 'apakah pendapatan serta

layanan yang diterima masyarakat meningkat secara riil?'. Pendekatan seperti ini juga menghindari jebakan melihat rata-rata nasional sebagai gambaran semua kelompok.

Arah kebijakan yang relevan adalah memperluas childcare, transportasi aman, kerja fleksibel yang terlindungi dan peluang kepemimpinan. Kebijakan tersebut sebaiknya tidak diperlakukan sebagai proyek tunggal, melainkan sebagai paket yang menghubungkan sisi permintaan dan sisi penawaran. Insentif investasi, misalnya, perlu disertai pengembangan pemasok, pelatihan pekerja, infrastruktur, pembiayaan dan standar kerja. Program pendidikan perlu tersambung dengan kebutuhan industri dan perubahan teknologi. Bantuan sosial perlu terhubung dengan layanan kesehatan, pendidikan, penempatan kerja atau dukungan usaha ketika kondisi penerima memungkinkan. Integrasi semacam ini meningkatkan peluang bahwa setiap rupiah belanja publik atau investasi swasta menghasilkan multiplier ekonomi dan sosial yang lebih besar.

Dimensi distribusi juga menentukan keberhasilan. Kebijakan yang menaikkan efisiensi rata-rata dapat menghasilkan pemenang dan pihak yang tertinggal. Oleh karena itu, prinsip inklusi tidak berarti menahan perubahan, tetapi memperluas kemampuan masyarakat untuk ikut memperoleh manfaat dari perubahan. Reskilling bagi pekerja terdampak, pembiayaan transisi bagi UMKM, perlindungan pendapatan sementara, serta layanan dasar yang berkualitas merupakan contoh instrumen yang membuat transformasi lebih adil. Dalam jangka panjang, pemerataan kesempatan yang baik justru memperbesar basis talenta, kewirausahaan dan permintaan domestik yang menopang pertumbuhan.

Untuk memastikan akuntabilitas, keberhasilan bagian ini sebaiknya dipantau melalui indikator seperti female LFPR, gender wage gap, childcare access, unpaid care hours. Indikator output—misalnya jumlah program, pelatihan, proyek, atau penerima—tetap dibutuhkan untuk pengelolaan operasional, tetapi tidak boleh menggantikan outcome. Pertanyaan akhirnya adalah apakah masyarakat memiliki pendapatan riil lebih tinggi, pekerjaan lebih produktif, risiko ekonomi lebih rendah, akses layanan lebih baik, dan kesempatan mobilitas yang lebih besar. Ketika ukuran tersebut bergerak searah dengan pertumbuhan PDB, dapat dikatakan bahwa proses pemulihan mulai bertransformasi menjadi peningkatan taraf hidup yang substantif dan inklusif.

24. Perumahan Layak sebagai Komponen Taraf Hidup

Rumah adalah aset, sumber keamanan, lokasi akses kerja dan salah satu pengeluaran terbesar rumah tangga merupakan inti persoalan yang dibahas pada bagian ini. Dalam kerangka pemulihan ekonomi Indonesia, pertanyaan penting bukan hanya seberapa cepat kegiatan ekonomi kembali berkembang, melainkan siapa yang memperoleh manfaat, melalui mekanisme apa, dan seberapa tahan manfaat tersebut terhadap guncangan berikutnya. Pertumbuhan agregat memang diperlukan karena tanpa perluasan basis produksi, ruang bagi penciptaan pendapatan dan penerimaan publik menjadi terbatas. Namun, kenaikan output baru menjadi pembangunan apabila menghasilkan kemampuan nyata bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan, meningkatkan keterampilan, menjaga kesehatan, membangun aset, dan merencanakan masa depan. Perspektif ini menempatkan taraf hidup sebagai hasil dari interaksi antara pasar kerja, struktur produksi, harga, layanan publik, aset rumah tangga, serta institusi.

Secara ekonomi, mekanismenya bekerja melalui beberapa jalur. Pertama, produksi yang meningkat menciptakan permintaan terhadap tenaga kerja, pemasok, jasa dan infrastruktur. Kedua, produktivitas yang lebih tinggi memperbesar ruang bagi kenaikan upah dan laba usaha. Ketiga, basis ekonomi yang melebar meningkatkan penerimaan fiskal yang dapat membiayai pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial dan infrastruktur. Keempat, proses tersebut membentuk ekspektasi dan investasi rumah tangga: ketika pendapatan lebih stabil, keluarga lebih berani menyekolahkan anak lebih lama, memperbaiki tempat tinggal, membeli alat produktif, atau memulai usaha. Akan tetapi, setiap jalur dapat terputus oleh konsentrasi pasar, mismatch keterampilan, inflasi, informalitas, lemahnya layanan publik, atau ketimpangan akses terhadap modal dan teknologi.

Dalam konteks Indonesia, rumah murah yang jauh dari pekerjaan dapat menjadi mahal jika biaya dan waktu perjalanan sangat tinggi. Contoh ini penting karena menunjukkan bahwa kebijakan yang tampak berhasil pada tingkat makro dapat memiliki hasil berbeda pada tingkat rumah tangga. Satu wilayah dapat mencatat investasi tinggi tetapi kesempatan kerja lokal terbatas; daerah lain dapat menyerap banyak tenaga kerja tetapi berada pada pekerjaan berproduktivitas rendah. Dengan demikian, analisis perlu bergerak dari pertanyaan 'berapa besar pertumbuhan?' menuju 'bagaimana struktur pertumbuhan itu?', 'siapa yang berpartisipasi?', dan 'apakah pendapatan serta layanan yang diterima masyarakat meningkat secara riil?'. Pendekatan seperti ini juga menghindari jebakan melihat rata-rata nasional sebagai gambaran semua kelompok.

Arah kebijakan yang relevan adalah menggabungkan perumahan terjangkau dengan tata ruang, transportasi, sanitasi dan pembiayaan yang prudent. Kebijakan tersebut sebaiknya tidak diperlakukan sebagai proyek tunggal, melainkan sebagai paket yang menghubungkan sisi permintaan dan sisi penawaran. Insentif investasi, misalnya, perlu disertai pengembangan pemasok, pelatihan pekerja, infrastruktur, pembiayaan dan standar kerja. Program pendidikan perlu tersambung dengan kebutuhan industri dan perubahan teknologi. Bantuan sosial perlu terhubung dengan layanan kesehatan, pendidikan, penempatan kerja atau dukungan usaha ketika kondisi penerima memungkinkan. Integrasi semacam ini meningkatkan peluang bahwa setiap rupiah belanja publik atau investasi swasta menghasilkan multiplier ekonomi dan sosial yang lebih besar.

Dimensi distribusi juga menentukan keberhasilan. Kebijakan yang menaikkan efisiensi rata-rata dapat menghasilkan pemenang dan pihak yang tertinggal. Oleh karena itu, prinsip inklusi tidak berarti menahan perubahan, tetapi memperluas kemampuan masyarakat untuk ikut memperoleh manfaat dari perubahan. Reskilling bagi pekerja terdampak, pembiayaan transisi bagi UMKM, perlindungan pendapatan sementara, serta layanan dasar yang berkualitas merupakan contoh instrumen yang membuat transformasi lebih adil. Dalam jangka panjang, pemerataan kesempatan yang baik justru memperbesar basis talenta, kewirausahaan dan permintaan domestik yang menopang pertumbuhan.

Untuk memastikan akuntabilitas, keberhasilan bagian ini sebaiknya dipantau melalui indikator seperti housing cost burden, commute time, overcrowding, mortgage access. Indikator output—misalnya jumlah program, pelatihan, proyek, atau penerima—tetap dibutuhkan untuk pengelolaan operasional, tetapi tidak boleh menggantikan outcome. Pertanyaan akhirnya adalah apakah masyarakat memiliki pendapatan riil lebih tinggi, pekerjaan lebih produktif, risiko ekonomi lebih rendah, akses layanan lebih baik, dan kesempatan mobilitas yang lebih besar. Ketika ukuran tersebut bergerak searah dengan

pertumbuhan PDB, dapat dikatakan bahwa proses pemulihan mulai bertransformasi menjadi peningkatan taraf hidup yang substantif dan inklusif.

25. Transportasi, Mobilitas dan Biaya Hidup

Akses pekerjaan dan layanan sangat dipengaruhi oleh biaya serta waktu mobilitas merupakan inti persoalan yang dibahas pada bagian ini. Dalam kerangka pemulihan ekonomi Indonesia, pertanyaan penting bukan hanya seberapa cepat kegiatan ekonomi kembali berkembang, melainkan siapa yang memperoleh manfaat, melalui mekanisme apa, dan seberapa tahan manfaat tersebut terhadap guncangan berikutnya. Pertumbuhan agregat memang diperlukan karena tanpa perluasan basis produksi, ruang bagi penciptaan pendapatan dan penerimaan publik menjadi terbatas. Namun, kenaikan output baru menjadi pembangunan apabila menghasilkan kemampuan nyata bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan, meningkatkan keterampilan, menjaga kesehatan, membangun aset, dan merencanakan masa depan. Perspektif ini menempatkan taraf hidup sebagai hasil dari interaksi antara pasar kerja, struktur produksi, harga, layanan publik, aset rumah tangga, serta institusi.

Secara ekonomi, mekanismenya bekerja melalui beberapa jalur. Pertama, produksi yang meningkat menciptakan permintaan terhadap tenaga kerja, pemasok, jasa dan infrastruktur. Kedua, produktivitas yang lebih tinggi memperbesar ruang bagi kenaikan upah dan laba usaha. Ketiga, basis ekonomi yang melebar meningkatkan penerimaan fiskal yang dapat membiayai pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial dan infrastruktur. Keempat, proses tersebut membentuk ekspektasi dan investasi rumah tangga: ketika pendapatan lebih stabil, keluarga lebih berani menyekolahkan anak lebih lama, memperbaiki tempat tinggal, membeli alat produktif, atau memulai usaha. Akan tetapi, setiap jalur dapat terputus oleh konsentrasi pasar, mismatch keterampilan, inflasi, informalitas, lemahnya layanan publik, atau ketimpangan akses terhadap modal dan teknologi.

Dalam konteks Indonesia, pengurangan waktu perjalanan meningkatkan waktu produktif dan kualitas hidup, khususnya bagi pekerja berpendapatan rendah. Contoh ini penting karena menunjukkan bahwa kebijakan yang tampak berhasil pada tingkat makro dapat memiliki hasil berbeda pada tingkat rumah tangga. Satu wilayah dapat mencatat investasi tinggi tetapi kesempatan kerja lokal terbatas; daerah lain dapat menyerap banyak tenaga kerja tetapi berada pada pekerjaan berproduktivitas rendah. Dengan demikian, analisis perlu bergerak dari pertanyaan 'berapa besar pertumbuhan?' menuju 'bagaimana struktur pertumbuhan itu?', 'siapa yang berpartisipasi?', dan 'apakah pendapatan serta layanan yang diterima masyarakat meningkat secara riil?'. Pendekatan seperti ini juga menghindari jebakan melihat rata-rata nasional sebagai gambaran semua kelompok.

Arah kebijakan yang relevan adalah memprioritaskan angkutan umum, konektivitas multimoda dan tata ruang berorientasi transit. Kebijakan tersebut sebaiknya tidak diperlakukan sebagai proyek tunggal, melainkan sebagai paket yang menghubungkan sisi permintaan dan sisi penawaran. Insentif investasi, misalnya, perlu disertai pengembangan pemasok, pelatihan pekerja, infrastruktur, pembiayaan dan standar kerja. Program pendidikan perlu tersambung dengan kebutuhan industri dan perubahan teknologi. Bantuan sosial perlu terhubung dengan layanan kesehatan, pendidikan, penempatan kerja atau dukungan usaha ketika kondisi penerima memungkinkan. Integrasi semacam ini meningkatkan

peluang bahwa setiap rupiah belanja publik atau investasi swasta menghasilkan multiplier ekonomi dan sosial yang lebih besar.

Dimensi distribusi juga menentukan keberhasilan. Kebijakan yang menaikkan efisiensi rata-rata dapat menghasilkan pemenang dan pihak yang tertinggal. Oleh karena itu, prinsip inklusi tidak berarti menahan perubahan, tetapi memperluas kemampuan masyarakat untuk ikut memperoleh manfaat dari perubahan. Reskilling bagi pekerja terdampak, pembiayaan transisi bagi UMKM, perlindungan pendapatan sementara, serta layanan dasar yang berkualitas merupakan contoh instrumen yang membuat transformasi lebih adil. Dalam jangka panjang, pemerataan kesempatan yang baik justru memperbesar basis talenta, kewirausahaan dan permintaan domestik yang menopang pertumbuhan.

Untuk memastikan akuntabilitas, keberhasilan bagian ini sebaiknya dipantau melalui indikator seperti modal share, commuting cost, travel time, accessibility index. Indikator output—misalnya jumlah program, pelatihan, proyek, atau penerima—tetap dibutuhkan untuk pengelolaan operasional, tetapi tidak boleh menggantikan outcome. Pertanyaan akhirnya adalah apakah masyarakat memiliki pendapatan riil lebih tinggi, pekerjaan lebih produktif, risiko ekonomi lebih rendah, akses layanan lebih baik, dan kesempatan mobilitas yang lebih besar. Ketika ukuran tersebut bergerak searah dengan pertumbuhan PDB, dapat dikatakan bahwa proses pemulihan mulai bertransformasi menjadi peningkatan taraf hidup yang substantif dan inklusif.

26. Pangan, Inflasi dan Kesejahteraan Riil

Kelompok berpendapatan rendah membelanjakan porsi besar pendapatan untuk pangan sehingga inflasi pangan sangat menentukan merupakan inti persoalan yang dibahas pada bagian ini. Dalam kerangka pemulihan ekonomi Indonesia, pertanyaan penting bukan hanya seberapa cepat kegiatan ekonomi kembali berkembang, melainkan siapa yang memperoleh manfaat, melalui mekanisme apa, dan seberapa tahan manfaat tersebut terhadap guncangan berikutnya. Pertumbuhan agregat memang diperlukan karena tanpa perluasan basis produksi, ruang bagi penciptaan pendapatan dan penerimaan publik menjadi terbatas. Namun, kenaikan output baru menjadi pembangunan apabila menghasilkan kemampuan nyata bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan, meningkatkan keterampilan, menjaga kesehatan, membangun aset, dan merencanakan masa depan. Perspektif ini menempatkan taraf hidup sebagai hasil dari interaksi antara pasar kerja, struktur produksi, harga, layanan publik, aset rumah tangga, serta institusi.

Secara ekonomi, mekanismenya bekerja melalui beberapa jalur. Pertama, produksi yang meningkat menciptakan permintaan terhadap tenaga kerja, pemasok, jasa dan infrastruktur. Kedua, produktivitas yang lebih tinggi memperbesar ruang bagi kenaikan upah dan laba usaha. Ketiga, basis ekonomi yang melebar meningkatkan penerimaan fiskal yang dapat membiayai pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial dan infrastruktur. Keempat, proses tersebut membentuk ekspektasi dan investasi rumah tangga: ketika pendapatan lebih stabil, keluarga lebih berani menyekolahkan anak lebih lama, memperbaiki tempat tinggal, membeli alat produktif, atau memulai usaha. Akan tetapi, setiap jalur dapat terputus oleh konsentrasi pasar, mismatch keterampilan, inflasi, informalitas, lemahnya layanan publik, atau ketimpangan akses terhadap modal dan teknologi.

Dalam konteks Indonesia, stabilitas harga tidak harus dicapai dengan menekan pendapatan petani; kebijakan harus menaikkan efisiensi rantai nilai. Contoh ini penting karena menunjukkan bahwa kebijakan yang tampak berhasil pada tingkat makro dapat memiliki hasil berbeda pada tingkat rumah tangga. Satu wilayah dapat mencatat investasi tinggi tetapi kesempatan kerja lokal terbatas; daerah lain dapat menyerap banyak tenaga kerja tetapi berada pada pekerjaan berproduktivitas rendah. Dengan demikian, analisis perlu bergerak dari pertanyaan 'berapa besar pertumbuhan?' menuju 'bagaimana struktur pertumbuhan itu?', 'siapa yang berpartisipasi?', dan 'apakah pendapatan serta layanan yang diterima masyarakat meningkat secara riil?'. Pendekatan seperti ini juga menghindari jebakan melihat rata-rata nasional sebagai gambaran semua kelompok.

Arah kebijakan yang relevan adalah memperbaiki produktivitas pertanian, logistik, cadangan, informasi pasar dan perlindungan konsumen. Kebijakan tersebut sebaiknya tidak diperlakukan sebagai proyek tunggal, melainkan sebagai paket yang menghubungkan sisi permintaan dan sisi penawaran. Insentif investasi, misalnya, perlu disertai pengembangan pemasok, pelatihan pekerja, infrastruktur, pembiayaan dan standar kerja. Program pendidikan perlu tersambung dengan kebutuhan industri dan perubahan teknologi. Bantuan sosial perlu terhubung dengan layanan kesehatan, pendidikan, penempatan kerja atau dukungan usaha ketika kondisi penerima memungkinkan. Integrasi semacam ini meningkatkan peluang bahwa setiap rupiah belanja publik atau investasi swasta menghasilkan multiplier ekonomi dan sosial yang lebih besar.

Dimensi distribusi juga menentukan keberhasilan. Kebijakan yang menaikkan efisiensi rata-rata dapat menghasilkan pemenang dan pihak yang tertinggal. Oleh karena itu, prinsip inklusi tidak berarti menahan perubahan, tetapi memperluas kemampuan masyarakat untuk ikut memperoleh manfaat dari perubahan. Reskilling bagi pekerja terdampak, pembiayaan transisi bagi UMKM, perlindungan pendapatan sementara, serta layanan dasar yang berkualitas merupakan contoh instrumen yang membuat transformasi lebih adil. Dalam jangka panjang, pemerataan kesempatan yang baik justru memperbesar basis talenta, kewirausahaan dan permintaan domestik yang menopang pertumbuhan.

Untuk memastikan akuntabilitas, keberhasilan bagian ini sebaiknya dipantau melalui indikator seperti food inflation, farmgate-retail spread, dietary diversity, food insecurity. Indikator output—misalnya jumlah program, pelatihan, proyek, atau penerima—tetap dibutuhkan untuk pengelolaan operasional, tetapi tidak boleh menggantikan outcome. Pertanyaan akhirnya adalah apakah masyarakat memiliki pendapatan riil lebih tinggi, pekerjaan lebih produktif, risiko ekonomi lebih rendah, akses layanan lebih baik, dan kesempatan mobilitas yang lebih besar. Ketika ukuran tersebut bergerak searah dengan pertumbuhan PDB, dapat dikatakan bahwa proses pemulihan mulai bertransformasi menjadi peningkatan taraf hidup yang substantif dan inklusif.

27. Keuangan Inklusif dan Pembentukan Aset

Akses transaksi, tabungan, kredit dan asuransi membantu rumah tangga mengelola risiko dan berinvestasi merupakan inti persoalan yang dibahas pada bagian ini. Dalam kerangka pemulihan ekonomi Indonesia, pertanyaan penting bukan hanya seberapa cepat kegiatan ekonomi kembali berkembang, melainkan siapa yang memperoleh manfaat, melalui mekanisme apa, dan seberapa tahan manfaat tersebut terhadap guncangan berikutnya. Pertumbuhan agregat memang diperlukan

karena tanpa perluasan basis produksi, ruang bagi penciptaan pendapatan dan penerimaan publik menjadi terbatas. Namun, kenaikan output baru menjadi pembangunan apabila menghasilkan kemampuan nyata bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan, meningkatkan keterampilan, menjaga kesehatan, membangun aset, dan merencanakan masa depan. Perspektif ini menempatkan taraf hidup sebagai hasil dari interaksi antara pasar kerja, struktur produksi, harga, layanan publik, aset rumah tangga, serta institusi.

Secara ekonomi, mekanismenya bekerja melalui beberapa jalur. Pertama, produksi yang meningkat menciptakan permintaan terhadap tenaga kerja, pemasok, jasa dan infrastruktur. Kedua, produktivitas yang lebih tinggi memperbesar ruang bagi kenaikan upah dan laba usaha. Ketiga, basis ekonomi yang melebar meningkatkan penerimaan fiskal yang dapat membiayai pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial dan infrastruktur. Keempat, proses tersebut membentuk ekspektasi dan investasi rumah tangga: ketika pendapatan lebih stabil, keluarga lebih berani menyekolahkan anak lebih lama, memperbaiki tempat tinggal, membeli alat produktif, atau memulai usaha. Akan tetapi, setiap jalur dapat terputus oleh konsentrasi pasar, mismatch keterampilan, inflasi, informalitas, lemahnya layanan publik, atau ketimpangan akses terhadap modal dan teknologi.

Dalam konteks Indonesia, kredit produktif dapat menaikkan pendapatan, sedangkan kredit konsumtif berbiaya tinggi dapat memperburuk kerentanan. Contoh ini penting karena menunjukkan bahwa kebijakan yang tampak berhasil pada tingkat makro dapat memiliki hasil berbeda pada tingkat rumah tangga. Satu wilayah dapat mencatat investasi tinggi tetapi kesempatan kerja lokal terbatas; daerah lain dapat menyerap banyak tenaga kerja tetapi berada pada pekerjaan berproduktivitas rendah. Dengan demikian, analisis perlu bergerak dari pertanyaan 'berapa besar pertumbuhan?' menuju 'bagaimana struktur pertumbuhan itu?', 'siapa yang berpartisipasi?', dan 'apakah pendapatan serta layanan yang diterima masyarakat meningkat secara riil?'. Pendekatan seperti ini juga menghindari jebakan melihat rata-rata nasional sebagai gambaran semua kelompok.

Arah kebijakan yang relevan adalah memperluas layanan keuangan yang bertanggung jawab dan mencegah over-indebtedness. Kebijakan tersebut sebaiknya tidak diperlakukan sebagai proyek tunggal, melainkan sebagai paket yang menghubungkan sisi permintaan dan sisi penawaran. Insentif investasi, misalnya, perlu disertai pengembangan pemasok, pelatihan pekerja, infrastruktur, pembiayaan dan standar kerja. Program pendidikan perlu tersambung dengan kebutuhan industri dan perubahan teknologi. Bantuan sosial perlu terhubung dengan layanan kesehatan, pendidikan, penempatan kerja atau dukungan usaha ketika kondisi penerima memungkinkan. Integrasi semacam ini meningkatkan peluang bahwa setiap rupiah belanja publik atau investasi swasta menghasilkan multiplier ekonomi dan sosial yang lebih besar.

Dimensi distribusi juga menentukan keberhasilan. Kebijakan yang menaikkan efisiensi rata-rata dapat menghasilkan pemenang dan pihak yang tertinggal. Oleh karena itu, prinsip inklusi tidak berarti menahan perubahan, tetapi memperluas kemampuan masyarakat untuk ikut memperoleh manfaat dari perubahan. Reskilling bagi pekerja terdampak, pembiayaan transisi bagi UMKM, perlindungan pendapatan sementara, serta layanan dasar yang berkualitas merupakan contoh instrumen yang membuat transformasi lebih adil. Dalam jangka panjang, pemerataan kesempatan yang baik justru memperbesar basis talenta, kewirausahaan dan permintaan domestik yang menopang pertumbuhan.

Untuk memastikan akuntabilitas, keberhasilan bagian ini sebaiknya dipantau melalui indikator seperti account ownership, productive credit, insurance coverage, NPL, debt burden. Indikator output—misalnya jumlah program, pelatihan, proyek, atau penerima—tetap dibutuhkan untuk pengelolaan operasional, tetapi tidak boleh menggantikan outcome. Pertanyaan akhirnya adalah apakah masyarakat memiliki pendapatan riil lebih tinggi, pekerjaan lebih produktif, risiko ekonomi lebih rendah, akses layanan lebih baik, dan kesempatan mobilitas yang lebih besar. Ketika ukuran tersebut bergerak searah dengan pertumbuhan PDB, dapat dikatakan bahwa proses pemulihan mulai bertransformasi menjadi peningkatan taraf hidup yang substantif dan inklusif.

28. Kebijakan Fiskal dan Kualitas Belanja Publik

Anggaran menghubungkan pertumbuhan ekonomi dengan layanan publik dan redistribusi merupakan inti persoalan yang dibahas pada bagian ini. Dalam kerangka pemulihan ekonomi Indonesia, pertanyaan penting bukan hanya seberapa cepat kegiatan ekonomi kembali berkembang, melainkan siapa yang memperoleh manfaat, melalui mekanisme apa, dan seberapa tahan manfaat tersebut terhadap guncangan berikutnya. Pertumbuhan agregat memang diperlukan karena tanpa perluasan basis produksi, ruang bagi penciptaan pendapatan dan penerimaan publik menjadi terbatas. Namun, kenaikan output baru menjadi pembangunan apabila menghasilkan kemampuan nyata bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan, meningkatkan keterampilan, menjaga kesehatan, membangun aset, dan merencanakan masa depan. Perspektif ini menempatkan taraf hidup sebagai hasil dari interaksi antara pasar kerja, struktur produksi, harga, layanan publik, aset rumah tangga, serta institusi.

Secara ekonomi, mekanismenya bekerja melalui beberapa jalur. Pertama, produksi yang meningkat menciptakan permintaan terhadap tenaga kerja, pemasok, jasa dan infrastruktur. Kedua, produktivitas yang lebih tinggi memperbesar ruang bagi kenaikan upah dan laba usaha. Ketiga, basis ekonomi yang melebar meningkatkan penerimaan fiskal yang dapat membiayai pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial dan infrastruktur. Keempat, proses tersebut membentuk ekspektasi dan investasi rumah tangga: ketika pendapatan lebih stabil, keluarga lebih berani menyekolahkan anak lebih lama, memperbaiki tempat tinggal, membeli alat produktif, atau memulai usaha. Akan tetapi, setiap jalur dapat terputus oleh konsentrasi pasar, mismatch keterampilan, inflasi, informalitas, lemahnya layanan publik, atau ketimpangan akses terhadap modal dan teknologi.

Dalam konteks Indonesia, belanja yang besar tidak identik dengan dampak tinggi bila desain, pengadaan, target dan evaluasi lemah. Contoh ini penting karena menunjukkan bahwa kebijakan yang tampak berhasil pada tingkat makro dapat memiliki hasil berbeda pada tingkat rumah tangga. Satu wilayah dapat mencatat investasi tinggi tetapi kesempatan kerja lokal terbatas; daerah lain dapat menyerap banyak tenaga kerja tetapi berada pada pekerjaan berproduktivitas rendah. Dengan demikian, analisis perlu bergerak dari pertanyaan 'berapa besar pertumbuhan?' menuju 'bagaimana struktur pertumbuhan itu?', 'siapa yang berpartisipasi?', dan 'apakah pendapatan serta layanan yang diterima masyarakat meningkat secara riil?'. Pendekatan seperti ini juga menghindari jebakan melihat rata-rata nasional sebagai gambaran semua kelompok.

Arah kebijakan yang relevan adalah menggeser fokus dari penyerapan anggaran menuju outcome pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan perlindungan sosial. Kebijakan tersebut sebaiknya tidak diperlakukan sebagai proyek tunggal, melainkan sebagai paket yang menghubungkan sisi permintaan dan sisi penawaran. Insentif investasi, misalnya, perlu disertai pengembangan pemasok, pelatihan pekerja, infrastruktur, pembiayaan dan standar kerja. Program pendidikan perlu tersambung dengan kebutuhan industri dan perubahan teknologi. Bantuan sosial perlu terhubung dengan layanan kesehatan, pendidikan, penempatan kerja atau dukungan usaha ketika kondisi penerima memungkinkan. Integrasi semacam ini meningkatkan peluang bahwa setiap rupiah belanja publik atau investasi swasta menghasilkan multiplier ekonomi dan sosial yang lebih besar.

Dimensi distribusi juga menentukan keberhasilan. Kebijakan yang menaikkan efisiensi rata-rata dapat menghasilkan pemenang dan pihak yang tertinggal. Oleh karena itu, prinsip inklusi tidak berarti menahan perubahan, tetapi memperluas kemampuan masyarakat untuk ikut memperoleh manfaat dari perubahan. Reskilling bagi pekerja terdampak, pembiayaan transisi bagi UMKM, perlindungan pendapatan sementara, serta layanan dasar yang berkualitas merupakan contoh instrumen yang membuat transformasi lebih adil. Dalam jangka panjang, pemerataan kesempatan yang baik justru memperbesar basis talenta, kewirausahaan dan permintaan domestik yang menopang pertumbuhan.

Untuk memastikan akuntabilitas, keberhasilan bagian ini sebaiknya dipantau melalui indikator seperti spending efficiency, benefit incidence, tax ratio, outcome per rupiah. Indikator output—misalnya jumlah program, pelatihan, proyek, atau penerima—tetap dibutuhkan untuk pengelolaan operasional, tetapi tidak boleh menggantikan outcome. Pertanyaan akhirnya adalah apakah masyarakat memiliki pendapatan riil lebih tinggi, pekerjaan lebih produktif, risiko ekonomi lebih rendah, akses layanan lebih baik, dan kesempatan mobilitas yang lebih besar. Ketika ukuran tersebut bergerak searah dengan pertumbuhan PDB, dapat dikatakan bahwa proses pemulihan mulai bertransformasi menjadi peningkatan taraf hidup yang substantif dan inklusif.

29. Pajak, Kepatuhan dan Kontrak Sosial

Penerimaan yang memadai diperlukan untuk membiayai layanan dan investasi sosial secara berkelanjutan merupakan inti persoalan yang dibahas pada bagian ini. Dalam kerangka pemulihan ekonomi Indonesia, pertanyaan penting bukan hanya seberapa cepat kegiatan ekonomi kembali berkembang, melainkan siapa yang memperoleh manfaat, melalui mekanisme apa, dan seberapa tahan manfaat tersebut terhadap guncangan berikutnya. Pertumbuhan agregat memang diperlukan karena tanpa perluasan basis produksi, ruang bagi penciptaan pendapatan dan penerimaan publik menjadi terbatas. Namun, kenaikan output baru menjadi pembangunan apabila menghasilkan kemampuan nyata bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan, meningkatkan keterampilan, menjaga kesehatan, membangun aset, dan merencanakan masa depan. Perspektif ini menempatkan taraf hidup sebagai hasil dari interaksi antara pasar kerja, struktur produksi, harga, layanan publik, aset rumah tangga, serta institusi.

Secara ekonomi, mekanismenya bekerja melalui beberapa jalur. Pertama, produksi yang meningkat menciptakan permintaan terhadap tenaga kerja, pemasok, jasa dan infrastruktur. Kedua, produktivitas yang lebih tinggi memperbesar ruang bagi kenaikan upah dan laba usaha. Ketiga, basis ekonomi yang

melebar meningkatkan penerimaan fiskal yang dapat membiayai pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial dan infrastruktur. Keempat, proses tersebut membentuk ekspektasi dan investasi rumah tangga: ketika pendapatan lebih stabil, keluarga lebih berani menyekolahkan anak lebih lama, memperbaiki tempat tinggal, membeli alat produktif, atau memulai usaha. Akan tetapi, setiap jalur dapat terputus oleh konsentrasi pasar, mismatch keterampilan, inflasi, informalitas, lemahnya layanan publik, atau ketimpangan akses terhadap modal dan teknologi.

Dalam konteks Indonesia, kepatuhan lebih kuat bila masyarakat melihat hubungan antara pajak, layanan bermutu dan integritas pemerintah. Contoh ini penting karena menunjukkan bahwa kebijakan yang tampak berhasil pada tingkat makro dapat memiliki hasil berbeda pada tingkat rumah tangga. Satu wilayah dapat mencatat investasi tinggi tetapi kesempatan kerja lokal terbatas; daerah lain dapat menyerap banyak tenaga kerja tetapi berada pada pekerjaan berproduktivitas rendah. Dengan demikian, analisis perlu bergerak dari pertanyaan 'berapa besar pertumbuhan?' menuju 'bagaimana struktur pertumbuhan itu?', 'siapa yang berpartisipasi?', dan 'apakah pendapatan serta layanan yang diterima masyarakat meningkat secara riil?'. Pendekatan seperti ini juga menghindari jebakan melihat rata-rata nasional sebagai gambaran semua kelompok.

Arah kebijakan yang relevan adalah memperluas basis pajak dengan administrasi digital, kepastian hukum dan keadilan horizontal-vertikal. Kebijakan tersebut sebaiknya tidak diperlakukan sebagai proyek tunggal, melainkan sebagai paket yang menghubungkan sisi permintaan dan sisi penawaran. Insentif investasi, misalnya, perlu disertai pengembangan pemasok, pelatihan pekerja, infrastruktur, pembiayaan dan standar kerja. Program pendidikan perlu tersambung dengan kebutuhan industri dan perubahan teknologi. Bantuan sosial perlu terhubung dengan layanan kesehatan, pendidikan, penempatan kerja atau dukungan usaha ketika kondisi penerima memungkinkan. Integrasi semacam ini meningkatkan peluang bahwa setiap rupiah belanja publik atau investasi swasta menghasilkan multiplier ekonomi dan sosial yang lebih besar.

Dimensi distribusi juga menentukan keberhasilan. Kebijakan yang menaikkan efisiensi rata-rata dapat menghasilkan pemenang dan pihak yang tertinggal. Oleh karena itu, prinsip inklusi tidak berarti menahan perubahan, tetapi memperluas kemampuan masyarakat untuk ikut memperoleh manfaat dari perubahan. Reskilling bagi pekerja terdampak, pembiayaan transisi bagi UMKM, perlindungan pendapatan sementara, serta layanan dasar yang berkualitas merupakan contoh instrumen yang membuat transformasi lebih adil. Dalam jangka panjang, pemerataan kesempatan yang baik justru memperbesar basis talenta, kewirausahaan dan permintaan domestik yang menopang pertumbuhan.

Untuk memastikan akuntabilitas, keberhasilan bagian ini sebaiknya dipantau melalui indikator seperti tax ratio, compliance gap, progressivity, service satisfaction. Indikator output—misalnya jumlah program, pelatihan, proyek, atau penerima—tetap dibutuhkan untuk pengelolaan operasional, tetapi tidak boleh menggantikan outcome. Pertanyaan akhirnya adalah apakah masyarakat memiliki pendapatan riil lebih tinggi, pekerjaan lebih produktif, risiko ekonomi lebih rendah, akses layanan lebih baik, dan kesempatan mobilitas yang lebih besar. Ketika ukuran tersebut bergerak searah dengan pertumbuhan PDB, dapat dikatakan bahwa proses pemulihan mulai bertransformasi menjadi peningkatan taraf hidup yang substantif dan inklusif.

30. Investasi Berkualitas dan Multiplier Kesejahteraan

Investasi harus dinilai tidak hanya dari nilai modal tetapi juga pekerjaan, teknologi, pemasok lokal dan dampak lingkungan merupakan inti persoalan yang dibahas pada bagian ini. Dalam kerangka pemulihan ekonomi Indonesia, pertanyaan penting bukan hanya seberapa cepat kegiatan ekonomi kembali berkembang, melainkan siapa yang memperoleh manfaat, melalui mekanisme apa, dan seberapa tahan manfaat tersebut terhadap guncangan berikutnya. Pertumbuhan agregat memang diperlukan karena tanpa perluasan basis produksi, ruang bagi penciptaan pendapatan dan penerimaan publik menjadi terbatas. Namun, kenaikan output baru menjadi pembangunan apabila menghasilkan kemampuan nyata bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan, meningkatkan keterampilan, menjaga kesehatan, membangun aset, dan merencanakan masa depan. Perspektif ini menempatkan taraf hidup sebagai hasil dari interaksi antara pasar kerja, struktur produksi, harga, layanan publik, aset rumah tangga, serta institusi.

Secara ekonomi, mekanismenya bekerja melalui beberapa jalur. Pertama, produksi yang meningkat menciptakan permintaan terhadap tenaga kerja, pemasok, jasa dan infrastruktur. Kedua, produktivitas yang lebih tinggi memperbesar ruang bagi kenaikan upah dan laba usaha. Ketiga, basis ekonomi yang melebar meningkatkan penerimaan fiskal yang dapat membiayai pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial dan infrastruktur. Keempat, proses tersebut membentuk ekspektasi dan investasi rumah tangga: ketika pendapatan lebih stabil, keluarga lebih berani menyekolahkan anak lebih lama, memperbaiki tempat tinggal, membeli alat produktif, atau memulai usaha. Akan tetapi, setiap jalur dapat terputus oleh konsentrasi pasar, mismatch keterampilan, inflasi, informalitas, lemahnya layanan publik, atau ketimpangan akses terhadap modal dan teknologi.

Dalam konteks Indonesia, pabrik modern yang mengembangkan pemasok lokal dan pusat pelatihan memberi multiplier lebih besar daripada enclave investment. Contoh ini penting karena menunjukkan bahwa kebijakan yang tampak berhasil pada tingkat makro dapat memiliki hasil berbeda pada tingkat rumah tangga. Satu wilayah dapat mencatat investasi tinggi tetapi kesempatan kerja lokal terbatas; daerah lain dapat menyerap banyak tenaga kerja tetapi berada pada pekerjaan berproduktivitas rendah. Dengan demikian, analisis perlu bergerak dari pertanyaan 'berapa besar pertumbuhan?' menuju 'bagaimana struktur pertumbuhan itu?', 'siapa yang berpartisipasi?', dan 'apakah pendapatan serta layanan yang diterima masyarakat meningkat secara riil?'. Pendekatan seperti ini juga menghindari jebakan melihat rata-rata nasional sebagai gambaran semua kelompok.

Arah kebijakan yang relevan adalah menggunakan kerangka quality FDI dan domestic investment linkage. Kebijakan tersebut sebaiknya tidak diperlakukan sebagai proyek tunggal, melainkan sebagai paket yang menghubungkan sisi permintaan dan sisi penawaran. Insentif investasi, misalnya, perlu disertai pengembangan pemasok, pelatihan pekerja, infrastruktur, pembiayaan dan standar kerja. Program pendidikan perlu tersambung dengan kebutuhan industri dan perubahan teknologi. Bantuan sosial perlu terhubung dengan layanan kesehatan, pendidikan, penempatan kerja atau dukungan usaha ketika kondisi penerima memungkinkan. Integrasi semacam ini meningkatkan peluang bahwa setiap rupiah belanja publik atau investasi swasta menghasilkan multiplier ekonomi dan sosial yang lebih besar.

Dimensi distribusi juga menentukan keberhasilan. Kebijakan yang menaikkan efisiensi rata-rata dapat menghasilkan pemenang dan pihak yang tertinggal. Oleh karena itu, prinsip inklusi tidak berarti

menahan perubahan, tetapi memperluas kemampuan masyarakat untuk ikut memperoleh manfaat dari perubahan. Reskilling bagi pekerja terdampak, pembiayaan transisi bagi UMKM, perlindungan pendapatan sementara, serta layanan dasar yang berkualitas merupakan contoh instrumen yang membuat transformasi lebih adil. Dalam jangka panjang, pemerataan kesempatan yang baik justru memperbesar basis talenta, kewirausahaan dan permintaan domestik yang menopang pertumbuhan.

Untuk memastikan akuntabilitas, keberhasilan bagian ini sebaiknya dipantau melalui indikator seperti jobs per capital, local procurement, technology transfer, regional multiplier. Indikator output—misalnya jumlah program, pelatihan, proyek, atau penerima—tetap dibutuhkan untuk pengelolaan operasional, tetapi tidak boleh menggantikan outcome. Pertanyaan akhirnya adalah apakah masyarakat memiliki pendapatan riil lebih tinggi, pekerjaan lebih produktif, risiko ekonomi lebih rendah, akses layanan lebih baik, dan kesempatan mobilitas yang lebih besar. Ketika ukuran tersebut bergerak searah dengan pertumbuhan PDB, dapat dikatakan bahwa proses pemulihan mulai bertransformasi menjadi peningkatan taraf hidup yang substantif dan inklusif.

31. Ekonomi Hijau dan Green Jobs

Transisi rendah karbon dapat menjadi sumber investasi, pekerjaan dan kesehatan yang lebih baik merupakan inti persoalan yang dibahas pada bagian ini. Dalam kerangka pemulihan ekonomi Indonesia, pertanyaan penting bukan hanya seberapa cepat kegiatan ekonomi kembali berkembang, melainkan siapa yang memperoleh manfaat, melalui mekanisme apa, dan seberapa tahan manfaat tersebut terhadap guncangan berikutnya. Pertumbuhan agregat memang diperlukan karena tanpa perluasan basis produksi, ruang bagi penciptaan pendapatan dan penerimaan publik menjadi terbatas. Namun, kenaikan output baru menjadi pembangunan apabila menghasilkan kemampuan nyata bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan, meningkatkan keterampilan, menjaga kesehatan, membangun aset, dan merencanakan masa depan. Perspektif ini menempatkan taraf hidup sebagai hasil dari interaksi antara pasar kerja, struktur produksi, harga, layanan publik, aset rumah tangga, serta institusi.

Secara ekonomi, mekanismenya bekerja melalui beberapa jalur. Pertama, produksi yang meningkat menciptakan permintaan terhadap tenaga kerja, pemasok, jasa dan infrastruktur. Kedua, produktivitas yang lebih tinggi memperbesar ruang bagi kenaikan upah dan laba usaha. Ketiga, basis ekonomi yang melebar meningkatkan penerimaan fiskal yang dapat membiayai pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial dan infrastruktur. Keempat, proses tersebut membentuk ekspektasi dan investasi rumah tangga: ketika pendapatan lebih stabil, keluarga lebih berani menyekolahkan anak lebih lama, memperbaiki tempat tinggal, membeli alat produktif, atau memulai usaha. Akan tetapi, setiap jalur dapat terputus oleh konsentrasi pasar, mismatch keterampilan, inflasi, informalitas, lemahnya layanan publik, atau ketimpangan akses terhadap modal dan teknologi.

Dalam konteks Indonesia, just transition diperlukan agar pekerja dan wilayah yang tergantung industri karbon tidak menanggung biaya secara tidak proporsional. Contoh ini penting karena menunjukkan bahwa kebijakan yang tampak berhasil pada tingkat makro dapat memiliki hasil berbeda pada tingkat rumah tangga. Satu wilayah dapat mencatat investasi tinggi tetapi kesempatan kerja lokal terbatas; daerah lain dapat menyerap banyak tenaga kerja tetapi berada pada pekerjaan berproduktivitas

rendah. Dengan demikian, analisis perlu bergerak dari pertanyaan 'berapa besar pertumbuhan?' menuju 'bagaimana struktur pertumbuhan itu?', 'siapa yang berpartisipasi?', dan 'apakah pendapatan serta layanan yang diterima masyarakat meningkat secara riil?'. Pendekatan seperti ini juga menghindari jebakan melihat rata-rata nasional sebagai gambaran semua kelompok.

Arah kebijakan yang relevan adalah mengembangkan energi bersih, efisiensi, ekonomi sirkular, restorasi ekosistem dan keterampilan hijau. Kebijakan tersebut sebaiknya tidak diperlakukan sebagai proyek tunggal, melainkan sebagai paket yang menghubungkan sisi permintaan dan sisi penawaran. Insentif investasi, misalnya, perlu disertai pengembangan pemasok, pelatihan pekerja, infrastruktur, pembiayaan dan standar kerja. Program pendidikan perlu tersambung dengan kebutuhan industri dan perubahan teknologi. Bantuan sosial perlu terhubung dengan layanan kesehatan, pendidikan, penempatan kerja atau dukungan usaha ketika kondisi penerima memungkinkan. Integrasi semacam ini meningkatkan peluang bahwa setiap rupiah belanja publik atau investasi swasta menghasilkan multiplier ekonomi dan sosial yang lebih besar.

Dimensi distribusi juga menentukan keberhasilan. Kebijakan yang menaikkan efisiensi rata-rata dapat menghasilkan pemenang dan pihak yang tertinggal. Oleh karena itu, prinsip inklusi tidak berarti menahan perubahan, tetapi memperluas kemampuan masyarakat untuk ikut memperoleh manfaat dari perubahan. Reskilling bagi pekerja terdampak, pembiayaan transisi bagi UMKM, perlindungan pendapatan sementara, serta layanan dasar yang berkualitas merupakan contoh instrumen yang membuat transformasi lebih adil. Dalam jangka panjang, pemerataan kesempatan yang baik justru memperbesar basis talenta, kewirausahaan dan permintaan domestik yang menopang pertumbuhan.

Untuk memastikan akuntabilitas, keberhasilan bagian ini sebaiknya dipantau melalui indikator seperti green jobs, emissions intensity, air quality, retraining success. Indikator output—misalnya jumlah program, pelatihan, proyek, atau penerima—tetap dibutuhkan untuk pengelolaan operasional, tetapi tidak boleh menggantikan outcome. Pertanyaan akhirnya adalah apakah masyarakat memiliki pendapatan riil lebih tinggi, pekerjaan lebih produktif, risiko ekonomi lebih rendah, akses layanan lebih baik, dan kesempatan mobilitas yang lebih besar. Ketika ukuran tersebut bergerak searah dengan pertumbuhan PDB, dapat dikatakan bahwa proses pemulihan mulai bertransformasi menjadi peningkatan taraf hidup yang substantif dan inklusif.

32. Ekonomi Biru dan Kesejahteraan Pesisir

Sumber daya laut perlu menghasilkan nilai tambah tanpa merusak basis ekologis masyarakat pesisir merupakan inti persoalan yang dibahas pada bagian ini. Dalam kerangka pemulihan ekonomi Indonesia, pertanyaan penting bukan hanya seberapa cepat kegiatan ekonomi kembali berkembang, melainkan siapa yang memperoleh manfaat, melalui mekanisme apa, dan seberapa tahan manfaat tersebut terhadap guncangan berikutnya. Pertumbuhan agregat memang diperlukan karena tanpa perluasan basis produksi, ruang bagi penciptaan pendapatan dan penerimaan publik menjadi terbatas. Namun, kenaikan output baru menjadi pembangunan apabila menghasilkan kemampuan nyata bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan, meningkatkan keterampilan, menjaga kesehatan, membangun aset, dan merencanakan masa depan. Perspektif ini menempatkan taraf hidup sebagai

hasil dari interaksi antara pasar kerja, struktur produksi, harga, layanan publik, aset rumah tangga, serta institusi.

Secara ekonomi, mekanismenya bekerja melalui beberapa jalur. Pertama, produksi yang meningkat menciptakan permintaan terhadap tenaga kerja, pemasok, jasa dan infrastruktur. Kedua, produktivitas yang lebih tinggi memperbesar ruang bagi kenaikan upah dan laba usaha. Ketiga, basis ekonomi yang melebar meningkatkan penerimaan fiskal yang dapat membiayai pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial dan infrastruktur. Keempat, proses tersebut membentuk ekspektasi dan investasi rumah tangga: ketika pendapatan lebih stabil, keluarga lebih berani menyekolahkan anak lebih lama, memperbaiki tempat tinggal, membeli alat produktif, atau memulai usaha. Akan tetapi, setiap jalur dapat terputus oleh konsentrasi pasar, mismatch keterampilan, inflasi, informalitas, lemahnya layanan publik, atau ketimpangan akses terhadap modal dan teknologi.

Dalam konteks Indonesia, kenaikan produksi tanpa pengelolaan stok ikan dapat meningkatkan pendapatan jangka pendek tetapi merusak kesejahteraan jangka panjang. Contoh ini penting karena menunjukkan bahwa kebijakan yang tampak berhasil pada tingkat makro dapat memiliki hasil berbeda pada tingkat rumah tangga. Satu wilayah dapat mencatat investasi tinggi tetapi kesempatan kerja lokal terbatas; daerah lain dapat menyerap banyak tenaga kerja tetapi berada pada pekerjaan berproduktivitas rendah. Dengan demikian, analisis perlu bergerak dari pertanyaan 'berapa besar pertumbuhan?' menuju 'bagaimana struktur pertumbuhan itu?', 'siapa yang berpartisipasi?', dan 'apakah pendapatan serta layanan yang diterima masyarakat meningkat secara riil?'. Pendekatan seperti ini juga menghindari jebakan melihat rata-rata nasional sebagai gambaran semua kelompok.

Arah kebijakan yang relevan adalah memadukan perikanan berkelanjutan, pengolahan, cold chain, wisata, mangrove dan pembiayaan biru. Kebijakan tersebut sebaiknya tidak diperlakukan sebagai proyek tunggal, melainkan sebagai paket yang menghubungkan sisi permintaan dan sisi penawaran. Insentif investasi, misalnya, perlu disertai pengembangan pemasok, pelatihan pekerja, infrastruktur, pembiayaan dan standar kerja. Program pendidikan perlu tersambung dengan kebutuhan industri dan perubahan teknologi. Bantuan sosial perlu terhubung dengan layanan kesehatan, pendidikan, penempatan kerja atau dukungan usaha ketika kondisi penerima memungkinkan. Integrasi semacam ini meningkatkan peluang bahwa setiap rupiah belanja publik atau investasi swasta menghasilkan multiplier ekonomi dan sosial yang lebih besar.

Dimensi distribusi juga menentukan keberhasilan. Kebijakan yang menaikkan efisiensi rata-rata dapat menghasilkan pemenang dan pihak yang tertinggal. Oleh karena itu, prinsip inklusi tidak berarti menahan perubahan, tetapi memperluas kemampuan masyarakat untuk ikut memperoleh manfaat dari perubahan. Reskilling bagi pekerja terdampak, pembiayaan transisi bagi UMKM, perlindungan pendapatan sementara, serta layanan dasar yang berkualitas merupakan contoh instrumen yang membuat transformasi lebih adil. Dalam jangka panjang, pemerataan kesempatan yang baik justru memperbesar basis talenta, kewirausahaan dan permintaan domestik yang menopang pertumbuhan.

Untuk memastikan akuntabilitas, keberhasilan bagian ini sebaiknya dipantau melalui indikator seperti fisher income, stock health, post-harvest loss, coastal resilience. Indikator output—misalnya jumlah program, pelatihan, proyek, atau penerima—tetap dibutuhkan untuk pengelolaan operasional, tetapi tidak boleh menggantikan outcome. Pertanyaan akhirnya adalah apakah masyarakat memiliki pendapatan riil lebih tinggi, pekerjaan lebih produktif, risiko ekonomi lebih rendah, akses layanan lebih

baik, dan kesempatan mobilitas yang lebih besar. Ketika ukuran tersebut bergerak searah dengan pertumbuhan PDB, dapat dikatakan bahwa proses pemulihan mulai bertransformasi menjadi peningkatan taraf hidup yang substantif dan inklusif.

33. Ketahanan Iklim dan Risiko terhadap Taraf Hidup

Banjir, kekeringan, panas dan bencana menurunkan aset, kesehatan dan produktivitas rumah tangga merupakan inti persoalan yang dibahas pada bagian ini. Dalam kerangka pemulihan ekonomi Indonesia, pertanyaan penting bukan hanya seberapa cepat kegiatan ekonomi kembali berkembang, melainkan siapa yang memperoleh manfaat, melalui mekanisme apa, dan seberapa tahan manfaat tersebut terhadap guncangan berikutnya. Pertumbuhan agregat memang diperlukan karena tanpa perluasan basis produksi, ruang bagi penciptaan pendapatan dan penerimaan publik menjadi terbatas. Namun, kenaikan output baru menjadi pembangunan apabila menghasilkan kemampuan nyata bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan, meningkatkan keterampilan, menjaga kesehatan, membangun aset, dan merencanakan masa depan. Perspektif ini menempatkan taraf hidup sebagai hasil dari interaksi antara pasar kerja, struktur produksi, harga, layanan publik, aset rumah tangga, serta institusi.

Secara ekonomi, mekanismenya bekerja melalui beberapa jalur. Pertama, produksi yang meningkat menciptakan permintaan terhadap tenaga kerja, pemasok, jasa dan infrastruktur. Kedua, produktivitas yang lebih tinggi memperbesar ruang bagi kenaikan upah dan laba usaha. Ketiga, basis ekonomi yang melebar meningkatkan penerimaan fiskal yang dapat membiayai pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial dan infrastruktur. Keempat, proses tersebut membentuk ekspektasi dan investasi rumah tangga: ketika pendapatan lebih stabil, keluarga lebih berani menyekolahkan anak lebih lama, memperbaiki tempat tinggal, membeli alat produktif, atau memulai usaha. Akan tetapi, setiap jalur dapat terputus oleh konsentrasi pasar, mismatch keterampilan, inflasi, informalitas, lemahnya layanan publik, atau ketimpangan akses terhadap modal dan teknologi.

Dalam konteks Indonesia, kelompok miskin sering memiliki aset paling sedikit tetapi terekspos risiko paling tinggi dan memiliki kapasitas pemulihan paling rendah. Contoh ini penting karena menunjukkan bahwa kebijakan yang tampak berhasil pada tingkat makro dapat memiliki hasil berbeda pada tingkat rumah tangga. Satu wilayah dapat mencatat investasi tinggi tetapi kesempatan kerja lokal terbatas; daerah lain dapat menyerap banyak tenaga kerja tetapi berada pada pekerjaan berproduktivitas rendah. Dengan demikian, analisis perlu bergerak dari pertanyaan 'berapa besar pertumbuhan?' menuju 'bagaimana struktur pertumbuhan itu?', 'siapa yang berpartisipasi?', dan 'apakah pendapatan serta layanan yang diterima masyarakat meningkat secara riil?'. Pendekatan seperti ini juga menghindari jebakan melihat rata-rata nasional sebagai gambaran semua kelompok.

Arah kebijakan yang relevan adalah mengarusutamakan adaptasi pada infrastruktur, pertanian, perumahan, asuransi dan perlindungan sosial. Kebijakan tersebut sebaiknya tidak diperlakukan sebagai proyek tunggal, melainkan sebagai paket yang menghubungkan sisi permintaan dan sisi penawaran. Insentif investasi, misalnya, perlu disertai pengembangan pemasok, pelatihan pekerja, infrastruktur, pembiayaan dan standar kerja. Program pendidikan perlu tersambung dengan kebutuhan industri dan perubahan teknologi. Bantuan sosial perlu terhubung dengan layanan kesehatan,

pendidikan, penempatan kerja atau dukungan usaha ketika kondisi penerima memungkinkan. Integrasi semacam ini meningkatkan peluang bahwa setiap rupiah belanja publik atau investasi swasta menghasilkan multiplier ekonomi dan sosial yang lebih besar.

Dimensi distribusi juga menentukan keberhasilan. Kebijakan yang menaikkan efisiensi rata-rata dapat menghasilkan pemenang dan pihak yang tertinggal. Oleh karena itu, prinsip inklusi tidak berarti menahan perubahan, tetapi memperluas kemampuan masyarakat untuk ikut memperoleh manfaat dari perubahan. Reskilling bagi pekerja terdampak, pembiayaan transisi bagi UMKM, perlindungan pendapatan sementara, serta layanan dasar yang berkualitas merupakan contoh instrumen yang membuat transformasi lebih adil. Dalam jangka panjang, pemerataan kesempatan yang baik justru memperbesar basis talenta, kewirausahaan dan permintaan domestik yang menopang pertumbuhan.

Untuk memastikan akuntabilitas, keberhasilan bagian ini sebaiknya dipantau melalui indikator seperti climate loss, insured assets, adaptive coverage, disaster recovery time. Indikator output—misalnya jumlah program, pelatihan, proyek, atau penerima—tetap dibutuhkan untuk pengelolaan operasional, tetapi tidak boleh menggantikan outcome. Pertanyaan akhirnya adalah apakah masyarakat memiliki pendapatan riil lebih tinggi, pekerjaan lebih produktif, risiko ekonomi lebih rendah, akses layanan lebih baik, dan kesempatan mobilitas yang lebih besar. Ketika ukuran tersebut bergerak searah dengan pertumbuhan PDB, dapat dikatakan bahwa proses pemulihan mulai bertransformasi menjadi peningkatan taraf hidup yang substantif dan inklusif.

34. Pembangunan Wilayah dan Kesenjangan Spasial

Konsentrasi aktivitas ekonomi di Jawa menunjukkan pentingnya konektivitas dan pusat pertumbuhan baru merupakan inti persoalan yang dibahas pada bagian ini. Dalam kerangka pemulihan ekonomi Indonesia, pertanyaan penting bukan hanya seberapa cepat kegiatan ekonomi kembali berkembang, melainkan siapa yang memperoleh manfaat, melalui mekanisme apa, dan seberapa tahan manfaat tersebut terhadap guncangan berikutnya. Pertumbuhan agregat memang diperlukan karena tanpa perluasan basis produksi, ruang bagi penciptaan pendapatan dan penerimaan publik menjadi terbatas. Namun, kenaikan output baru menjadi pembangunan apabila menghasilkan kemampuan nyata bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan, meningkatkan keterampilan, menjaga kesehatan, membangun aset, dan merencanakan masa depan. Perspektif ini menempatkan taraf hidup sebagai hasil dari interaksi antara pasar kerja, struktur produksi, harga, layanan publik, aset rumah tangga, serta institusi.

Secara ekonomi, mekanismenya bekerja melalui beberapa jalur. Pertama, produksi yang meningkat menciptakan permintaan terhadap tenaga kerja, pemasok, jasa dan infrastruktur. Kedua, produktivitas yang lebih tinggi memperbesar ruang bagi kenaikan upah dan laba usaha. Ketiga, basis ekonomi yang melebar meningkatkan penerimaan fiskal yang dapat membiayai pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial dan infrastruktur. Keempat, proses tersebut membentuk ekspektasi dan investasi rumah tangga: ketika pendapatan lebih stabil, keluarga lebih berani menyekolahkan anak lebih lama, memperbaiki tempat tinggal, membeli alat produktif, atau memulai usaha. Akan tetapi, setiap jalur dapat terputus oleh konsentrasi pasar, mismatch keterampilan, inflasi, informalitas, lemahnya layanan publik, atau ketimpangan akses terhadap modal dan teknologi.

Dalam konteks Indonesia, kebijakan seragam tidak efektif karena struktur ekonomi Papua, Sulawesi, Kalimantan, Jawa dan kepulauan kecil sangat berbeda. Contoh ini penting karena menunjukkan bahwa kebijakan yang tampak berhasil pada tingkat makro dapat memiliki hasil berbeda pada tingkat rumah tangga. Satu wilayah dapat mencatat investasi tinggi tetapi kesempatan kerja lokal terbatas; daerah lain dapat menyerap banyak tenaga kerja tetapi berada pada pekerjaan berproduktivitas rendah. Dengan demikian, analisis perlu bergerak dari pertanyaan 'berapa besar pertumbuhan?' menuju 'bagaimana struktur pertumbuhan itu?', 'siapa yang berpartisipasi?', dan 'apakah pendapatan serta layanan yang diterima masyarakat meningkat secara riil?'. Pendekatan seperti ini juga menghindari jebakan melihat rata-rata nasional sebagai gambaran semua kelompok.

Arah kebijakan yang relevan adalah mengembangkan strategi berbasis tempat yang sesuai keunggulan lokal dan jaringan kota-desa. Kebijakan tersebut sebaiknya tidak diperlakukan sebagai proyek tunggal, melainkan sebagai paket yang menghubungkan sisi permintaan dan sisi penawaran. Insentif investasi, misalnya, perlu disertai pengembangan pemasok, pelatihan pekerja, infrastruktur, pembiayaan dan standar kerja. Program pendidikan perlu tersambung dengan kebutuhan industri dan perubahan teknologi. Bantuan sosial perlu terhubung dengan layanan kesehatan, pendidikan, penempatan kerja atau dukungan usaha ketika kondisi penerima memungkinkan. Integrasi semacam ini meningkatkan peluang bahwa setiap rupiah belanja publik atau investasi swasta menghasilkan multiplier ekonomi dan sosial yang lebih besar.

Dimensi distribusi juga menentukan keberhasilan. Kebijakan yang menaikkan efisiensi rata-rata dapat menghasilkan pemenang dan pihak yang tertinggal. Oleh karena itu, prinsip inklusi tidak berarti menahan perubahan, tetapi memperluas kemampuan masyarakat untuk ikut memperoleh manfaat dari perubahan. Reskilling bagi pekerja terdampak, pembiayaan transisi bagi UMKM, perlindungan pendapatan sementara, serta layanan dasar yang berkualitas merupakan contoh instrumen yang membuat transformasi lebih adil. Dalam jangka panjang, pemerataan kesempatan yang baik justru memperbesar basis talenta, kewirausahaan dan permintaan domestik yang menopang pertumbuhan.

Untuk memastikan akuntabilitas, keberhasilan bagian ini sebaiknya dipantau melalui indikator seperti regional productivity, poverty gap, service distance, interregional trade. Indikator output—misalnya jumlah program, pelatihan, proyek, atau penerima—tetap dibutuhkan untuk pengelolaan operasional, tetapi tidak boleh menggantikan outcome. Pertanyaan akhirnya adalah apakah masyarakat memiliki pendapatan riil lebih tinggi, pekerjaan lebih produktif, risiko ekonomi lebih rendah, akses layanan lebih baik, dan kesempatan mobilitas yang lebih besar. Ketika ukuran tersebut bergerak searah dengan pertumbuhan PDB, dapat dikatakan bahwa proses pemulihan mulai bertransformasi menjadi peningkatan taraf hidup yang substantif dan inklusif.

35. Infrastruktur Dasar sebagai Platform Produktivitas

Jalan, listrik, air, sanitasi dan internet menentukan biaya produksi serta kualitas hidup merupakan inti persoalan yang dibahas pada bagian ini. Dalam kerangka pemulihan ekonomi Indonesia, pertanyaan penting bukan hanya seberapa cepat kegiatan ekonomi kembali berkembang, melainkan siapa yang memperoleh manfaat, melalui mekanisme apa, dan seberapa tahan manfaat tersebut terhadap guncangan berikutnya. Pertumbuhan agregat memang diperlukan karena tanpa perluasan basis

produksi, ruang bagi penciptaan pendapatan dan penerimaan publik menjadi terbatas. Namun, kenaikan output baru menjadi pembangunan apabila menghasilkan kemampuan nyata bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan, meningkatkan keterampilan, menjaga kesehatan, membangun aset, dan merencanakan masa depan. Perspektif ini menempatkan taraf hidup sebagai hasil dari interaksi antara pasar kerja, struktur produksi, harga, layanan publik, aset rumah tangga, serta institusi.

Secara ekonomi, mekanismenya bekerja melalui beberapa jalur. Pertama, produksi yang meningkat menciptakan permintaan terhadap tenaga kerja, pemasok, jasa dan infrastruktur. Kedua, produktivitas yang lebih tinggi memperbesar ruang bagi kenaikan upah dan laba usaha. Ketiga, basis ekonomi yang melebar meningkatkan penerimaan fiskal yang dapat membiayai pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial dan infrastruktur. Keempat, proses tersebut membentuk ekspektasi dan investasi rumah tangga: ketika pendapatan lebih stabil, keluarga lebih berani menyekolahkan anak lebih lama, memperbaiki tempat tinggal, membeli alat produktif, atau memulai usaha. Akan tetapi, setiap jalur dapat terputus oleh konsentrasi pasar, mismatch keterampilan, inflasi, informalitas, lemahnya layanan publik, atau ketimpangan akses terhadap modal dan teknologi.

Dalam konteks Indonesia, infrastruktur yang tidak disertai layanan, keterampilan dan kelembagaan dapat menjadi aset fisik yang kurang produktif. Contoh ini penting karena menunjukkan bahwa kebijakan yang tampak berhasil pada tingkat makro dapat memiliki hasil berbeda pada tingkat rumah tangga. Satu wilayah dapat mencatat investasi tinggi tetapi kesempatan kerja lokal terbatas; daerah lain dapat menyerap banyak tenaga kerja tetapi berada pada pekerjaan berproduktivitas rendah. Dengan demikian, analisis perlu bergerak dari pertanyaan 'berapa besar pertumbuhan?' menuju 'bagaimana struktur pertumbuhan itu?', 'siapa yang berpartisipasi?', dan 'apakah pendapatan serta layanan yang diterima masyarakat meningkat secara riil?'. Pendekatan seperti ini juga menghindari jebakan melihat rata-rata nasional sebagai gambaran semua kelompok.

Arah kebijakan yang relevan adalah menilai proyek berdasarkan akses, utilisasi, pemeliharaan dan dampak ekonomi-sosial. Kebijakan tersebut sebaiknya tidak diperlakukan sebagai proyek tunggal, melainkan sebagai paket yang menghubungkan sisi permintaan dan sisi penawaran. Insentif investasi, misalnya, perlu disertai pengembangan pemasok, pelatihan pekerja, infrastruktur, pembiayaan dan standar kerja. Program pendidikan perlu tersambung dengan kebutuhan industri dan perubahan teknologi. Bantuan sosial perlu terhubung dengan layanan kesehatan, pendidikan, penempatan kerja atau dukungan usaha ketika kondisi penerima memungkinkan. Integrasi semacam ini meningkatkan peluang bahwa setiap rupiah belanja publik atau investasi swasta menghasilkan multiplier ekonomi dan sosial yang lebih besar.

Dimensi distribusi juga menentukan keberhasilan. Kebijakan yang menaikkan efisiensi rata-rata dapat menghasilkan pemenang dan pihak yang tertinggal. Oleh karena itu, prinsip inklusi tidak berarti menahan perubahan, tetapi memperluas kemampuan masyarakat untuk ikut memperoleh manfaat dari perubahan. Reskilling bagi pekerja terdampak, pembiayaan transisi bagi UMKM, perlindungan pendapatan sementara, serta layanan dasar yang berkualitas merupakan contoh instrumen yang membuat transformasi lebih adil. Dalam jangka panjang, pemerataan kesempatan yang baik justru memperbesar basis talenta, kewirausahaan dan permintaan domestik yang menopang pertumbuhan.

Untuk memastikan akuntabilitas, keberhasilan bagian ini sebaiknya dipantau melalui indikator seperti access, reliability, maintenance, utilization, logistics cost. Indikator output—misalnya jumlah program, pelatihan, proyek, atau penerima—tetap dibutuhkan untuk pengelolaan operasional, tetapi tidak boleh menggantikan outcome. Pertanyaan akhirnya adalah apakah masyarakat memiliki pendapatan riil lebih tinggi, pekerjaan lebih produktif, risiko ekonomi lebih rendah, akses layanan lebih baik, dan kesempatan mobilitas yang lebih besar. Ketika ukuran tersebut bergerak searah dengan pertumbuhan PDB, dapat dikatakan bahwa proses pemulihan mulai bertransformasi menjadi peningkatan taraf hidup yang substantif dan inklusif.

36. Institusi, Kepastian Hukum dan Kepercayaan

Institusi menentukan apakah kesempatan ekonomi terbuka dan kontrak dapat ditegakkan merupakan inti persoalan yang dibahas pada bagian ini. Dalam kerangka pemulihan ekonomi Indonesia, pertanyaan penting bukan hanya seberapa cepat kegiatan ekonomi kembali berkembang, melainkan siapa yang memperoleh manfaat, melalui mekanisme apa, dan seberapa tahan manfaat tersebut terhadap guncangan berikutnya. Pertumbuhan agregat memang diperlukan karena tanpa perluasan basis produksi, ruang bagi penciptaan pendapatan dan penerimaan publik menjadi terbatas. Namun, kenaikan output baru menjadi pembangunan apabila menghasilkan kemampuan nyata bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan, meningkatkan keterampilan, menjaga kesehatan, membangun aset, dan merencanakan masa depan. Perspektif ini menempatkan taraf hidup sebagai hasil dari interaksi antara pasar kerja, struktur produksi, harga, layanan publik, aset rumah tangga, serta institusi.

Secara ekonomi, mekanismenya bekerja melalui beberapa jalur. Pertama, produksi yang meningkat menciptakan permintaan terhadap tenaga kerja, pemasok, jasa dan infrastruktur. Kedua, produktivitas yang lebih tinggi memperbesar ruang bagi kenaikan upah dan laba usaha. Ketiga, basis ekonomi yang melebar meningkatkan penerimaan fiskal yang dapat membiayai pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial dan infrastruktur. Keempat, proses tersebut membentuk ekspektasi dan investasi rumah tangga: ketika pendapatan lebih stabil, keluarga lebih berani menyekolahkan anak lebih lama, memperbaiki tempat tinggal, membeli alat produktif, atau memulai usaha. Akan tetapi, setiap jalur dapat terputus oleh konsentrasi pasar, mismatch keterampilan, inflasi, informalitas, lemahnya layanan publik, atau ketimpangan akses terhadap modal dan teknologi.

Dalam konteks Indonesia, biaya ketidakpastian bertindak seperti pajak tersembunyi yang lebih berat bagi usaha kecil dan pendatang baru. Contoh ini penting karena menunjukkan bahwa kebijakan yang tampak berhasil pada tingkat makro dapat memiliki hasil berbeda pada tingkat rumah tangga. Satu wilayah dapat mencatat investasi tinggi tetapi kesempatan kerja lokal terbatas; daerah lain dapat menyerap banyak tenaga kerja tetapi berada pada pekerjaan berproduktivitas rendah. Dengan demikian, analisis perlu bergerak dari pertanyaan 'berapa besar pertumbuhan?' menuju 'bagaimana struktur pertumbuhan itu?', 'siapa yang berpartisipasi?', dan 'apakah pendapatan serta layanan yang diterima masyarakat meningkat secara riil?'. Pendekatan seperti ini juga menghindari jebakan melihat rata-rata nasional sebagai gambaran semua kelompok.

Arah kebijakan yang relevan adalah memperbaiki pelayanan perizinan, pengadaan, persaingan, antikorupsi dan penyelesaian sengketa. Kebijakan tersebut sebaiknya tidak diperlakukan sebagai proyek tunggal, melainkan sebagai paket yang menghubungkan sisi permintaan dan sisi penawaran. Insentif investasi, misalnya, perlu disertai pengembangan pemasok, pelatihan pekerja, infrastruktur, pembiayaan dan standar kerja. Program pendidikan perlu tersambung dengan kebutuhan industri dan perubahan teknologi. Bantuan sosial perlu terhubung dengan layanan kesehatan, pendidikan, penempatan kerja atau dukungan usaha ketika kondisi penerima memungkinkan. Integrasi semacam ini meningkatkan peluang bahwa setiap rupiah belanja publik atau investasi swasta menghasilkan multiplier ekonomi dan sosial yang lebih besar.

Dimensi distribusi juga menentukan keberhasilan. Kebijakan yang menaikkan efisiensi rata-rata dapat menghasilkan pemenang dan pihak yang tertinggal. Oleh karena itu, prinsip inklusi tidak berarti menahan perubahan, tetapi memperluas kemampuan masyarakat untuk ikut memperoleh manfaat dari perubahan. Reskilling bagi pekerja terdampak, pembiayaan transisi bagi UMKM, perlindungan pendapatan sementara, serta layanan dasar yang berkualitas merupakan contoh instrumen yang membuat transformasi lebih adil. Dalam jangka panjang, pemerataan kesempatan yang baik justru memperbesar basis talenta, kewirausahaan dan permintaan domestik yang menopang pertumbuhan.

Untuk memastikan akuntabilitas, keberhasilan bagian ini sebaiknya dipantau melalui indikator seperti regulatory time, competition, corruption risk, business confidence. Indikator output—misalnya jumlah program, pelatihan, proyek, atau penerima—tetap dibutuhkan untuk pengelolaan operasional, tetapi tidak boleh menggantikan outcome. Pertanyaan akhirnya adalah apakah masyarakat memiliki pendapatan riil lebih tinggi, pekerjaan lebih produktif, risiko ekonomi lebih rendah, akses layanan lebih baik, dan kesempatan mobilitas yang lebih besar. Ketika ukuran tersebut bergerak searah dengan pertumbuhan PDB, dapat dikatakan bahwa proses pemulihan mulai bertransformasi menjadi peningkatan taraf hidup yang substantif dan inklusif.

37. Data, Pengukuran dan Dashboard Taraf Hidup

Apa yang diukur akan memengaruhi apa yang dikelola merupakan inti persoalan yang dibahas pada bagian ini. Dalam kerangka pemulihan ekonomi Indonesia, pertanyaan penting bukan hanya seberapa cepat kegiatan ekonomi kembali berkembang, melainkan siapa yang memperoleh manfaat, melalui mekanisme apa, dan seberapa tahan manfaat tersebut terhadap guncangan berikutnya. Pertumbuhan agregat memang diperlukan karena tanpa perluasan basis produksi, ruang bagi penciptaan pendapatan dan penerimaan publik menjadi terbatas. Namun, kenaikan output baru menjadi pembangunan apabila menghasilkan kemampuan nyata bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan, meningkatkan keterampilan, menjaga kesehatan, membangun aset, dan merencanakan masa depan. Perspektif ini menempatkan taraf hidup sebagai hasil dari interaksi antara pasar kerja, struktur produksi, harga, layanan publik, aset rumah tangga, serta institusi.

Secara ekonomi, mekanismenya bekerja melalui beberapa jalur. Pertama, produksi yang meningkat menciptakan permintaan terhadap tenaga kerja, pemasok, jasa dan infrastruktur. Kedua, produktivitas yang lebih tinggi memperbesar ruang bagi kenaikan upah dan laba usaha. Ketiga, basis ekonomi yang melebar meningkatkan penerimaan fiskal yang dapat membiayai pendidikan, kesehatan, perlindungan

sosial dan infrastruktur. Keempat, proses tersebut membentuk ekspektasi dan investasi rumah tangga: ketika pendapatan lebih stabil, keluarga lebih berani menyekolahkan anak lebih lama, memperbaiki tempat tinggal, membeli alat produktif, atau memulai usaha. Akan tetapi, setiap jalur dapat terputus oleh konsentrasi pasar, mismatch keterampilan, inflasi, informalitas, lemahnya layanan publik, atau ketimpangan akses terhadap modal dan teknologi.

Dalam konteks Indonesia, rata-rata nasional dapat menyembunyikan kelompok yang tertinggal; data granular diperlukan untuk kebijakan presisi. Contoh ini penting karena menunjukkan bahwa kebijakan yang tampak berhasil pada tingkat makro dapat memiliki hasil berbeda pada tingkat rumah tangga. Satu wilayah dapat mencatat investasi tinggi tetapi kesempatan kerja lokal terbatas; daerah lain dapat menyerap banyak tenaga kerja tetapi berada pada pekerjaan berproduktivitas rendah. Dengan demikian, analisis perlu bergerak dari pertanyaan 'berapa besar pertumbuhan?' menuju 'bagaimana struktur pertumbuhan itu?', 'siapa yang berpartisipasi?', dan 'apakah pendapatan serta layanan yang diterima masyarakat meningkat secara riil?'. Pendekatan seperti ini juga menghindari jebakan melihat rata-rata nasional sebagai gambaran semua kelompok.

Arah kebijakan yang relevan adalah membangun dashboard lintas PDB, pendapatan median, kerja, layanan, lingkungan dan mobilitas. Kebijakan tersebut sebaiknya tidak diperlakukan sebagai proyek tunggal, melainkan sebagai paket yang menghubungkan sisi permintaan dan sisi penawaran. Insentif investasi, misalnya, perlu disertai pengembangan pemasok, pelatihan pekerja, infrastruktur, pembiayaan dan standar kerja. Program pendidikan perlu tersambung dengan kebutuhan industri dan perubahan teknologi. Bantuan sosial perlu terhubung dengan layanan kesehatan, pendidikan, penempatan kerja atau dukungan usaha ketika kondisi penerima memungkinkan. Integrasi semacam ini meningkatkan peluang bahwa setiap rupiah belanja publik atau investasi swasta menghasilkan multiplier ekonomi dan sosial yang lebih besar.

Dimensi distribusi juga menentukan keberhasilan. Kebijakan yang menaikkan efisiensi rata-rata dapat menghasilkan pemenang dan pihak yang tertinggal. Oleh karena itu, prinsip inklusi tidak berarti menahan perubahan, tetapi memperluas kemampuan masyarakat untuk ikut memperoleh manfaat dari perubahan. Reskilling bagi pekerja terdampak, pembiayaan transisi bagi UMKM, perlindungan pendapatan sementara, serta layanan dasar yang berkualitas merupakan contoh instrumen yang membuat transformasi lebih adil. Dalam jangka panjang, pemerataan kesempatan yang baik justru memperbesar basis talenta, kewirausahaan dan permintaan domestik yang menopang pertumbuhan.

Untuk memastikan akuntabilitas, keberhasilan bagian ini sebaiknya dipantau melalui indikator seperti median income, multidimensional poverty, service quality, regional disaggregation. Indikator output—misalnya jumlah program, pelatihan, proyek, atau penerima—tetap dibutuhkan untuk pengelolaan operasional, tetapi tidak boleh menggantikan outcome. Pertanyaan akhirnya adalah apakah masyarakat memiliki pendapatan riil lebih tinggi, pekerjaan lebih produktif, risiko ekonomi lebih rendah, akses layanan lebih baik, dan kesempatan mobilitas yang lebih besar. Ketika ukuran tersebut bergerak searah dengan pertumbuhan PDB, dapat dikatakan bahwa proses pemulihan mulai bertransformasi menjadi peningkatan taraf hidup yang substantif dan inklusif.

38. Dari Output ke Outcome dan Impact

Evaluasi pembangunan perlu membedakan input, aktivitas, output, outcome dan dampak merupakan inti persoalan yang dibahas pada bagian ini. Dalam kerangka pemulihan ekonomi Indonesia, pertanyaan penting bukan hanya seberapa cepat kegiatan ekonomi kembali berkembang, melainkan siapa yang memperoleh manfaat, melalui mekanisme apa, dan seberapa tahan manfaat tersebut terhadap guncangan berikutnya. Pertumbuhan agregat memang diperlukan karena tanpa perluasan basis produksi, ruang bagi penciptaan pendapatan dan penerimaan publik menjadi terbatas. Namun, kenaikan output baru menjadi pembangunan apabila menghasilkan kemampuan nyata bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan, meningkatkan keterampilan, menjaga kesehatan, membangun aset, dan merencanakan masa depan. Perspektif ini menempatkan taraf hidup sebagai hasil dari interaksi antara pasar kerja, struktur produksi, harga, layanan publik, aset rumah tangga, serta institusi.

Secara ekonomi, mekanismenya bekerja melalui beberapa jalur. Pertama, produksi yang meningkat menciptakan permintaan terhadap tenaga kerja, pemasok, jasa dan infrastruktur. Kedua, produktivitas yang lebih tinggi memperbesar ruang bagi kenaikan upah dan laba usaha. Ketiga, basis ekonomi yang melebar meningkatkan penerimaan fiskal yang dapat membiayai pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial dan infrastruktur. Keempat, proses tersebut membentuk ekspektasi dan investasi rumah tangga: ketika pendapatan lebih stabil, keluarga lebih berani menyekolahkan anak lebih lama, memperbaiki tempat tinggal, membeli alat produktif, atau memulai usaha. Akan tetapi, setiap jalur dapat terputus oleh konsentrasi pasar, mismatch keterampilan, inflasi, informalitas, lemahnya layanan publik, atau ketimpangan akses terhadap modal dan teknologi.

Dalam konteks Indonesia, jumlah peserta pelatihan adalah output; peningkatan upah dan keberlanjutan kerja adalah outcome yang lebih berarti. Contoh ini penting karena menunjukkan bahwa kebijakan yang tampak berhasil pada tingkat makro dapat memiliki hasil berbeda pada tingkat rumah tangga. Satu wilayah dapat mencatat investasi tinggi tetapi kesempatan kerja lokal terbatas; daerah lain dapat menyerap banyak tenaga kerja tetapi berada pada pekerjaan berproduktivitas rendah. Dengan demikian, analisis perlu bergerak dari pertanyaan 'berapa besar pertumbuhan?' menuju 'bagaimana struktur pertumbuhan itu?', 'siapa yang berpartisipasi?', dan 'apakah pendapatan serta layanan yang diterima masyarakat meningkat secara riil?'. Pendekatan seperti ini juga menghindari jebakan melihat rata-rata nasional sebagai gambaran semua kelompok.

Arah kebijakan yang relevan adalah menerapkan theory of change, baseline, indikator hasil dan evaluasi independen. Kebijakan tersebut sebaiknya tidak diperlakukan sebagai proyek tunggal, melainkan sebagai paket yang menghubungkan sisi permintaan dan sisi penawaran. Insentif investasi, misalnya, perlu disertai pengembangan pemasok, pelatihan pekerja, infrastruktur, pembiayaan dan standar kerja. Program pendidikan perlu tersambung dengan kebutuhan industri dan perubahan teknologi. Bantuan sosial perlu terhubung dengan layanan kesehatan, pendidikan, penempatan kerja atau dukungan usaha ketika kondisi penerima memungkinkan. Integrasi semacam ini meningkatkan peluang bahwa setiap rupiah belanja publik atau investasi swasta menghasilkan multiplier ekonomi dan sosial yang lebih besar.

Dimensi distribusi juga menentukan keberhasilan. Kebijakan yang menaikkan efisiensi rata-rata dapat menghasilkan pemenang dan pihak yang tertinggal. Oleh karena itu, prinsip inklusi tidak berarti

menahan perubahan, tetapi memperluas kemampuan masyarakat untuk ikut memperoleh manfaat dari perubahan. Reskilling bagi pekerja terdampak, pembiayaan transisi bagi UMKM, perlindungan pendapatan sementara, serta layanan dasar yang berkualitas merupakan contoh instrumen yang membuat transformasi lebih adil. Dalam jangka panjang, pemerataan kesempatan yang baik justru memperbesar basis talenta, kewirausahaan dan permintaan domestik yang menopang pertumbuhan.

Untuk memastikan akuntabilitas, keberhasilan bagian ini sebaiknya dipantau melalui indikator seperti completion, placement, earnings gain, cost-effectiveness. Indikator output—misalnya jumlah program, pelatihan, proyek, atau penerima—tetap dibutuhkan untuk pengelolaan operasional, tetapi tidak boleh menggantikan outcome. Pertanyaan akhirnya adalah apakah masyarakat memiliki pendapatan riil lebih tinggi, pekerjaan lebih produktif, risiko ekonomi lebih rendah, akses layanan lebih baik, dan kesempatan mobilitas yang lebih besar. Ketika ukuran tersebut bergerak searah dengan pertumbuhan PDB, dapat dikatakan bahwa proses pemulihan mulai bertransformasi menjadi peningkatan taraf hidup yang substantif dan inklusif.

39. Peran Pemerintah Daerah

Banyak penentu taraf hidup—transportasi, layanan dasar, izin, pasar, ruang—berada dekat dengan kewenangan daerah merupakan inti persoalan yang dibahas pada bagian ini. Dalam kerangka pemulihan ekonomi Indonesia, pertanyaan penting bukan hanya seberapa cepat kegiatan ekonomi kembali berkembang, melainkan siapa yang memperoleh manfaat, melalui mekanisme apa, dan seberapa tahan manfaat tersebut terhadap guncangan berikutnya. Pertumbuhan agregat memang diperlukan karena tanpa perluasan basis produksi, ruang bagi penciptaan pendapatan dan penerimaan publik menjadi terbatas. Namun, kenaikan output baru menjadi pembangunan apabila menghasilkan kemampuan nyata bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan, meningkatkan keterampilan, menjaga kesehatan, membangun aset, dan merencanakan masa depan. Perspektif ini menempatkan taraf hidup sebagai hasil dari interaksi antara pasar kerja, struktur produksi, harga, layanan publik, aset rumah tangga, serta institusi.

Secara ekonomi, mekanismenya bekerja melalui beberapa jalur. Pertama, produksi yang meningkat menciptakan permintaan terhadap tenaga kerja, pemasok, jasa dan infrastruktur. Kedua, produktivitas yang lebih tinggi memperbesar ruang bagi kenaikan upah dan laba usaha. Ketiga, basis ekonomi yang melebar meningkatkan penerimaan fiskal yang dapat membiayai pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial dan infrastruktur. Keempat, proses tersebut membentuk ekspektasi dan investasi rumah tangga: ketika pendapatan lebih stabil, keluarga lebih berani menyekolahkan anak lebih lama, memperbaiki tempat tinggal, membeli alat produktif, atau memulai usaha. Akan tetapi, setiap jalur dapat terputus oleh konsentrasi pasar, mismatch keterampilan, inflasi, informalitas, lemahnya layanan publik, atau ketimpangan akses terhadap modal dan teknologi.

Dalam konteks Indonesia, daerah dapat menjadi laboratorium kebijakan tetapi membutuhkan standar minimum dan mekanisme belajar antarwilayah. Contoh ini penting karena menunjukkan bahwa kebijakan yang tampak berhasil pada tingkat makro dapat memiliki hasil berbeda pada tingkat rumah tangga. Satu wilayah dapat mencatat investasi tinggi tetapi kesempatan kerja lokal terbatas; daerah lain dapat menyerap banyak tenaga kerja tetapi berada pada pekerjaan berproduktivitas rendah.

Dengan demikian, analisis perlu bergerak dari pertanyaan 'berapa besar pertumbuhan?' menuju 'bagaimana struktur pertumbuhan itu?', 'siapa yang berpartisipasi?', dan 'apakah pendapatan serta layanan yang diterima masyarakat meningkat secara riil?'. Pendekatan seperti ini juga menghindari jebakan melihat rata-rata nasional sebagai gambaran semua kelompok.

Arah kebijakan yang relevan adalah memperkuat kapasitas fiskal, data, kolaborasi dan akuntabilitas pemerintah daerah. Kebijakan tersebut sebaiknya tidak diperlakukan sebagai proyek tunggal, melainkan sebagai paket yang menghubungkan sisi permintaan dan sisi penawaran. Insentif investasi, misalnya, perlu disertai pengembangan pemasok, pelatihan pekerja, infrastruktur, pembiayaan dan standar kerja. Program pendidikan perlu tersambung dengan kebutuhan industri dan perubahan teknologi. Bantuan sosial perlu terhubung dengan layanan kesehatan, pendidikan, penempatan kerja atau dukungan usaha ketika kondisi penerima memungkinkan. Integrasi semacam ini meningkatkan peluang bahwa setiap rupiah belanja publik atau investasi swasta menghasilkan multiplier ekonomi dan sosial yang lebih besar.

Dimensi distribusi juga menentukan keberhasilan. Kebijakan yang menaikkan efisiensi rata-rata dapat menghasilkan pemenang dan pihak yang tertinggal. Oleh karena itu, prinsip inklusi tidak berarti menahan perubahan, tetapi memperluas kemampuan masyarakat untuk ikut memperoleh manfaat dari perubahan. Reskilling bagi pekerja terdampak, pembiayaan transisi bagi UMKM, perlindungan pendapatan sementara, serta layanan dasar yang berkualitas merupakan contoh instrumen yang membuat transformasi lebih adil. Dalam jangka panjang, pemerataan kesempatan yang baik justru memperbesar basis talenta, kewirausahaan dan permintaan domestik yang menopang pertumbuhan.

Untuk memastikan akuntabilitas, keberhasilan bagian ini sebaiknya dipantau melalui indikator seperti local service outcomes, own-source revenue, project delivery, citizen satisfaction. Indikator output—misalnya jumlah program, pelatihan, proyek, atau penerima—tetap dibutuhkan untuk pengelolaan operasional, tetapi tidak boleh menggantikan outcome. Pertanyaan akhirnya adalah apakah masyarakat memiliki pendapatan riil lebih tinggi, pekerjaan lebih produktif, risiko ekonomi lebih rendah, akses layanan lebih baik, dan kesempatan mobilitas yang lebih besar. Ketika ukuran tersebut bergerak searah dengan pertumbuhan PDB, dapat dikatakan bahwa proses pemulihan mulai bertransformasi menjadi peningkatan taraf hidup yang substantif dan inklusif.

40. Peran Perguruan Tinggi dan Pendidikan Tinggi

Universitas dapat menghubungkan pengetahuan, talenta, inovasi dan problem solving daerah merupakan inti persoalan yang dibahas pada bagian ini. Dalam kerangka pemulihan ekonomi Indonesia, pertanyaan penting bukan hanya seberapa cepat kegiatan ekonomi kembali berkembang, melainkan siapa yang memperoleh manfaat, melalui mekanisme apa, dan seberapa tahan manfaat tersebut terhadap guncangan berikutnya. Pertumbuhan agregat memang diperlukan karena tanpa perluasan basis produksi, ruang bagi penciptaan pendapatan dan penerimaan publik menjadi terbatas. Namun, kenaikan output baru menjadi pembangunan apabila menghasilkan kemampuan nyata bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan, meningkatkan keterampilan, menjaga kesehatan, membangun aset, dan merencanakan masa depan. Perspektif ini menempatkan taraf hidup sebagai

hasil dari interaksi antara pasar kerja, struktur produksi, harga, layanan publik, aset rumah tangga, serta institusi.

Secara ekonomi, mekanismenya bekerja melalui beberapa jalur. Pertama, produksi yang meningkat menciptakan permintaan terhadap tenaga kerja, pemasok, jasa dan infrastruktur. Kedua, produktivitas yang lebih tinggi memperbesar ruang bagi kenaikan upah dan laba usaha. Ketiga, basis ekonomi yang melebar meningkatkan penerimaan fiskal yang dapat membiayai pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial dan infrastruktur. Keempat, proses tersebut membentuk ekspektasi dan investasi rumah tangga: ketika pendapatan lebih stabil, keluarga lebih berani menyekolahkan anak lebih lama, memperbaiki tempat tinggal, membeli alat produktif, atau memulai usaha. Akan tetapi, setiap jalur dapat terputus oleh konsentrasi pasar, mismatch keterampilan, inflasi, informalitas, lemahnya layanan publik, atau ketimpangan akses terhadap modal dan teknologi.

Dalam konteks Indonesia, kampus di luar pusat ekonomi dapat menjadi anchor institution melalui inkubasi, riset terapan dan pengembangan SDM lokal. Contoh ini penting karena menunjukkan bahwa kebijakan yang tampak berhasil pada tingkat makro dapat memiliki hasil berbeda pada tingkat rumah tangga. Satu wilayah dapat mencatat investasi tinggi tetapi kesempatan kerja lokal terbatas; daerah lain dapat menyerap banyak tenaga kerja tetapi berada pada pekerjaan berproduktivitas rendah. Dengan demikian, analisis perlu bergerak dari pertanyaan 'berapa besar pertumbuhan?' menuju 'bagaimana struktur pertumbuhan itu?', 'siapa yang berpartisipasi?', dan 'apakah pendapatan serta layanan yang diterima masyarakat meningkat secara riil?'. Pendekatan seperti ini juga menghindari jebakan melihat rata-rata nasional sebagai gambaran semua kelompok.

Arah kebijakan yang relevan adalah mendorong teaching-research-extension yang terkait kebutuhan industri, pemerintah dan komunitas. Kebijakan tersebut sebaiknya tidak diperlakukan sebagai proyek tunggal, melainkan sebagai paket yang menghubungkan sisi permintaan dan sisi penawaran. Insentif investasi, misalnya, perlu disertai pengembangan pemasok, pelatihan pekerja, infrastruktur, pembiayaan dan standar kerja. Program pendidikan perlu tersambung dengan kebutuhan industri dan perubahan teknologi. Bantuan sosial perlu terhubung dengan layanan kesehatan, pendidikan, penempatan kerja atau dukungan usaha ketika kondisi penerima memungkinkan. Integrasi semacam ini meningkatkan peluang bahwa setiap rupiah belanja publik atau investasi swasta menghasilkan multiplier ekonomi dan sosial yang lebih besar.

Dimensi distribusi juga menentukan keberhasilan. Kebijakan yang menaikkan efisiensi rata-rata dapat menghasilkan pemenang dan pihak yang tertinggal. Oleh karena itu, prinsip inklusi tidak berarti menahan perubahan, tetapi memperluas kemampuan masyarakat untuk ikut memperoleh manfaat dari perubahan. Reskilling bagi pekerja terdampak, pembiayaan transisi bagi UMKM, perlindungan pendapatan sementara, serta layanan dasar yang berkualitas merupakan contoh instrumen yang membuat transformasi lebih adil. Dalam jangka panjang, pemerataan kesempatan yang baik justru memperbesar basis talenta, kewirausahaan dan permintaan domestik yang menopang pertumbuhan.

Untuk memastikan akuntabilitas, keberhasilan bagian ini sebaiknya dipantau melalui indikator seperti graduate employment, applied research, startup survival, industry collaboration. Indikator output—misalnya jumlah program, pelatihan, proyek, atau penerima—tetap dibutuhkan untuk pengelolaan operasional, tetapi tidak boleh menggantikan outcome. Pertanyaan akhirnya adalah apakah masyarakat memiliki pendapatan riil lebih tinggi, pekerjaan lebih produktif, risiko ekonomi lebih rendah,

akses layanan lebih baik, dan kesempatan mobilitas yang lebih besar. Ketika ukuran tersebut bergerak searah dengan pertumbuhan PDB, dapat dikatakan bahwa proses pemulihan mulai bertransformasi menjadi peningkatan taraf hidup yang substantif dan inklusif.

41. Bisnis sebagai Mitra Pembangunan Inklusif

Perusahaan membentuk kualitas pekerjaan, rantai pasok, inovasi dan dampak lingkungan merupakan inti persoalan yang dibahas pada bagian ini. Dalam kerangka pemulihan ekonomi Indonesia, pertanyaan penting bukan hanya seberapa cepat kegiatan ekonomi kembali berkembang, melainkan siapa yang memperoleh manfaat, melalui mekanisme apa, dan seberapa tahan manfaat tersebut terhadap guncangan berikutnya. Pertumbuhan agregat memang diperlukan karena tanpa perluasan basis produksi, ruang bagi penciptaan pendapatan dan penerimaan publik menjadi terbatas. Namun, kenaikan output baru menjadi pembangunan apabila menghasilkan kemampuan nyata bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan, meningkatkan keterampilan, menjaga kesehatan, membangun aset, dan merencanakan masa depan. Perspektif ini menempatkan taraf hidup sebagai hasil dari interaksi antara pasar kerja, struktur produksi, harga, layanan publik, aset rumah tangga, serta institusi.

Secara ekonomi, mekanismenya bekerja melalui beberapa jalur. Pertama, produksi yang meningkat menciptakan permintaan terhadap tenaga kerja, pemasok, jasa dan infrastruktur. Kedua, produktivitas yang lebih tinggi memperbesar ruang bagi kenaikan upah dan laba usaha. Ketiga, basis ekonomi yang melebar meningkatkan penerimaan fiskal yang dapat membiayai pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial dan infrastruktur. Keempat, proses tersebut membentuk ekspektasi dan investasi rumah tangga: ketika pendapatan lebih stabil, keluarga lebih berani menyekolahkan anak lebih lama, memperbaiki tempat tinggal, membeli alat produktif, atau memulai usaha. Akan tetapi, setiap jalur dapat terputus oleh konsentrasi pasar, mismatch keterampilan, inflasi, informalitas, lemahnya layanan publik, atau ketimpangan akses terhadap modal dan teknologi.

Dalam konteks Indonesia, strategi ESG yang substantif harus terhubung dengan kinerja operasional dan manfaat komunitas, bukan sekadar pelaporan. Contoh ini penting karena menunjukkan bahwa kebijakan yang tampak berhasil pada tingkat makro dapat memiliki hasil berbeda pada tingkat rumah tangga. Satu wilayah dapat mencatat investasi tinggi tetapi kesempatan kerja lokal terbatas; daerah lain dapat menyerap banyak tenaga kerja tetapi berada pada pekerjaan berproduktivitas rendah. Dengan demikian, analisis perlu bergerak dari pertanyaan 'berapa besar pertumbuhan?' menuju 'bagaimana struktur pertumbuhan itu?', 'siapa yang berpartisipasi?', dan 'apakah pendapatan serta layanan yang diterima masyarakat meningkat secara riil?'. Pendekatan seperti ini juga menghindari jebakan melihat rata-rata nasional sebagai gambaran semua kelompok.

Arah kebijakan yang relevan adalah mengintegrasikan produktivitas dengan human capital, responsible business dan supplier development. Kebijakan tersebut sebaiknya tidak diperlakukan sebagai proyek tunggal, melainkan sebagai paket yang menghubungkan sisi permintaan dan sisi penawaran. Insentif investasi, misalnya, perlu disertai pengembangan pemasok, pelatihan pekerja, infrastruktur, pembiayaan dan standar kerja. Program pendidikan perlu tersambung dengan kebutuhan industri dan perubahan teknologi. Bantuan sosial perlu terhubung dengan layanan kesehatan, pendidikan,

penempatan kerja atau dukungan usaha ketika kondisi penerima memungkinkan. Integrasi semacam ini meningkatkan peluang bahwa setiap rupiah belanja publik atau investasi swasta menghasilkan multiplier ekonomi dan sosial yang lebih besar.

Dimensi distribusi juga menentukan keberhasilan. Kebijakan yang menaikkan efisiensi rata-rata dapat menghasilkan pemenang dan pihak yang tertinggal. Oleh karena itu, prinsip inklusi tidak berarti menahan perubahan, tetapi memperluas kemampuan masyarakat untuk ikut memperoleh manfaat dari perubahan. Reskilling bagi pekerja terdampak, pembiayaan transisi bagi UMKM, perlindungan pendapatan sementara, serta layanan dasar yang berkualitas merupakan contoh instrumen yang membuat transformasi lebih adil. Dalam jangka panjang, pemerataan kesempatan yang baik justru memperbesar basis talenta, kewirausahaan dan permintaan domestik yang menopang pertumbuhan.

Untuk memastikan akuntabilitas, keberhasilan bagian ini sebaiknya dipantau melalui indikator seperti living wage, supplier inclusion, training hours, emissions, community outcomes. Indikator output—misalnya jumlah program, pelatihan, proyek, atau penerima—tetap dibutuhkan untuk pengelolaan operasional, tetapi tidak boleh menggantikan outcome. Pertanyaan akhirnya adalah apakah masyarakat memiliki pendapatan riil lebih tinggi, pekerjaan lebih produktif, risiko ekonomi lebih rendah, akses layanan lebih baik, dan kesempatan mobilitas yang lebih besar. Ketika ukuran tersebut bergerak searah dengan pertumbuhan PDB, dapat dikatakan bahwa proses pemulihan mulai bertransformasi menjadi peningkatan taraf hidup yang substantif dan inklusif.

42. Koperasi, BUM Desa dan Ekonomi Berbasis Komunitas

Kelembagaan kolektif dapat memperkuat posisi tawar produsen kecil dan menahan nilai tambah di daerah merupakan inti persoalan yang dibahas pada bagian ini. Dalam kerangka pemulihan ekonomi Indonesia, pertanyaan penting bukan hanya seberapa cepat kegiatan ekonomi kembali berkembang, melainkan siapa yang memperoleh manfaat, melalui mekanisme apa, dan seberapa tahan manfaat tersebut terhadap guncangan berikutnya. Pertumbuhan agregat memang diperlukan karena tanpa perluasan basis produksi, ruang bagi penciptaan pendapatan dan penerimaan publik menjadi terbatas. Namun, kenaikan output baru menjadi pembangunan apabila menghasilkan kemampuan nyata bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan, meningkatkan keterampilan, menjaga kesehatan, membangun aset, dan merencanakan masa depan. Perspektif ini menempatkan taraf hidup sebagai hasil dari interaksi antara pasar kerja, struktur produksi, harga, layanan publik, aset rumah tangga, serta institusi.

Secara ekonomi, mekanismenya bekerja melalui beberapa jalur. Pertama, produksi yang meningkat menciptakan permintaan terhadap tenaga kerja, pemasok, jasa dan infrastruktur. Kedua, produktivitas yang lebih tinggi memperbesar ruang bagi kenaikan upah dan laba usaha. Ketiga, basis ekonomi yang melebar meningkatkan penerimaan fiskal yang dapat membiayai pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial dan infrastruktur. Keempat, proses tersebut membentuk ekspektasi dan investasi rumah tangga: ketika pendapatan lebih stabil, keluarga lebih berani menyekolahkan anak lebih lama, memperbaiki tempat tinggal, membeli alat produktif, atau memulai usaha. Akan tetapi, setiap jalur dapat terputus oleh konsentrasi pasar, mismatch keterampilan, inflasi, informalitas, lemahnya layanan publik, atau ketimpangan akses terhadap modal dan teknologi.

Dalam konteks Indonesia, koperasi yang hanya administratif sulit bersaing; keberhasilan memerlukan skala ekonomi, disiplin bisnis dan kepercayaan anggota. Contoh ini penting karena menunjukkan bahwa kebijakan yang tampak berhasil pada tingkat makro dapat memiliki hasil berbeda pada tingkat rumah tangga. Satu wilayah dapat mencatat investasi tinggi tetapi kesempatan kerja lokal terbatas; daerah lain dapat menyerap banyak tenaga kerja tetapi berada pada pekerjaan berproduktivitas rendah. Dengan demikian, analisis perlu bergerak dari pertanyaan 'berapa besar pertumbuhan?' menuju 'bagaimana struktur pertumbuhan itu?', 'siapa yang berpartisipasi?', dan 'apakah pendapatan serta layanan yang diterima masyarakat meningkat secara riil?'. Pendekatan seperti ini juga menghindari jebakan melihat rata-rata nasional sebagai gambaran semua kelompok.

Arah kebijakan yang relevan adalah profesionalisasi tata kelola, akuntansi, digitalisasi, agregasi dan kemitraan pasar. Kebijakan tersebut sebaiknya tidak diperlakukan sebagai proyek tunggal, melainkan sebagai paket yang menghubungkan sisi permintaan dan sisi penawaran. Insentif investasi, misalnya, perlu disertai pengembangan pemasok, pelatihan pekerja, infrastruktur, pembiayaan dan standar kerja. Program pendidikan perlu tersambung dengan kebutuhan industri dan perubahan teknologi. Bantuan sosial perlu terhubung dengan layanan kesehatan, pendidikan, penempatan kerja atau dukungan usaha ketika kondisi penerima memungkinkan. Integrasi semacam ini meningkatkan peluang bahwa setiap rupiah belanja publik atau investasi swasta menghasilkan multiplier ekonomi dan sosial yang lebih besar.

Dimensi distribusi juga menentukan keberhasilan. Kebijakan yang menaikkan efisiensi rata-rata dapat menghasilkan pemenang dan pihak yang tertinggal. Oleh karena itu, prinsip inklusi tidak berarti menahan perubahan, tetapi memperluas kemampuan masyarakat untuk ikut memperoleh manfaat dari perubahan. Reskilling bagi pekerja terdampak, pembiayaan transisi bagi UMKM, perlindungan pendapatan sementara, serta layanan dasar yang berkualitas merupakan contoh instrumen yang membuat transformasi lebih adil. Dalam jangka panjang, pemerataan kesempatan yang baik justru memperbesar basis talenta, kewirausahaan dan permintaan domestik yang menopang pertumbuhan.

Untuk memastikan akuntabilitas, keberhasilan bagian ini sebaiknya dipantau melalui indikator seperti member income, retained value, governance score, market reach. Indikator output—misalnya jumlah program, pelatihan, proyek, atau penerima—tetap dibutuhkan untuk pengelolaan operasional, tetapi tidak boleh menggantikan outcome. Pertanyaan akhirnya adalah apakah masyarakat memiliki pendapatan riil lebih tinggi, pekerjaan lebih produktif, risiko ekonomi lebih rendah, akses layanan lebih baik, dan kesempatan mobilitas yang lebih besar. Ketika ukuran tersebut bergerak searah dengan pertumbuhan PDB, dapat dikatakan bahwa proses pemulihan mulai bertransformasi menjadi peningkatan taraf hidup yang substantif dan inklusif.

43. Ketahanan Rumah Tangga terhadap Guncangan

Taraf hidup bukan hanya tingkat pendapatan tetapi kemampuan mempertahankan konsumsi dan aset saat terjadi guncangan merupakan inti persoalan yang dibahas pada bagian ini. Dalam kerangka pemulihan ekonomi Indonesia, pertanyaan penting bukan hanya seberapa cepat kegiatan ekonomi kembali berkembang, melainkan siapa yang memperoleh manfaat, melalui mekanisme apa, dan seberapa tahan manfaat tersebut terhadap guncangan berikutnya. Pertumbuhan agregat memang

diperlukan karena tanpa perluasan basis produksi, ruang bagi penciptaan pendapatan dan penerimaan publik menjadi terbatas. Namun, kenaikan output baru menjadi pembangunan apabila menghasilkan kemampuan nyata bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan, meningkatkan keterampilan, menjaga kesehatan, membangun aset, dan merencanakan masa depan. Perspektif ini menempatkan taraf hidup sebagai hasil dari interaksi antara pasar kerja, struktur produksi, harga, layanan publik, aset rumah tangga, serta institusi.

Secara ekonomi, mekanismenya bekerja melalui beberapa jalur. Pertama, produksi yang meningkat menciptakan permintaan terhadap tenaga kerja, pemasok, jasa dan infrastruktur. Kedua, produktivitas yang lebih tinggi memperbesar ruang bagi kenaikan upah dan laba usaha. Ketiga, basis ekonomi yang melebar meningkatkan penerimaan fiskal yang dapat membiayai pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial dan infrastruktur. Keempat, proses tersebut membentuk ekspektasi dan investasi rumah tangga: ketika pendapatan lebih stabil, keluarga lebih berani menyekolahkan anak lebih lama, memperbaiki tempat tinggal, membeli alat produktif, atau memulai usaha. Akan tetapi, setiap jalur dapat terputus oleh konsentrasi pasar, mismatch keterampilan, inflasi, informalitas, lemahnya layanan publik, atau ketimpangan akses terhadap modal dan teknologi.

Dalam konteks Indonesia, rumah tangga yang menjual aset produktif saat krisis dapat mengalami poverty trap meskipun sebelumnya tidak miskin. Contoh ini penting karena menunjukkan bahwa kebijakan yang tampak berhasil pada tingkat makro dapat memiliki hasil berbeda pada tingkat rumah tangga. Satu wilayah dapat mencatat investasi tinggi tetapi kesempatan kerja lokal terbatas; daerah lain dapat menyerap banyak tenaga kerja tetapi berada pada pekerjaan berproduktivitas rendah. Dengan demikian, analisis perlu bergerak dari pertanyaan 'berapa besar pertumbuhan?' menuju 'bagaimana struktur pertumbuhan itu?', 'siapa yang berpartisipasi?', dan 'apakah pendapatan serta layanan yang diterima masyarakat meningkat secara riil?'. Pendekatan seperti ini juga menghindari jebakan melihat rata-rata nasional sebagai gambaran semua kelompok.

Arah kebijakan yang relevan adalah memperkuat tabungan, asuransi, jaminan sosial, diversifikasi pendapatan dan layanan cepat. Kebijakan tersebut sebaiknya tidak diperlakukan sebagai proyek tunggal, melainkan sebagai paket yang menghubungkan sisi permintaan dan sisi penawaran. Insentif investasi, misalnya, perlu disertai pengembangan pemasok, pelatihan pekerja, infrastruktur, pembiayaan dan standar kerja. Program pendidikan perlu tersambung dengan kebutuhan industri dan perubahan teknologi. Bantuan sosial perlu terhubung dengan layanan kesehatan, pendidikan, penempatan kerja atau dukungan usaha ketika kondisi penerima memungkinkan. Integrasi semacam ini meningkatkan peluang bahwa setiap rupiah belanja publik atau investasi swasta menghasilkan multiplier ekonomi dan sosial yang lebih besar.

Dimensi distribusi juga menentukan keberhasilan. Kebijakan yang menaikkan efisiensi rata-rata dapat menghasilkan pemenang dan pihak yang tertinggal. Oleh karena itu, prinsip inklusi tidak berarti menahan perubahan, tetapi memperluas kemampuan masyarakat untuk ikut memperoleh manfaat dari perubahan. Reskilling bagi pekerja terdampak, pembiayaan transisi bagi UMKM, perlindungan pendapatan sementara, serta layanan dasar yang berkualitas merupakan contoh instrumen yang membuat transformasi lebih adil. Dalam jangka panjang, pemerataan kesempatan yang baik justru memperbesar basis talenta, kewirausahaan dan permintaan domestik yang menopang pertumbuhan.

Untuk memastikan akuntabilitas, keberhasilan bagian ini sebaiknya dipantau melalui indikator seperti emergency savings, insurance, consumption smoothing, recovery time. Indikator output—misalnya jumlah program, pelatihan, proyek, atau penerima—tetap dibutuhkan untuk pengelolaan operasional, tetapi tidak boleh menggantikan outcome. Pertanyaan akhirnya adalah apakah masyarakat memiliki pendapatan riil lebih tinggi, pekerjaan lebih produktif, risiko ekonomi lebih rendah, akses layanan lebih baik, dan kesempatan mobilitas yang lebih besar. Ketika ukuran tersebut bergerak searah dengan pertumbuhan PDB, dapat dikatakan bahwa proses pemulihan mulai bertransformasi menjadi peningkatan taraf hidup yang substantif dan inklusif.

44. Roadmap 2026-2030: Konsolidasi Pemulihan Inklusif

Fase awal perlu memperkuat pekerjaan, daya beli, layanan dasar dan produktivitas usaha merupakan inti persoalan yang dibahas pada bagian ini. Dalam kerangka pemulihan ekonomi Indonesia, pertanyaan penting bukan hanya seberapa cepat kegiatan ekonomi kembali berkembang, melainkan siapa yang memperoleh manfaat, melalui mekanisme apa, dan seberapa tahan manfaat tersebut terhadap guncangan berikutnya. Pertumbuhan agregat memang diperlukan karena tanpa perluasan basis produksi, ruang bagi penciptaan pendapatan dan penerimaan publik menjadi terbatas. Namun, kenaikan output baru menjadi pembangunan apabila menghasilkan kemampuan nyata bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan, meningkatkan keterampilan, menjaga kesehatan, membangun aset, dan merencanakan masa depan. Perspektif ini menempatkan taraf hidup sebagai hasil dari interaksi antara pasar kerja, struktur produksi, harga, layanan publik, aset rumah tangga, serta institusi.

Secara ekonomi, mekanismenya bekerja melalui beberapa jalur. Pertama, produksi yang meningkat menciptakan permintaan terhadap tenaga kerja, pemasok, jasa dan infrastruktur. Kedua, produktivitas yang lebih tinggi memperbesar ruang bagi kenaikan upah dan laba usaha. Ketiga, basis ekonomi yang melebar meningkatkan penerimaan fiskal yang dapat membiayai pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial dan infrastruktur. Keempat, proses tersebut membentuk ekspektasi dan investasi rumah tangga: ketika pendapatan lebih stabil, keluarga lebih berani menyekolahkan anak lebih lama, memperbaiki tempat tinggal, membeli alat produktif, atau memulai usaha. Akan tetapi, setiap jalur dapat terputus oleh konsentrasi pasar, mismatch keterampilan, inflasi, informalitas, lemahnya layanan publik, atau ketimpangan akses terhadap modal dan teknologi.

Dalam konteks Indonesia, periode ini menentukan apakah momentum pemulihan menjadi fondasi transformasi atau kembali pada pola pertumbuhan lama. Contoh ini penting karena menunjukkan bahwa kebijakan yang tampak berhasil pada tingkat makro dapat memiliki hasil berbeda pada tingkat rumah tangga. Satu wilayah dapat mencatat investasi tinggi tetapi kesempatan kerja lokal terbatas; daerah lain dapat menyerap banyak tenaga kerja tetapi berada pada pekerjaan berproduktivitas rendah. Dengan demikian, analisis perlu bergerak dari pertanyaan 'berapa besar pertumbuhan?' menuju 'bagaimana struktur pertumbuhan itu?', 'siapa yang berpartisipasi?', dan 'apakah pendapatan serta layanan yang diterima masyarakat meningkat secara riil?'. Pendekatan seperti ini juga menghindari jebakan melihat rata-rata nasional sebagai gambaran semua kelompok.

Arah kebijakan yang relevan adalah menetapkan target lintas kementerian berbasis outcome dan wilayah prioritas. Kebijakan tersebut sebaiknya tidak diperlakukan sebagai proyek tunggal, melainkan sebagai paket yang menghubungkan sisi permintaan dan sisi penawaran. Insentif investasi, misalnya, perlu disertai pengembangan pemasok, pelatihan pekerja, infrastruktur, pembiayaan dan standar kerja. Program pendidikan perlu tersambung dengan kebutuhan industri dan perubahan teknologi. Bantuan sosial perlu terhubung dengan layanan kesehatan, pendidikan, penempatan kerja atau dukungan usaha ketika kondisi penerima memungkinkan. Integrasi semacam ini meningkatkan peluang bahwa setiap rupiah belanja publik atau investasi swasta menghasilkan multiplier ekonomi dan sosial yang lebih besar.

Dimensi distribusi juga menentukan keberhasilan. Kebijakan yang menaikkan efisiensi rata-rata dapat menghasilkan pemenang dan pihak yang tertinggal. Oleh karena itu, prinsip inklusi tidak berarti menahan perubahan, tetapi memperluas kemampuan masyarakat untuk ikut memperoleh manfaat dari perubahan. Reskilling bagi pekerja terdampak, pembiayaan transisi bagi UMKM, perlindungan pendapatan sementara, serta layanan dasar yang berkualitas merupakan contoh instrumen yang membuat transformasi lebih adil. Dalam jangka panjang, pemerataan kesempatan yang baik justru memperbesar basis talenta, kewirausahaan dan permintaan domestik yang menopang pertumbuhan.

Untuk memastikan akuntabilitas, keberhasilan bagian ini sebaiknya dipantau melalui indikator seperti real wage growth, formal jobs, learning, health, MSME productivity. Indikator output—misalnya jumlah program, pelatihan, proyek, atau penerima—tetap dibutuhkan untuk pengelolaan operasional, tetapi tidak boleh menggantikan outcome. Pertanyaan akhirnya adalah apakah masyarakat memiliki pendapatan riil lebih tinggi, pekerjaan lebih produktif, risiko ekonomi lebih rendah, akses layanan lebih baik, dan kesempatan mobilitas yang lebih besar. Ketika ukuran tersebut bergerak searah dengan pertumbuhan PDB, dapat dikatakan bahwa proses pemulihan mulai bertransformasi menjadi peningkatan taraf hidup yang substantif dan inklusif.

45. Roadmap 2031-2035: Menuju Ekonomi Berproduktivitas Tinggi

Fase berikutnya menargetkan upgrading teknologi, inovasi, kota produktif dan sdm kelas dunia merupakan inti persoalan yang dibahas pada bagian ini. Dalam kerangka pemulihan ekonomi Indonesia, pertanyaan penting bukan hanya seberapa cepat kegiatan ekonomi kembali berkembang, melainkan siapa yang memperoleh manfaat, melalui mekanisme apa, dan seberapa tahan manfaat tersebut terhadap guncangan berikutnya. Pertumbuhan agregat memang diperlukan karena tanpa perluasan basis produksi, ruang bagi penciptaan pendapatan dan penerimaan publik menjadi terbatas. Namun, kenaikan output baru menjadi pembangunan apabila menghasilkan kemampuan nyata bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan, meningkatkan keterampilan, menjaga kesehatan, membangun aset, dan merencanakan masa depan. Perspektif ini menempatkan taraf hidup sebagai hasil dari interaksi antara pasar kerja, struktur produksi, harga, layanan publik, aset rumah tangga, serta institusi.

Secara ekonomi, mekanismenya bekerja melalui beberapa jalur. Pertama, produksi yang meningkat menciptakan permintaan terhadap tenaga kerja, pemasok, jasa dan infrastruktur. Kedua, produktivitas yang lebih tinggi memperbesar ruang bagi kenaikan upah dan laba usaha. Ketiga, basis ekonomi yang

melebar meningkatkan penerimaan fiskal yang dapat membiayai pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial dan infrastruktur. Keempat, proses tersebut membentuk ekspektasi dan investasi rumah tangga: ketika pendapatan lebih stabil, keluarga lebih berani menyekolahkan anak lebih lama, memperbaiki tempat tinggal, membeli alat produktif, atau memulai usaha. Akan tetapi, setiap jalur dapat terputus oleh konsentrasi pasar, mismatch keterampilan, inflasi, informalitas, lemahnya layanan publik, atau ketimpangan akses terhadap modal dan teknologi.

Dalam konteks Indonesia, Indonesia perlu keluar dari ketergantungan pada biaya tenaga kerja rendah menuju kompetisi berbasis produktivitas dan inovasi. Contoh ini penting karena menunjukkan bahwa kebijakan yang tampak berhasil pada tingkat makro dapat memiliki hasil berbeda pada tingkat rumah tangga. Satu wilayah dapat mencatat investasi tinggi tetapi kesempatan kerja lokal terbatas; daerah lain dapat menyerap banyak tenaga kerja tetapi berada pada pekerjaan berproduktivitas rendah. Dengan demikian, analisis perlu bergerak dari pertanyaan 'berapa besar pertumbuhan?' menuju 'bagaimana struktur pertumbuhan itu?', 'siapa yang berpartisipasi?', dan 'apakah pendapatan serta layanan yang diterima masyarakat meningkat secara riil?'. Pendekatan seperti ini juga menghindari jebakan melihat rata-rata nasional sebagai gambaran semua kelompok.

Arah kebijakan yang relevan adalah menggabungkan reformasi institusi, riset, industri maju, green-digital transition dan perlindungan sosial universal adaptif. Kebijakan tersebut sebaiknya tidak diperlakukan sebagai proyek tunggal, melainkan sebagai paket yang menghubungkan sisi permintaan dan sisi penawaran. Insentif investasi, misalnya, perlu disertai pengembangan pemasok, pelatihan pekerja, infrastruktur, pembiayaan dan standar kerja. Program pendidikan perlu tersambung dengan kebutuhan industri dan perubahan teknologi. Bantuan sosial perlu terhubung dengan layanan kesehatan, pendidikan, penempatan kerja atau dukungan usaha ketika kondisi penerima memungkinkan. Integrasi semacam ini meningkatkan peluang bahwa setiap rupiah belanja publik atau investasi swasta menghasilkan multiplier ekonomi dan sosial yang lebih besar.

Dimensi distribusi juga menentukan keberhasilan. Kebijakan yang menaikkan efisiensi rata-rata dapat menghasilkan pemenang dan pihak yang tertinggal. Oleh karena itu, prinsip inklusi tidak berarti menahan perubahan, tetapi memperluas kemampuan masyarakat untuk ikut memperoleh manfaat dari perubahan. Reskilling bagi pekerja terdampak, pembiayaan transisi bagi UMKM, perlindungan pendapatan sementara, serta layanan dasar yang berkualitas merupakan contoh instrumen yang membuat transformasi lebih adil. Dalam jangka panjang, pemerataan kesempatan yang baik justru memperbesar basis talenta, kewirausahaan dan permintaan domestik yang menopang pertumbuhan.

Untuk memastikan akuntabilitas, keberhasilan bagian ini sebaiknya dipantau melalui indikator seperti TFP, R&D, high-skill jobs, export complexity, median income. Indikator output—misalnya jumlah program, pelatihan, proyek, atau penerima—tetap dibutuhkan untuk pengelolaan operasional, tetapi tidak boleh menggantikan outcome. Pertanyaan akhirnya adalah apakah masyarakat memiliki pendapatan riil lebih tinggi, pekerjaan lebih produktif, risiko ekonomi lebih rendah, akses layanan lebih baik, dan kesempatan mobilitas yang lebih besar. Ketika ukuran tersebut bergerak searah dengan pertumbuhan PDB, dapat dikatakan bahwa proses pemulihan mulai bertransformasi menjadi peningkatan taraf hidup yang substantif dan inklusif.

46. Dua Belas Prioritas Strategis

Prioritas lintas sektor diperlukan agar kebijakan tidak terfragmentasi merupakan inti persoalan yang dibahas pada bagian ini. Dalam kerangka pemulihan ekonomi Indonesia, pertanyaan penting bukan hanya seberapa cepat kegiatan ekonomi kembali berkembang, melainkan siapa yang memperoleh manfaat, melalui mekanisme apa, dan seberapa tahan manfaat tersebut terhadap guncangan berikutnya. Pertumbuhan agregat memang diperlukan karena tanpa perluasan basis produksi, ruang bagi penciptaan pendapatan dan penerimaan publik menjadi terbatas. Namun, kenaikan output baru menjadi pembangunan apabila menghasilkan kemampuan nyata bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan, meningkatkan keterampilan, menjaga kesehatan, membangun aset, dan merencanakan masa depan. Perspektif ini menempatkan taraf hidup sebagai hasil dari interaksi antara pasar kerja, struktur produksi, harga, layanan publik, aset rumah tangga, serta institusi.

Secara ekonomi, mekanismenya bekerja melalui beberapa jalur. Pertama, produksi yang meningkat menciptakan permintaan terhadap tenaga kerja, pemasok, jasa dan infrastruktur. Kedua, produktivitas yang lebih tinggi memperbesar ruang bagi kenaikan upah dan laba usaha. Ketiga, basis ekonomi yang melebar meningkatkan penerimaan fiskal yang dapat membiayai pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial dan infrastruktur. Keempat, proses tersebut membentuk ekspektasi dan investasi rumah tangga: ketika pendapatan lebih stabil, keluarga lebih berani menyekolahkan anak lebih lama, memperbaiki tempat tinggal, membeli alat produktif, atau memulai usaha. Akan tetapi, setiap jalur dapat terputus oleh konsentrasi pasar, mismatch keterampilan, inflasi, informalitas, lemahnya layanan publik, atau ketimpangan akses terhadap modal dan teknologi.

Dalam konteks Indonesia, portofolio kebijakan harus memiliki pemilik program, pembiayaan, indikator, jadwal dan mekanisme koreksi. Contoh ini penting karena menunjukkan bahwa kebijakan yang tampak berhasil pada tingkat makro dapat memiliki hasil berbeda pada tingkat rumah tangga. Satu wilayah dapat mencatat investasi tinggi tetapi kesempatan kerja lokal terbatas; daerah lain dapat menyerap banyak tenaga kerja tetapi berada pada pekerjaan berproduktivitas rendah. Dengan demikian, analisis perlu bergerak dari pertanyaan 'berapa besar pertumbuhan?' menuju 'bagaimana struktur pertumbuhan itu?', 'siapa yang berpartisipasi?', dan 'apakah pendapatan serta layanan yang diterima masyarakat meningkat secara riil?'. Pendekatan seperti ini juga menghindari jebakan melihat rata-rata nasional sebagai gambaran semua kelompok.

Arah kebijakan yang relevan adalah memusatkan agenda pada pekerjaan, produktivitas, manusia, wilayah dan perlindungan. Kebijakan tersebut sebaiknya tidak diperlakukan sebagai proyek tunggal, melainkan sebagai paket yang menghubungkan sisi permintaan dan sisi penawaran. Insentif investasi, misalnya, perlu disertai pengembangan pemasok, pelatihan pekerja, infrastruktur, pembiayaan dan standar kerja. Program pendidikan perlu tersambung dengan kebutuhan industri dan perubahan teknologi. Bantuan sosial perlu terhubung dengan layanan kesehatan, pendidikan, penempatan kerja atau dukungan usaha ketika kondisi penerima memungkinkan. Integrasi semacam ini meningkatkan peluang bahwa setiap rupiah belanja publik atau investasi swasta menghasilkan multiplier ekonomi dan sosial yang lebih besar.

Dimensi distribusi juga menentukan keberhasilan. Kebijakan yang menaikkan efisiensi rata-rata dapat menghasilkan pemenang dan pihak yang tertinggal. Oleh karena itu, prinsip inklusi tidak berarti menahan perubahan, tetapi memperluas kemampuan masyarakat untuk ikut memperoleh manfaat

dari perubahan. Reskilling bagi pekerja terdampak, pembiayaan transisi bagi UMKM, perlindungan pendapatan sementara, serta layanan dasar yang berkualitas merupakan contoh instrumen yang membuat transformasi lebih adil. Dalam jangka panjang, pemerataan kesempatan yang baik justru memperbesar basis talenta, kewirausahaan dan permintaan domestik yang menopang pertumbuhan.

Untuk memastikan akuntabilitas, keberhasilan bagian ini sebaiknya dipantau melalui indikator seperti dashboard prioritas, milestone, delivery rate, outcome. Indikator output—misalnya jumlah program, pelatihan, proyek, atau penerima—tetap dibutuhkan untuk pengelolaan operasional, tetapi tidak boleh menggantikan outcome. Pertanyaan akhirnya adalah apakah masyarakat memiliki pendapatan riil lebih tinggi, pekerjaan lebih produktif, risiko ekonomi lebih rendah, akses layanan lebih baik, dan kesempatan mobilitas yang lebih besar. Ketika ukuran tersebut bergerak searah dengan pertumbuhan PDB, dapat dikatakan bahwa proses pemulihan mulai bertransformasi menjadi peningkatan taraf hidup yang substantif dan inklusif.

47. Kesimpulan: Pertumbuhan sebagai Sarana, Kehidupan yang Lebih Baik sebagai Tujuan

Keberhasilan ekonomi pada akhirnya harus terlihat dalam kehidupan masyarakat merupakan inti persoalan yang dibahas pada bagian ini. Dalam kerangka pemulihan ekonomi Indonesia, pertanyaan penting bukan hanya seberapa cepat kegiatan ekonomi kembali berkembang, melainkan siapa yang memperoleh manfaat, melalui mekanisme apa, dan seberapa tahan manfaat tersebut terhadap guncangan berikutnya. Pertumbuhan agregat memang diperlukan karena tanpa perluasan basis produksi, ruang bagi penciptaan pendapatan dan penerimaan publik menjadi terbatas. Namun, kenaikan output baru menjadi pembangunan apabila menghasilkan kemampuan nyata bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan, meningkatkan keterampilan, menjaga kesehatan, membangun aset, dan merencanakan masa depan. Perspektif ini menempatkan taraf hidup sebagai hasil dari interaksi antara pasar kerja, struktur produksi, harga, layanan publik, aset rumah tangga, serta institusi.

Secara ekonomi, mekanismenya bekerja melalui beberapa jalur. Pertama, produksi yang meningkat menciptakan permintaan terhadap tenaga kerja, pemasok, jasa dan infrastruktur. Kedua, produktivitas yang lebih tinggi memperbesar ruang bagi kenaikan upah dan laba usaha. Ketiga, basis ekonomi yang melebar meningkatkan penerimaan fiskal yang dapat membiayai pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial dan infrastruktur. Keempat, proses tersebut membentuk ekspektasi dan investasi rumah tangga: ketika pendapatan lebih stabil, keluarga lebih berani menyekolahkan anak lebih lama, memperbaiki tempat tinggal, membeli alat produktif, atau memulai usaha. Akan tetapi, setiap jalur dapat terputus oleh konsentrasi pasar, mismatch keterampilan, inflasi, informalitas, lemahnya layanan publik, atau ketimpangan akses terhadap modal dan teknologi.

Dalam konteks Indonesia, pertumbuhan yang kuat memperoleh legitimasi dan keberlanjutan ketika masyarakat merasakan kemajuan dalam pekerjaan, pendapatan, layanan, keamanan dan harapan masa depan. Contoh ini penting karena menunjukkan bahwa kebijakan yang tampak berhasil pada tingkat makro dapat memiliki hasil berbeda pada tingkat rumah tangga. Satu wilayah dapat mencatat investasi tinggi tetapi kesempatan kerja lokal terbatas; daerah lain dapat menyerap banyak tenaga kerja

tetapi berada pada pekerjaan berproduktivitas rendah. Dengan demikian, analisis perlu bergerak dari pertanyaan 'berapa besar pertumbuhan?' menuju 'bagaimana struktur pertumbuhan itu?', 'siapa yang berpartisipasi?', dan 'apakah pendapatan serta layanan yang diterima masyarakat meningkat secara riil?'. Pendekatan seperti ini juga menghindari jebakan melihat rata-rata nasional sebagai gambaran semua kelompok.

Arah kebijakan yang relevan adalah menginstitusikan pendekatan well-being dan inclusive productivity dalam perencanaan nasional. Kebijakan tersebut sebaiknya tidak diperlakukan sebagai proyek tunggal, melainkan sebagai paket yang menghubungkan sisi permintaan dan sisi penawaran. Insentif investasi, misalnya, perlu disertai pengembangan pemasok, pelatihan pekerja, infrastruktur, pembiayaan dan standar kerja. Program pendidikan perlu tersambung dengan kebutuhan industri dan perubahan teknologi. Bantuan sosial perlu terhubung dengan layanan kesehatan, pendidikan, penempatan kerja atau dukungan usaha ketika kondisi penerima memungkinkan. Integrasi semacam ini meningkatkan peluang bahwa setiap rupiah belanja publik atau investasi swasta menghasilkan multiplier ekonomi dan sosial yang lebih besar.

Dimensi distribusi juga menentukan keberhasilan. Kebijakan yang menaikkan efisiensi rata-rata dapat menghasilkan pemenang dan pihak yang tertinggal. Oleh karena itu, prinsip inklusi tidak berarti menahan perubahan, tetapi memperluas kemampuan masyarakat untuk ikut memperoleh manfaat dari perubahan. Reskilling bagi pekerja terdampak, pembiayaan transisi bagi UMKM, perlindungan pendapatan sementara, serta layanan dasar yang berkualitas merupakan contoh instrumen yang membuat transformasi lebih adil. Dalam jangka panjang, pemerataan kesempatan yang baik justru memperbesar basis talenta, kewirausahaan dan permintaan domestik yang menopang pertumbuhan.

Untuk memastikan akuntabilitas, keberhasilan bagian ini sebaiknya dipantau melalui indikator seperti living standards dashboard, trust, mobility, resilience. Indikator output—misalnya jumlah program, pelatihan, proyek, atau penerima—tetap dibutuhkan untuk pengelolaan operasional, tetapi tidak boleh menggantikan outcome. Pertanyaan akhirnya adalah apakah masyarakat memiliki pendapatan riil lebih tinggi, pekerjaan lebih produktif, risiko ekonomi lebih rendah, akses layanan lebih baik, dan kesempatan mobilitas yang lebih besar. Ketika ukuran tersebut bergerak searah dengan pertumbuhan PDB, dapat dikatakan bahwa proses pemulihan mulai bertransformasi menjadi peningkatan taraf hidup yang substantif dan inklusif.

Matriks 12 Prioritas Strategis

Prioritas	Aksi kunci	Hasil yang dituju	Indikator utama
1. Pekerjaan berkualitas	Insentif investasi berbasis jobs-productivity; formalisasi; K3	Pendapatan kerja dan keamanan ekonomi naik	Upah riil; pekerjaan formal; jaminan sosial
2. Produktivitas UMKM	Digitalisasi proses; standardisasi; agregasi; mentoring	UMKM naik kelas dan margin meningkat	Value added; omzet riil; survival rate

3. SDM dan keterampilan	Foundational skills; TVET; microcredentials; RPL	Skill match dan mobilitas kerja membaik	Learning outcomes; placement; wage gain
4. Kesehatan dan gizi	Primer-preventif; gizi; perlindungan biaya	Produktivitas dan kualitas hidup meningkat	Healthy life; stunting; catastrophic spending
5. Transformasi desa	Agroindustri; BUM Desa; logistik; digital	Nilai tambah dan non-farm jobs tumbuh	Rural income; productivity; market access
6. Pusat pertumbuhan baru	Kota kecil; kawasan industri; konektivitas	Kesenjangan spasial menurun	Regional productivity; jobs; service access
7. AI dan digital inklusif	Broadband; skills; governance; SME adoption	Teknologi mengaugmentasi manusia	Digital adoption; productivity; inclusion
8. Perlindungan sosial adaptif	Portabilitas; data; shock response	Kerentanan dan poverty relapse menurun	Coverage; adequacy; response time
9. Perumahan-transportasi	TOD; rental; transit; sanitation	Biaya hidup dan waktu komuter turun	Housing burden; travel time
10. Green transition	Green skills; renewables; circular economy	Pekerjaan hijau dan kesehatan lingkungan naik	Green jobs; emissions; air quality
11. Kualitas fiskal	Outcome budgeting; evaluasi; tax reform	Ruang fiskal dan efektivitas layanan membaik	Tax ratio; spending efficiency
12. Governance & data	Dashboard; delivery unit; evaluasi independen	Akuntabilitas hasil meningkat	Milestone delivery; citizen outcomes

Glossarium

Artificial Intelligence (AI): Sistem komputasi yang melakukan tugas yang biasanya membutuhkan kemampuan kognitif manusia, seperti prediksi, generasi bahasa, pengenalan pola, dan pengambilan keputusan berbantuan data.

Daya beli: Kemampuan pendapatan nominal membeli barang dan jasa setelah memperhitungkan tingkat harga.

Decent work / pekerjaan layak: Pekerjaan produktif dengan pendapatan adil, keamanan, perlindungan sosial, hak di tempat kerja, dan kesempatan berkembang.

Employment multiplier: Tambahan pekerjaan langsung, tidak langsung, dan terinduksi yang muncul dari peningkatan aktivitas atau investasi ekonomi.

Ekonomi inklusif: Sistem ekonomi yang memungkinkan kelompok luas berpartisipasi dalam dan memperoleh manfaat dari pertumbuhan.

Formalitas kerja: Derajat keterikatan pekerjaan pada kontrak, regulasi, pajak, standar ketenagakerjaan dan jaminan sosial.

Green jobs: Pekerjaan yang berkontribusi pada perlindungan atau pemulihan lingkungan sekaligus memenuhi prinsip pekerjaan layak.

Human capital: Stok pengetahuan, keterampilan, kesehatan dan atribut produktif yang melekat pada manusia.

Income mobility: Perubahan posisi pendapatan seseorang atau rumah tangga sepanjang waktu atau antargenerasi.

Inflasi pangan: Kenaikan tingkat harga kelompok makanan yang sangat menentukan kesejahteraan rumah tangga berpendapatan rendah.

Just transition: Proses transisi menuju ekonomi rendah karbon yang melindungi pekerja dan komunitas terdampak serta membagi manfaat dan biaya secara adil.

Ketimpangan: Perbedaan distribusi pendapatan, kekayaan, kesempatan atau akses layanan antarindividu, kelompok dan wilayah.

Kelas menengah: Kelompok rumah tangga dengan tingkat konsumsi atau pendapatan di atas kerentanan dasar tetapi tetap sensitif terhadap biaya hidup dan guncangan ekonomi.

Living standards / taraf hidup: Kondisi material dan nonmaterial yang menentukan kemampuan masyarakat memenuhi kebutuhan, menikmati layanan, memiliki keamanan ekonomi, dan memperluas pilihan hidup.

Median income: Pendapatan yang membagi populasi menjadi dua bagian sama besar; lebih tahan terhadap pengaruh pendapatan ekstrem dibanding rata-rata.

Microcredential: Sertifikasi pembelajaran berukuran kecil dan spesifik yang membuktikan kompetensi tertentu.

Multidimensional poverty: Kemiskinan yang diukur dari kekurangan pada beberapa dimensi seperti kesehatan, pendidikan, perumahan, dan standar hidup, bukan hanya pendapatan.

Place-based development: Pendekatan pembangunan yang dirancang berdasarkan karakteristik, aset, hambatan, dan institusi spesifik suatu wilayah.

Produktivitas tenaga kerja: Nilai output atau nilai tambah yang dihasilkan per pekerja atau per jam kerja.

Real wage / upah riil: Upah nominal yang telah disesuaikan dengan perubahan tingkat harga.

Reskilling: Pembelajaran keterampilan baru agar seseorang dapat beralih ke tugas atau pekerjaan yang berbeda.

RPL / Recognition of Prior Learning: Pengakuan formal atas kompetensi yang diperoleh dari pengalaman kerja atau pembelajaran nonformal.

School-to-work transition: Proses perpindahan dari pendidikan menuju pekerjaan yang stabil dan produktif.

Skills mismatch: Ketidakcocokan antara kompetensi pekerja dengan tuntutan pekerjaan atau struktur permintaan tenaga kerja.

Social protection: Kebijakan dan program untuk melindungi individu dari kemiskinan dan risiko pendapatan seperti sakit, pengangguran, usia tua atau bencana.

TFP / Total Factor Productivity: Bagian pertumbuhan output yang tidak dijelaskan hanya oleh kenaikan jumlah tenaga kerja dan modal, sering dikaitkan dengan teknologi, organisasi dan efisiensi.

Upskilling: Peningkatan keterampilan agar pekerja dapat menjalankan tugas yang lebih kompleks atau produktif.

Value added: Nilai ekonomi yang ditambahkan dalam proses produksi setelah dikurangi nilai input antara.

Vulnerability / kerentanan: Risiko rumah tangga mengalami penurunan kesejahteraan atau jatuh miskin akibat guncangan.

Well-being: Konsep kesejahteraan luas yang mencakup kondisi material, kesehatan, pendidikan, keamanan, lingkungan, relasi sosial dan kepuasan hidup.

Daftar Pustaka

- Alisjahbana, A. S., & Manning, C. (2006). Labour market dimensions of poverty in Indonesia. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 42(2), 235–261. <https://doi.org/10.1080/00074910600873674>
- Ali, M., Egbetokun, A., & Memon, M. H. (2018). Human capital, social capabilities and economic growth. *Economies*, 6(1), 2. <https://doi.org/10.3390/economies6010002>
- Badan Pusat Statistik. (2026a). Ekonomi Indonesia triwulan I-2026 tumbuh 5,61 persen (y-on-y). BPS-Statistics Indonesia.
- Badan Pusat Statistik. (2026b). Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 4,68 persen. Rata-rata upah buruh sebesar 3,29 juta rupiah. BPS-Statistics Indonesia.
- Badan Pusat Statistik. (2026c). Indonesia's economic growth in 2025 was 5.11 percent. BPS-Statistics Indonesia.
- Cohen, D., & Soto, M. (2007). Growth and human capital: Good data, good results. *Journal of Economic Growth*, 12, 51–76. <https://doi.org/10.1007/s10887-007-9011-5>
- Dinda, S. (2014). Inclusive growth through creation of human and social capital. *International Journal of Social Economics*, 41(10), 878–895. <https://doi.org/10.1108/IJSE-07-2013-0157>
- Johnson, L. (2023). Interrogating inclusive growth: Implications for conceptualisation, measurement and policy practice. *Australian Economic Papers*, 62. <https://doi.org/10.1111/1467-8454.12294>

- Krueger, A. B., & Lindahl, M. (2001). Education for growth: Why and for whom? *Journal of Economic Literature*, 39(4), 1101–1136. <https://doi.org/10.1257/jel.39.4.1101>
- Lloyd-Ellis, H., & Roberts, J. (2002). Twin engines of growth: Skills and technology as equal partners in balanced growth. *Journal of Economic Growth*, 7, 87–115. <https://doi.org/10.1023/A:1015633528122>
- Purwanti, D. (2024). Inclusive economic growth and fiscal intervention: Could it reduce poverty, inequality, and unemployment in East Java? *Jurnal Ekonomi & Studi Pembangunan*, 25(1). <https://doi.org/10.18196/jesp.v25i1.21694>
- Razin, A. (1972). Investment in human capital and economic growth. *Metroeconomica*, 24(2), 101–116. <https://doi.org/10.1111/j.1467-999X.1972.tb00185.x>
- Sukmasanti, N. K. G., Satarudin, S., & Ferdaus, N. N. (2026). Analisis determinan pertumbuhan ekonomi: Tingkat pengangguran, kemiskinan, dan indeks pembangunan manusia di 34 provinsi Indonesia. *Economic Reviews Journal*, 5(2). <https://doi.org/10.56709/mrj.v5i2.1102>
- Woessmann, L. (2025). Skills and earnings: A multidimensional perspective on human capital. *Annual Review of Economics*, 17, 397–425. <https://doi.org/10.1146/annurev-economics-081324-081733>
- World Bank. (2026). Indonesia’s growth remains resilient, but productivity reforms are key to creating jobs and sustaining momentum. World Bank Group.
- World Bank. (2026). Indonesia economic prospects: Managing risks, unlocking productivity. World Bank Group.
- Hatta, Z. A., & Sarkawi, D. T. (2011). The poverty situation in Indonesia: Challenges and progress of the marginalized group. *Asian Social Work and Policy Review*, 5(2), 92–106. <https://doi.org/10.1111/j.1753-1411.2011.00051.x>
- Vallés-Giménez, J., & Zárate-Marco, A. (2026). Productivity and growth. In *Encyclopedia of Law and Economics*. Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-031-76422-6_384
- Rondón-Castillo, M. V., Rondón-Quintana, H. A., & Bastidas-Martínez, J. G. (2026). Human capital and economic growth in Colombia: Review. *Economies*, 14(1), 23. <https://doi.org/10.3390/economies14010023>
- Bestari, N., & Amaliah, I. (2024). Pengaruh pertumbuhan ekonomi, ketimpangan pendapatan dan pengangguran terhadap indeks kebahagiaan di Indonesia tahun 2014, 2017 dan 2021. *Bandung Conference Series: Economics Studies*, 4(3). <https://doi.org/10.29313/bcses.v4i3.14724>

Sumber Data dan Dokumen Kebijakan Daring

BPS – Pertumbuhan ekonomi triwulan I-2026:

<https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2026/05/05/2575/ekonomi-indonesia-triwulan-i-2026-tumbuh-5-61-persen--y-on-y-.html>

BPS – Keadaan ketenagakerjaan Februari 2026:

<https://www.bps.go.id/en/pressrelease/2026/05/05/2574/tingkat-pengangguran-terbuka--tpt--sebesar-4-68-persen--rata-rata-upah-buruh-sebesar-3-29-juta-rupiah-.html>

World Bank – Indonesia growth and productivity, June 2026:

<https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2026/06/13/indonesia-s-growth-remains-resilient-but-productivity-reforms-are-key-to-creating>

Penutup

Pemulihan ekonomi Indonesia akan memperoleh makna penuh apabila masyarakat merasakan bahwa bekerja membawa masa depan yang lebih baik, usaha produktif dapat tumbuh, biaya hidup terkendali, anak-anak memperoleh pendidikan bermutu, keluarga terlindungi dari risiko kesehatan dan kehilangan pendapatan, serta tempat tinggal dan lingkungan menjadi lebih layak. Dengan demikian, orientasi pembangunan harus konsisten: pertumbuhan adalah mesin, produktivitas adalah penggerak, institusi adalah pengarah, dan peningkatan taraf hidup manusia adalah tujuan akhirnya.